

# **REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL: STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM**

## **DISERTASI**

**Diajukan Sebagai salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Doktor (Dr)  
Dalam Bidang Hukum Keluarga Pada Program Pascasarjana  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



Oleh

**MOHD. RAFI RIYAWI**

**NIM : 31890515502**

**Promotor:**

**Dr. H. Ismail, M.Ag**

**Co-Promotor:**

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
PROGRAM DOKTOR PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
PEKANBARU-RIAU  
1442H/2021M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

## Lembaran Pengesahan

Nama : Mohd. Rafi Riyawi  
 Nomor Induk Mahasiswa : 31890515502  
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
 Judul : Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam  
 Hukum Nasional : Studi Tentang Kompilasi Hukum  
 Islam

Tim Penguji

**Prof. Dr. Hairunas , M, Ag**  
 Ketua / Penguji I

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.**  
 Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
 Penguji III

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**  
 Penguji IV

**Dr. H. Agustiar, M.Ag.**  
 Penguji V

**Dr. H. Ismail, M.Ag.**  
 Promotor / Penguji VI

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
 Co-Promotor / Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 05 Agustus 2021

2. Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHD. RAFI RIYAWI  
 NIM : 31890515502  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bagansiapi-api, 16 Mei 1979  
 Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)  
 Konsentrasi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: ***Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional: Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam***” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021



**Mohd. Rafi Riyawi**  
**NIM. 31890515502**





**Dr. H. ISMAIL, M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN BUKITTINGGI**

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara  
 MOHD. RAFI RIYAWI

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
 UIN SUSKA RIAU  
 di-  
 Pekanbaru

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap Disertasi saudara :

Nama	: MOHD. RAFI RIYAWI
NIM	: 31890515502
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: <b>“REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL: STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Bukittinggi, Juni 2021  
 Promotor

**Dr. H. Ismail, M.Ag**  
 NIP. 196812121993031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. JUMNI NELLI, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
MOHD. RAFI RIYAWI

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN SUSKA RIAU  
Pekanbaru

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap Disertasi saudara :

Nama	: MOHD. RAFI RIYAWI
NIM	: 31890515502
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: <b>“REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL: STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Tertutup Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.  
*Assalamualaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, Juni 2021  
Co-Promotor

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
NIP. 197206282005012004



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004

Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

## Lembaran Pengesahan

Nama : Mohd. Rafi Riyawi  
 Nomor Induk Mahasiswa : 31890515502  
 Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
 Judul : Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam  
 Hukum Nasional : Studi Tentang Kompilasi Hukum  
 Islam

Tim Penguji

**Prof. Dr. Hairunas , M, Ag**  
 Ketua / Penguji I

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.**  
 Sekretaris / Penguji II

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
 Penguji III

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**  
 Penguji IV

**Dr. H. Agustiar, M.Ag.**  
 Penguji V

**Dr. H. Ismail, M.Ag.**  
 Promotor / Penguji VI

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
 Co-Promotor / Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 05 Agustus 2021

2. Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHD. RAFI RIYAWI  
 NIM : 31890515502  
 Tempat/Tgl. Lahir : Bagansiapi-api, 16 Mei 1979  
 Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)  
 Konsentrasi : Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: ***Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional: Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam***” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 02 Agustus 2021



**Mohd. Rafi Riyawi**  
**NIM. 31890515502**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Dr. H. ISMAIL, M.Ag**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN BUKITTINGGI**

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara  
 MOHD. RAFI RIYAWI

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
 UIN SUSKA RIAU  
 di-  
 Pekanbaru

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap Disertasi saudara :

Nama	: MOHD. RAFI RIYAWI
NIM	31890515502
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: <b>“REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL: STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.  
*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Bukittinggi, Juni 2021  
 Promotor

**Dr. H. Ismail, M.Ag**  
 NIP. 196812121993031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. JUMNI NELLI, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
MOHD. RAFI RIYAWI

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN SUSKA RIAU  
Pekanbaru

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap Disertasi saudara :

Nama	: MOHD. RAFI RIYAWI
NIM	: 31890515502
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Judul	: <b>“REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL: STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM”</b>

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam Ujian Tertutup Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.  
*Assalamualaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, Juni 2021  
Co-Promotor

**Dr. Jumni Nelli, M.Ag**  
NIP. 197206282005012004

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas hidayah dan anugerah kesehatan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan baik meskipun membutuhkan waktu yang cukup panjang. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, sebagai suri tauladan umat serta pembawa panji-panji kebenaran dan pembaharuan bagi kehidupan umat manusia.

Penyelesaian penulisan disertasi dengan judul ***“Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional: Studi Kompilasi Hukum Islam”***, ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan.

Dalam penyelesaian disertasi ini, penulis mengakui banyak menemui kesulitan dan hambatan terutama pengumpulan literatur bahan dan pengolahan data. Namun, berkat bimbingan, dorongan, masukan serta dukungan yang diberikan, *alhamdulillah* karya ilmiah ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penulisan dan penyelesaian disertasi ini. Pada kesempatan ini pula perkenalkan penulis menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Buyaku Drs. Hamka Riau (H. Mohd. Khothbah Arraffie) dan Mak-ku Hj. Maimunah MH, manusia mulia yang selalu menyemangati penulis untuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesegera mungkin menyelesaikan program Doktor ini. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu untuk mereka berdua.

2. Prof. Dr. Hairunas, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif kasim Riau.
3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti Program Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
5. Dr. H. Ismail, M. Ag selaku promotor yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan pencerahan yang diberikan sehingga selesainya penulisan disertasi ini.
6. Ibu Dr. Jumni Nelli, M. Ag selaku Co-Promotor yang selalu memberi petunjuk dan memupuk semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan disertasi ini.
7. Seluruh Dosen Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membimbing, mendidik dan mewariskan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan pahala di sisi Allah *Subhanahu wa ta'ala*.
8. Pimpinan dan staf Perpustakaan Universitas dan Perpustakaan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam pencarian literatur yang diperlukan.
9. Istriku tercinta Mardiah, S.Pd.I dan anak-anakku: Mohd. Zaim Ar-Rafie, Mohd. Zahid Ar Rafie dan Moza Zahrana Ar Rafie serta seluruh keluarga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar Hamka Riau yang selalu memberikan dorongan, do'a, perhatian serta bantuannya kepada penulis.

10. Para rekan-rekan Staff dan Karyawan di STAI Hubbulwathan Duri yang ikut memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

11. Teman-teman seperjuangan di Program 5000 Doktor Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2018: Muklisin, Khoiri, Noviyanti, Putri Aprilia Ningsih, Mustofa, M. Zein dan Mohd. Firdaus. Terima kasih atas kebersamaan dan kekompakan selama studi.

12. Terakhir, kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dan penyelesaian disertasi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini jauh dari kesempurnaan, baik isi, bahasa, teknik penulisan, ketelitian, kerapian dan metodologi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun perlu kiranya di berikan demi perbaikan dan penyempurnaan disertasi ini.

Terakhir, hanya kepada Allah-lah semua dikembalikan. Semoga disertasi ini dapat bermanfaat. *Amin.*

Duri, Agustus 2021

Penulis

**Mohd. Rafi Riyawi**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PENGESAHAN

### NOTA DINAS

### KURAT PERNYATAAN

### KATA PENGANTAR .....vi

### DAFTAR ISI .....ix

### TRANSLITERASI ..... xii

### ABSTRAK.....xiv

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang ..... 1

#### B. Permasalahan..... 14

#### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....15

#### D. Telaah Pustaka.....16

#### E. Kerangka Teori.....21

#### F. Metode Penelitian.....25

#### G. Sistematika penulisan.....29

### BAB II REINTERPRETASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

#### A. Hukum Islam dan Pengembangannya .....31

#### B. Konsep Reinterpretasi Hukum Islam .....40

#### C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Reinterpretasi: Meluruskan Konsep Hukum Islam .....52

#### D. Peranan Ijtihad dalam Reinterpretasi Hukum Islam .....56



### BAB III KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	75
B. Proses Pembentukan KHI.....	79
C. Pokok-Pokok Isi (Materi) KHI Dalam Bentuk Garis-garis Besar.....	92
D. Landasan Hukum dan Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	95
E. Tujuan dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam .....	98
F. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Sistem Hukum Nasional.....	109

### BAB IV REINTERPRETASI HUKUM ELUARGA DALAM HUKUM NASIONAL

A. Reinterpretasi Hukum Islam Suatu Keniscayaan .....	126
B. Reinterpretasi Hukum Keluarga Dalam Hukum Nasional.....	133
1. Pencatatan Perkawinan .....	134
2. Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Kedua Calon Mempelai ....	170
3. Izin Poligami .....	192
4. Perceraian Harus Di Depan Sidang Pengadilan Agama.....	229
5. Pembaharuan Hukum Kewarisan .....	249
6. Ahli Waris Pengganti .....	260
7. Wasiat Wajibah .....	269
C. Aplikasi Kompilasi Hukum Islam Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama Dan Mahkamah Agung RI.....	288
1. Putusan Perceraian.....	289
2. Pembatalan Perkawinan.....	297
3. Isbat Nikah dalam Gugatan Cerai .....	300

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ahli waris pengganti.....	303
5. Wasiat Wajibah.....	311

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	317
B. Saran .....	318

**DAFTAR PUSTAKA**

**BLOK DATA**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TRANSLITERASI

Halaman transliterasi mengacu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 yaitu sebagai berikut:

### I. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ر	R	غ	G
ب	B	ز	Z	ف	F
ت	T	س	S	ق	Q
ث	Š	ش	Sy	ك	K
ج	J	ص	Ş	ل	L
ح	H	ض	Ḍ	م	M
خ	Kh	ط	Ṭ	ن	N
د	D	ظ	Ẓ	و	W
ذ	Ẓ	ع	‘	ه	H
				ي	Y

### II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap tidak ditulis rangkap, misalnya اسلامية ditulis *Islamiyah*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### III. Vokal Pendek

*Fathah* ditulis *a*, misalnya القرآن ( *al-Qur'an* ), *kasrah* ditulis *i*, misalnya الكريم ( *al-Karim* ), dan *dammah* ditulis *u*, misalnya المؤمنون ( *al- mu 'minun* )

### IV. Vokal Panjang

*A* panjang ditulis *a*, misalnya دار ( *dar* ), *i*, panjang ditulis *i*, misalnya قيل ( *qila* ), dan *u* panjang ditulis *u*, misalnya تبعثون ( *tubasuna* )

### V. Vokal Rangkap

*fatah* + *ya* yang dimatikan ditulis *ai*, ريب ditulis *raiba* dan *fathah* + *waw* yang dimatikan ditulis *au*, misalnya قول *qaulu*.

### VI. Ta' Marbuthah

Untuk kata yang berahirah *ta marbuthah* ( ة ) diterasliterasikan dengan "ah", misalnya القيمة *al-qiamah*.

### VII. Huruf Besar

Penulisan hurup besar sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

### VIII. Singkatan-singkatan

Cet	: Cetakan
Hal	: halaman
Saw	: صلى الله عليه وسلم
Swt	: سبحانه الله وتعالى
Tt	: Tanpa Tahun
Tp	: Tanpa Pengarang
Terj	: Terjemahan

## ABSTRAK

### Judul: *Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional: Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam*

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan tentang reinterpretasi hukum Islam (fikih) di Indonesia dibanding dengan negara-negara muslim lainnya, Mengkaji dan membahas secara mendalam dan kritis bentuk reinterpretasi hukum Islam yang merupakan pergeseran dan peralihan konsep fikih tradisional tentang pencatatan perkawinan, pembatasan usia kawin dan persetujuan kedua calon mempelai, izin poligami, perceraian harus di depan sidang pengadilan agama, fitnah sebagai penghalang mewarisi, ahli waris pengganti, wasiat *wajibah*, penghapusan wakaf ahli dan kedudukan nazir sebagai salah satu rukun wakaf ke konsep fikih kontemporer sebagaimana terdapat dalam KHI, serta Mengkaji dan membahas aplikasi KHI dalam putusan-putusan Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung.

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan reinterpretasi hukum keluarga dalam hukum nasional.

Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa Reinterpretasi Hukum Islam sangat membutuhkan ijtihad untuk menemukan dan menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan kondisi zaman, masa, dan waktu. Tanpa ijtihad, maka hukum itu akan *jumud*, padahal kondisi masyarakat selalu berubah pada masanya. Dari sinilah para ulama mendorong para pakar untuk bersungguh-sungguh berijtihad dalam menetapkan hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam juga perlu pengembangan. Sebab, kalau tidak ada pengembangan hukum Islam akan tetap statis dan tertinggal oleh dinamika kehidupan sosial. Di sisi lain, banyak peristiwa dan kejadian yang menjadi bagian dari perubahan sosial senantiasa tumbuh dan terus-menerus mengalami perkembangan tiada berkesudahan (*'adamu tanâhî al-waqqâ'i*) yang kesemuanya itu memerlukan penyelesaian hukumnya, sedangkan *naş*, yakni wahyu dan sabda Nabi yang menjadi sumber pokok untuk menetapkan hukum Islam, telah terhenti atau berkesudahan (*tanâhâ al-nuşûş*). Dan upaya yang paling efektif untuk pengembangan hukum Islam itu adalah dengan terus-menerus melakukan ijtihad. Dalam persoalan hukum keluarga Islam di Indonesia, hasil ijtihad atau reinterpretasi tersebut ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

**Kata kunci:** Reinterpretasi, Hukum Keluarga, KHI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

Title: *Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam Dalam Hukum Nasional: Studi Tentang Kompilasi Hukum Islam*

This study aims to describe and explain the reinterpretation of Islamic law (fiqh) in Indonesia compared to other Muslim countries, to examine and discuss in depth and critically the form of reinterpretation of Islamic law which is a shift and transition of the traditional fiqh concept regarding marriage registration, age restrictions on marriage and approval of the two prospective brides, permission for polygamy, divorce must be in front of a religious court trial, slander as a barrier to inheriting, substitute heirs, mandatory will, the abolition of expert waqf and Nazir's position as one of the pillars of waqf to the contemporary fiqh concept as contained in the KHI, and Reviewing and discussing the application of KHI in the decisions of the Religious Courts and the Supreme Court.

The research method used in this paper is library research, namely by reading and studying books and writings related to reinterpretation of family law in national law.

The results of this study explain that the reinterpretation of Islamic law really needs *ijtihad* to find and determine laws that are in accordance with the conditions of the times, times, and times. Without *ijtihad*, the law will be obsolete, even though the condition of society is always changing in its time. From here, the scholars encouraged the experts to be serious about *ijtihad* in establishing Islamic law itself. Islamic law also needs development. Because, if there is no development of Islamic law, it will remain static and left behind by the dynamics of social life. On the other hand, many events and events that are part of social change are constantly growing and constantly undergoing endless development (*'adamu tanâhî al-waqâ'i*) all of which require legal settlement, while *naş*, namely revelations and the words of the Prophet become the main source for establishing Islamic law, has stopped or ended (*tanâhâ al-nuşûş*). And the most effective effort for the development of Islamic law is by continuously doing *ijtihad*. In matters of Islamic family law in Indonesia, the results of the *ijtihad* or reinterpretation are stipulated in the Compilation of Islamic Law which regulates matters of marriage, inheritance, and endowments.

**Keywords:** *Reinterpretasi, Hukum Keluarga, KHI*

UIN SUSKA RIAU



## التجريد

الموضوع: إعادة تفسير أحكام الأسرة الإسلامية في الأحكام الوطني: الدراسة عن تجميع أحكام الشريعة الإسلامية

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وشرح إعادة تفسير حكم الشريعة الإسلامية (الفقه) في إندونيسيا مقارنة بالدول الإسلامية الأخرى، لفحص ومناقشة شكل إعادة تفسير حكم الشريعة الإسلامية بعمق وبشكل نقدي والذي يمثل تحولاً وانتقالاً لمفهوم الفقه التقليدي فيما يتعلق تسجيل الزواج، قيود السن على الزواج والموافقة على العروسين المحتملين، الإذن بالزواج، يجب أن يكون الطلاق أمام محكمة دينية، والقذف كعائق أمام الميراث، والورثة البدلاء، والوصية الإلزامية، وإلغاء الوقف الخبير ونذير الموقف كأحد ركائز الوقف لمفهوم الفقه المعاصر كما ورد في كتاب KHI (تجميع أحكام الشريعة الإسلامية)، ومراجعة ومناقشة تطبيق KHI في قرارات المحاكم الدينية والمحكمة العليا.

أما طريقة البحث المستخدمة في كتابة هذا البحث هي البحث في المكتبات، أي قراءة ودراسة الكتب والكتابات المتعلقة بإعادة تفسير أحكام الأسرة في الأحكام الوطني. توضح نتائج هذه الدراسة أن إعادة تفسير الشريعة الإسلامية تحتاج حقاً إلى الاجتهاد لإيجاد وتحديد القوانين التي تتوافق مع ظروف العصر والأزمنة والأوقات. بدون الاجتهاد، يكون الأحكام قد عفا عليه الزمن، على الرغم من أن حالة المجتمع تتغير دائماً في وقته. من هنا، شجع العلماء الخبراء على أن يكونوا جادين في الاجتهاد في ترسيخ الشريعة الإسلامية نفسها. الشريعة الإسلامية بحاجة أيضاً إلى التنمية. لأنه إذا لم يكن هناك تطور للشريعة الإسلامية، فسوف تظل جامدة وتتركها تطورات الحياة الاجتماعية. من ناحية أخرى، فإن العديد من الأحداث والحوادث التي تشكل جزءاً من التغيير الاجتماعي تتزايد باستمرار وتخضع باستمرار لتطور لا نهاية له (عدم تنامي الوقائع) وكلها تتطلب تسوية أحكامية، في حين أن النص، أي الوحي وحديث النبي أصبح المصدر الرئيسي لإثبات أحكام الشريعة الإسلامية، وقد توقف أو انتهى (النهاية النصوص). والجهود الأكثر فاعلية لتطوير أحكام الشريعة الإسلامية هي الاجتهاد المستمر. في مسائل أحكام الأسرة الإسلامية في إندونيسيا، يتم تحديد نتائج الاجتهاد أو إعادة التفسير في مجموعة الشريعة الإسلامية التي تنظم مسائل الزواج والميراث والأوقاف.

كلمة رئيسية : إعادة التفسير, أحكام الأسرة, تجميع أحكام الشريعة الإسلامية.

UIN SUSKA RIAU

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam itu sendiri.<sup>1</sup> Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Hukum Islam yang berkembang di nusantara sebagian besar menganut mazhab Syafi'i. Oleh karena itu kitab-kitab fikih yang beredar, dipelajari dan dijadikan rujukan oleh umat Islam di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkenaan dengan hukum Islam adalah kitab-kitab fikih yang ditulis pada abad ke-3 atau ke-4 Hijriah terutama kitab-kitab fikih Syafi'iyah.<sup>2</sup>

Pada saat VOC (Belanda) berkuasa, kedudukan hukum Islam dalam bidang kekeluargaan diakui, bahkan dikumpulkan dalam sebuah kumpulan peraturan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*. Selain itu, telah dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makasar.

Hukum Islam pada mulanya -dengan bertumpu pada pemikiran Scholten van Oud Haarlem- diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara

<sup>1</sup> Kennet W. Morgan menjelaskan bahwa berita yang dapat dipercaya tentang Islam di Indonesia mula-mula sekali adalah dalam berita Marcopolo. Dalam perjalanannya kembali ke Venezia pada tahun 692 (1292 M), Marcopolo setelah bekerja pada Kubilai Khan di Tiongkok, singgah di perlak, sebuah kota di pantai utara Sumatra. Menurut Marcopolo, penduduk perlak pada waktu itu diislamkan oleh pedagang yang disebut kaum *Saracen*. Kota samara menurut pemberian Marcopolo dan tempat yang tidak jauh dari situ, yang dia sebut Basma yang kemudian dikenal dengan nama Samudera dan Pasai, adalah dua buah kota yang dipisahkan oleh sungai Pasai yang tidak jauh letaknya di sebelah utara Perlak (P.A. Hoesain Djajadiningrat, *Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983), hlm.119).

<sup>2</sup> Lihat Muhammad Daud Ali, SH., *Kedudukan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 1984), hlm. 7, Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa's of the Council of Indonesia Ulama, A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (Los Angeles: University of California, 1990), hlm. 34-37.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis dengan istilah *godsdiensstige wetten*, sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) *Regeering Reglement* tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam pasal 78 ayat 2 R.R. 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputera, atau yang disamakan dengan mereka, harus tunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka. Adapun lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan kekuasaan ini ialah *Priesterraad* (Pengadilan Agama, Stbl. 1882 No. 152 jo. 1937 No. 116 dan 610 untuk Jawa Madura) dan Kerapatan Kadi (Stbl. 1937 No. 638 dan 639 untuk Kalimantan Selatan/Timur) serta kemudian setelah merdeka, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (PP. No. 45/1957 untuk daerah luar Jawa/Madura dan Kalimantan Selatan/Timur. Meskipun pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 telah mengeluarkan aturan pada bidang kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal, dan lain-lain dibawah kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, namun secara *de Facto* hukum Islam masih tetap menjadi pilihan umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan di antara mereka melalui Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945, maka hukum Islam dan lembaga-lembaga peradilan nya tetap berlaku, kendatipun sedikit diubah dalam UU No. 19 tahun 1948 (pasal 35 ayat 2) yang berbunyi:

“Perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang Hakim yang beragama Islam, sebagai ketua, dan dua orang Hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, SH., *Ibid*, h. 12-25. Lihat juga Mahadi, *Beberapa Catatan Tentang Pengadilan Agama*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1969), hlm. 5-62.





Presiden atas usul Menteri Agama atas persetujuan Menteri Kehakiman”.

Dengan sejarah perjalanan hukum Islam yang begitu panjang di negeri ini, ternyata pemerintah Republik Indonesia menemukan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab yang sering berbeda tentang masalah yang sama antara satu dengan lainnya. Akibatnya ditemukan keanekaragaman putusan Pengadilan Agama terhadap kasus yang sama. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen Agama, lewat Biro Peradilan Agama mengeluarkan surat edaran No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan PP. 45/1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, yang ditujukan kepada Pengadilan Agama seluruh Indonesia agar para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara supaya berpedoman kepada 13 kitab fikih, yaitu *Al-Bajuri*, *Fath al-Muin*, *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, *Qalyubi/Mahalli*, *Fath al-Wahhab* dengan Syarahnya, *Tukhfah*, *Targib al-Musytaq*, *Qawānin Syar'iyah li as-Sayyid ibn Yahya*, *Qawanin Syar'iyah li al-Sayyid Ṣadaqah Dachlan*, *Syamsuri fi al-Faraid*, *Bugyah al-Musyarsyidin*, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, dan *Mugni al-Muhtāj*.

Sejak surat edaran Biro Peradilan Agama itu dikeluarkan, maka seluruh Peradilan Agama di Indonesia mempergunakan kitab-kitab tersebut sebagai rujukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Kitab-kitab ini sebagian besar berlaku di kalangan mazhab Syafi'i. Namun masih terjadi kesimpangsiuran hukum Islam yang mana yang dijadikan hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama disebabkan perbedaan pendapat ulama dalam hampir setiap persoalan, sehingga muncul ketidakpastian hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikis kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Akibat yang lebih jauh, dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih tradisional,<sup>4</sup> terjadilah misalnya perkawinan tidak perlu dicatat pada instansi yang berwenang. Akibatnya istri dan anak-anak akan kesulitan menuntut dan memperoleh haknya bila suami menceraikan atau menyia-nyiakannya. Demikian juga usia nikah tidak ditentukan dan dibenarkannya pernikahan tanpa persetujuan calon mempelai. Akibatnya banyak terjadi perkawinan dalam usia dini yang secara lahiriah belum mampu bertindak sebagai ibu rumah tangga yang baik untuk memelihara anak-anaknya, dan akhirnya muncullah generasi penerus yang tidak berpendidikan. Di samping itu, seorang wali boleh memaksa wanita yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan laki-laki tanpa persetujuan wanita yang bersangkutan (hak *ijbar*). Akibatnya terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Demikian juga, seorang suami boleh melakukan poligami tanpa persetujuan istri dan pengadilan, sebab diyakini bahwa poligami merupakan hak mutlak suami, sementara istri tidak boleh melakukan poliandri. Akibatnya terjadilah poligami yang tidak bertanggung jawab, seolah-olah wanita hanya menjadi lembaga pemuasan seksual kaum pria. Seorang suami dapat menceraikan istrinya hanya dengan mengucapkan talak karena dipandang talak itu mutlak hak suami. Akibatnya terjadilah talak semena-mena dari suami kepada istri, dan istri diperlakukan secara sewenang-wenang.

<sup>4</sup> Maksud tradisional dalam tulisan ini adalah teori atau konsep atau pandangan ulama/mujtahid tradisional yang sudah mapan, bahkan sudah menjadi pegangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis mayoritas muslim, yang merupakan antitesa terhadap teori/konsep/produk pemikiran modern/kontemporer. Dengan demikian, maksud kitab-kitab fikih yang ditulis pada masa yang lampau, yaitu abad ke-3 dan 4 Hijriah, dan 13 kitab fikih yang disebut dalam surat edaran Biro Peradilan Agama adalah kitab-kitab yang sudah dikenal di kalangan masyarakat muslim secara umum, dan pada intinya penulis menyebutnya dengan klasik. Maksud ini juga dikehendaki ketika menggunakan istilah tradisional dalam seluruh tulisan ini, kecuali dijelaskan untuk menunjukkan pengertian lain.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam bidang hukum kewarisan dan wakaf misalnya, fitnah tidak dipandang sebagai salah satu penghalang mewarisi, hanya terbatas pada pembunuhan dengan macam-macamnya, akibatnya ada kemungkinan di antara ahli waris yang ingin segera mendapat warisan, lalu ia memfitnah pewaris yang dapat dikenakan hukuman mati. Demikian pula, cucu dari anak laki-laki yang ayahnya meninggal lebih dulu dari kakek, tidak berhak mendapat warisan bila masih ada paman (saudara laki-laki bapaknya), yang tidak jarang menyebabkan cucu terlantar dan tidak dapat mengikuti pendidikan karena tidak mempunyai biaya (cucu terdinding oleh paman). Begitu pula, masih dijumpai adanya perbedaan pendapat tentang wasiat *wajibah*, di mana seorang anak angkat tidak berhak memperoleh warisan dari bapak angkatnya dan sebaliknya secara mutlak, meskipun kasih sayang yang mereka bina bertahun-tahun, akibatnya bisa memutuskan silaturahmi antara keluarga anak angkat dengan bapak angkatnya, dan sebaliknya. Demikian pula, adanya wakaf *ahli*, yakni wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Wakaf semacam ini banyak menimbulkan masalah, misalnya dijadikan cara untuk menghindari pembagian warisan kepada ahli waris tertentu setelah *waqif* meninggal dunia, atau dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas utang-utang yang dibuat *waqif* sebelum mewakafkan tanahnya. Selanjutnya, nazir (pengelola wakaf) tidak dimasukkan sebagai salah satu rukun wakaf, tetapi seorang pewaqif langsung bertindak sebagai nazir. Akibatnya, bila pewaqif meninggal dunia maka harta yang diwakafkan itu bisa hilang sebagai wakaf dan diambil alih oleh ahli waris menjadi harta warisan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan dari kitab-kitab fikih tradisional itu dapat dimaklumi, karena kitab-kitab itu ditulis jauh sebelum lahirnya paham kebangsaan, ketika itu praktik kenegaraan masih memakai konsep umat. Berbeda dengan paham kebangsaan, konsep umat menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan tali agama, sedangkan paham kebangsaan menitikberatkan dalam penegakan hukum sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlaku dalam suatu negara. Paham kebangsaan ini baru lahir sesudah Perang Dunia I, kemudian negara-negara Islam pun menganutnya. Dengan lahirnya paham kebangsaan ini produk hukum Islam yang dihasilkan oleh negara tidak lagi terikat pada satu mazhab, melainkan juga diambil dari pemikiran mazhab lain, seperti mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan bahkan dari mazhab Syi'ah, serta lainnya.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis dengan KHI) yang lahir pada akhir abad ke-20 di Indonesia lewat Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama R.I. No. 154 Tahun 1991, adalah suatu usaha reinterpretasi Hukum Keluarga di Indonesia, yang berkenaan dengan Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Isyarat adanya perubahan dan pembahasan tersebut, tampak dalam penjelasan umum KHI pada angka 4, yang mengatakan bahwa dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, maka kebutuhan masyarakat semakin berkembang, sehingga 13 kitab yang disebut dalam Surat Edaran Biro Peradilan Agama 18 Februari 1958 No. 8 / I / 735, dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambah kitab-kitab dari mazhab yang lain,

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya, membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan dengan negara-negara lain. Isinya banyak berubah dan berbeda dengan isi kitab-kitab fikih tradisional, dan dalam hal tertentu merupakan kebalikannya.

Para pakar hukum Islam Indonesia sering melemparkan gagasan tentang reinterpretasi hukum Islam dengan menggunakan berbagai istilah, misalnya: *restrukturisasi*, *reinterpretasi*, *redefinisi*, *reformulasi*, *reaktualisasi*, maupun *modernisasi*. Dalam tulisan ini peneliti menggunakan interpretasi dikarenakan lebih mudah dalam memaknai dan memahaminya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap sesuatu.<sup>6</sup> Interpretasi bisa disamakan dengan penafsiran yaitu suatu metode dengan menggunakan penggambaran informasi baik dari lisan, tulisan, dan gambar atau berbagai bentuk bahasa lainnya. Seorang penafsir melakukan penelitian terhadap suatu objek dengan menempatkannya pada kerangka pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas, baik secara sadar ataupun tidak. Setelah mendapatkan hasil yang objektif maka dituliskan dalam sebuah karya sebagai kajian ilmiah yang baik. Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan reinterpretasi adalah mengkaji secara ulang serta memahami hukum keluarga Islam secara luas dari aspek historis dan perkembangannya dari masa lalu hingga pada masa sekarang. Namun dalam penelitian ini yang di fokuskan hanya kepada hukum keluarga yang diadopsi di dalam KHI di Indonesia. Hukum keluarga yang ada di dalam KHI

<sup>6</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kelima*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Peminaan Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), hlm.112.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak dibahas dan sangat bermanfaat untuk dipedomani hakim dan sebagai sumber hukum dalam memutuskan perkara di pengadilan agama untuk masyarakat, dan kalau lebih luas dengan istilah hukum perdata Islam. Namun secara konteks adopsi hukum keluarga tersebut dapat berbeda dengan pemahaman kitab-kitab klasik dan terjadi *ikhtilaf* para ulama serta di masyarakat sehingga perlu kajian secara mendalam. Sebagai contoh dalam bidang perkawinan: keharusan pencatatan perkawinan, pembatasan usia kawin dan persetujuan kedua calon mempelai, keharusan izin poligami dari pengadilan, perceraian harus di depan sidang pengadilan agama; dalam bidang kewarisan: dimasukkannya fitnah sebagai salah satu penghalang mewarisi, dan diakuinya ahli waris pengganti, wasiat *wajibah* antara anak angkat dengan bapak angkat dan sebaliknya; dalam bidang perwakafan: dihapuskannya wakaf *ahli* dan Nazir dimasukkan sebagai salah satu rukun wakaf. Inilah yang dimaksud oleh peneliti dengan menggunakan reinterpretasi.

Hukum Fikih Islam telah menjadi Hukum Nasional, karena telah dimasukkan ke dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI berdasarkan INPRES No. 1 Tahun 1991. Hukum Fikih Islam bisa diterima di Indonesia menjadi Hukum Nasional, karena secara yuridis formal dan secara normatif telah menjadi hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum fikih Islam di samping sebagai entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, di beberapa daerah dari segi amaliahnya telah dilaksanakan dan dianggap sakral. Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat dan telah lama berlangsung di Indonesia.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Di beberapa daerah di Indonesia, Hukum Islam sudah dipegang teguh dan dijadikan landasan kehidupan masyarakatnya. Misalnya, di Minangkabau tercermin dalam pepatahnya: "*Adat dan syara'*





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ungkapan di atas, maka dapat dibantah ungkapan para penulis buku-buku hukum Barat/Belanda dan mereka yang sepaham dengan yang mengatakan bahwa Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia adalah dua unsur yang bertentangan. Sebenarnya ungkapan mereka ini dinyatakan dengan sadar sesuai dengan teori konflik yang mereka gunakan untuk memecah belah (*divide et empera*), mengadu domba rakyat Indonesia guna mengukuhkan kekuasaan Belanda di Indonesia. Karena adanya kesesuaian Hukum Islam dengan Hukum Adat itulah, khususnya dalam bidang perkawinan, sehingga Hukum Fikih Islam dalam Bidang perkawinan bisa diterima menjadi Hukum Nasional di Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI Buku I tentang Perkawinan.

Islam adalah agama yang universal sehingga dapat diterima oleh umat Islam itu sendiri. Begitu juga dengan hukum Islam itu sendiri berkembang sesuai dengan masa dan waktunya sehingga ada gagasan untuk mengkodifikasi sebagai sumber hukum Islam di masyarakat. Kesempurnaan agama Islam tersebut didasarkan kepada Q.S. al-Maidah (5): 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja

*sanda menyanda, syara' mengato adat memakai*”. Menurut Hamka pepatah ini menunjukkan bahwa Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat hubungannya. Dalam masyarakat muslim Gorontalo dapat dilihat dalam ungkapannya: “Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati”. Artinya kurang lebih sama dengan ungkapan adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat. Ungkapan ini menunjukkan eratnya hubungan Adat dengan Hukum Islam. Daud Ali mengutip ungkapan ini dari A. Gani Abdollah (1987:89). Selanjutnya berkenaan dengan masalah ini, hubungan adat dan Hukum Islam juga erat di Jawa. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkretisme agama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah Pedesaan. Lihat Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), hlm. 223.



berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad ﷺ wafat, banyak ayat-ayat al-Quran secara tekstual dipandang oleh kaum modernis sebagai ayat-ayat yang tidak relevan lagi dengan realitas sosial atau kemajuan zaman. Oleh sebab itu, diperlukan pemikiran reinterpretasi hukum Islam agar sesuai dengan kondisi zaman dengan cara memahami al-Quran dan al-Sunnah yang menjadi pokok ajaran Islam itu secara tekstual, kontekstual atau keduanya.

Reinterpretasi dapat juga dilaksanakan dengan cara memperbaharui hasil-hasil pemikiran (ijtihad) para pemikir Islam (mujtahidin) terdahulu yang sekarang tidak sesuai lagi dengan kepentingan umum (*maslahah ‘ammah*) dan perkembangan masyarakat serta keinginan zaman.<sup>8</sup>

Selain keterangan diatas, ayat ketiga pada surat al-Maidah ini mengandung dua variabel diantaranya:

1. Keterangan beberapa perkara yang diharamkan Allah, baik itu makanan ataupun perbuatan.
2. Keterangan tentang kesempurnaan agama. Pada teks ayat tiga dalam surat al-Maidah disebutkan bahwa agama telah disempurnakan. Tetapi muncul pertanyaan kemudian, kesempurnaan yang seperti apa yang dimaksudkan dalam kandungan ayat tersebut, mengingat masih banyak hal atau perkara yang baru muncul dalam tatanan aturan termasuk hukum Islam yang tidak ada di zaman ketika al-Quran diturunkan atau ketika pembawa risalah (Rasulullah) masih hidup, antara lain pembukuan al-Quran, pengumpulan

<sup>8</sup> Masyfuk Zuhdi, “Reinterpretasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, *Makalah*, Surabaya: P.T.A. Jawa Timur, 1995), hlm. 1-2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hadits, dan lain-lain. Dalam ayat tiga surat al-Maidah juga membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan Allah. Hal ini sudah semestinya diperhatikan dengan lebih serius oleh seorang hamba bila ingin menyempurnakan agamanya. Karena tidak sempurna seseorang (muslim) dalam beragama jika ia masih mengabaikan perkara-perkara yang dilarang dengan jelas oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala* dalam titah-Nya. Inilah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti hukum keluarga Islam yang sudah final di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Setelah memperhatikan kedua variabel yang terkandung di dalamnya, serta mencoba mengungkap apa hubungan antara kedua variabel yang ada di dalam ayat ini, Quraish Shihab menafsirkan ayat tiga surah al-Maidah tersebut berkaitan dengan kesempurnaan agama bahwa agama Islam telah sempurna dari berbagai macam hukum halal dan haram termasuk dalam hukum keluarga.<sup>9</sup>

Thabathaba'i (w.1981) menjelaskan perbedaan kata *akmaltu* dengan *atmamtu* dimana kata *akmaltu* digunakan untuk menggambarkan gabungan dari sekian banyak hal yang masing-masing sempurna dalam satu wadah yang utuh, sedang *atmamtu* menghimpun banyak hal yang belum sempurna sehingga dengan terhimpunnya menjadi sempurna.<sup>10</sup> Oleh karena itu, kesempurnaan yang dimaksud adalah kesempurnaan tentang salat, zakat, nikah, jual beli, kewarisan dan lain-lain. Hal tersebut terhimpun dalam wadah agama. Namun, sesuai dengan tuntutan zaman, masing-masing hal tersebut harus dikondisikan dengan situasi yang terjadi di masyarakat. Banyak

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), Juz 9, hlm. 177

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 23





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan agama terutama masalah keluarga yang tidak tercantum dalam kesempurnaan agama tersebut. Berdasarkan hal tersebutlah maka perlunya reinterpretasi agar agama sesuai dengan kondisi zaman.

Secara umum tujuan reinterpretasi hukum keluarga dapat dikelompokkan menjadi tiga:<sup>11</sup>

1. Merupakan kelompok umum yaitu negara yang berkepentingan dan menjadi salah satu cara pembangunan hukum lewat unifikasi Hukum Keluarga. Usaha unifikasi dilakukan karena ada sejumlah mazhab yang dianut masyarakat muslim di negara bersangkutan, yang didominasi oleh mazhab-mazhab fikih di kalangan Sunni, atau antara Sunni dengan Syi'ah. Bahkan untuk kasus Tunisia, unifikasi Hukum Keluarga ditujukan untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama.<sup>12</sup>
2. Untuk peningkatan status wanita. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun dapat dilihat sejarah munculnya, diantaranya adalah untuk menanggapi tuntutan-tuntutan peningkatan status wanita.
3. Untuk menanggapi perkembangan dan tuntutan zaman, karena konsep fikih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya. Yang terakhir ini

<sup>11</sup> Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 4-6

<sup>12</sup> Usaha unifikasi dapat dikelompokkan minimal menjadi empat kelompok. *Pertama*, unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan agama, misalnya kasus yang berlaku di Tunisia. *Kedua*, unifikasi yang bertujuan untuk menyatukan dua aliran besar dalam sejarah Islam, yakni antara paham Sunni dan Syi'ah, dimana Iran dan Irak termasuk di dalamnya. *Ketiga*, kelompok yang berusaha memadukan antar mazhab dalam Sunni, karena terdapat pengikut mazhab tersebut. *Keempat*, unifikasi dalam satu mazhab tertentu, misalnya di kalangan pengikut Syafi'i, Hanafi, Maliki, ataupun Hambali. Dengan menyebut unifikasi antar mazhab, bukan berarti format reinterpretasi yang ditemukan dengan sendirinya berubah dari dan berdasar pada mazhab yang ada di negara yang bersangkutan, boleh jadi formatnya diambil dari pandangan mazhab yang tidak dianut sama sekali dinegara yang bersangkutan. Sekedar contoh, Indonesia yang penduduk muslimnya mayoritas bermazhab Syafi'i, bukan berarti format hukum keluarganya sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya, tetapi boleh jadi diambil berdasarkan pandangan mazhab lain, seperti Hanafi, Maliki, Syi'ah dan seluruhnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merupakan tujuan mayoritas dari reinterpretasi hukum keluarga muslim, meskipun tidak menutup kemungkinan di beberapa negara mencakup ketiga tujuan sekaligus.

Dari segi isi, menurut Tahir Mahmood, ada 13 aspek dalam hukum keluarga muslim yang mengalami reinterpretasi, yaitu: batasan umur minimal boleh kawin, pembatasan peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, pembatasan kebolehan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak karena perceraian, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris keluarga dekat, wasiat *wajibah*, dan pengelolaan wakaf.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk meneliti dan membahasnya secara ilmiah dikarenakan relevan dengan reinterpretasi hukum Islam di Indonesia sebagai pandangan ulama kontemporer, khususnya tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diformulasikan dalam disertasi dengan judul: **"REINTERPRETASI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL: STUDI TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA"**.

<sup>13</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, (New Delhi: Times Press, 1987), hlm. 1-11



## B. Permasalahan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- Kumpulan peraturan hukum Islam bidang kekeluargaan tidak merata pada zaman VOC.
- Kitab-kitab rujukan dalam bidang kekeluargaan tidak lagi sesuai dengan persoalan keluarga kontemporer.
- Kitab-kitab rujukan hanya terfokus pada mazhab Syafi'i.
- Terdapat multi tafsir terhadap kitab-kitab rujukan dalam memutuskan suatu perkara.
- Adanya ketidakpastian hukum dalam memutuskan perkara dalam keluarga.
- Terdapat perbedaan putusan dalam memutuskan perkara: pencatatan perkawinan, pembatasan usia kawin dan persetujuan calon mempelai, perceraian di depan pengadilan, poligami, kewarisan, dan wasiat.

### 2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah reinterpretasi hukum keluarga Islam pada pencatatan perkawinan, pembatasan usia kawin dan persetujuan calon mempelai, perceraian di depan pengadilan, poligami, kewarisan, dan wasiat.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Apa bentuk reinterpretasi hukum keluarga Islam di Indonesia?
2. Mengapa reinterpretasi hukum keluarga Islam dalam hukum nasional diperlukan?
3. Bagaimanakah aplikasi KHI dalam putusan-putusan Peradilan Agama (PA), Peradilan Tinggi Agama (PTA) dan Mahkamah Agung pada saat sekarang ini?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menguraikan dan menjelaskan tentang reinterpretasi hukum Islam (fikih) di Indonesia dibanding dengan negara-negara muslim lainnya.
- b. Mengkaji dan membahas secara mendalam dan kritis bentuk reinterpretasi hukum Islam yang merupakan pergeseran dan peralihan konsep fikih tradisional tentang pencatatan perkawinan, pembatasan usia kawin dan persetujuan kedua calon mempelai, izin poligami, perceraian harus di depan sidang pengadilan agama, fitnah sebagai penghalang mewarisi, ahli waris pengganti, wasiat *wajibah*, penghapusan wakaf ahli dan kedudukan nazir sebagai salah satu rukun wakaf ke konsep fikih kontemporer sebagaimana terdapat dalam KHI.
- c. Mengkaji dan membahas aplikasi KHI dalam putusan-putusan Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan tentang hukum Islam dan perkembangannya di Indonesia dan negara-negara muslim lainnya, khususnya dalam hukum



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

keluarga, terutama kemampuannya merespons masalah-masalah kontemporer.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk merumuskan konsep masa depan yang lebih responsif, yang boleh jadi perlu adanya revisi atau dekonstruksi atau bahkan mungkin rekonstruksi terhadap konsep yang sudah dianggap mapan,<sup>14</sup> khususnya menyongsong lahirnya hukum terapan bagi Peradilan Agama.
- c. Persyaratan dalam menyelesaikan studi S-3 pada program pascasarjana UIN SUSKA Riau.

#### D. Telaah Pustaka

Coulson dalam tulisannya *A History of Islamic Law*,<sup>15</sup> menguraikan secara panjang lebar tentang terbentuknya hukum syari'at, pemikiran dan praktik Hukum Islam di masa modern. Ia mengemukakan beberapa kasus tentang Hukum Keluarga dalam fikih-fikih tradisional telah berubah dan bergeser ke fikih kontemporer, baik di Indonesia maupun negara-negara muslim lainnya.

Dikemukakan juga beberapa negara di Afrika Utara sama dengan Indonesia, selain hukum Islam, dipakai dan diberlakukan pula hukum Eropa dan hukum Adat. Perkawinan adalah satu bentuk pembelian, dimana suami

<sup>14</sup> Dekonstruksi dan rekonstruksi beraplikasi pada tipologi reinterpretasi reformistik, dimana dekonstruksi berarti berusaha merubah teori/konsep yang sudah mapan tanpa memberikan tawaran baru, sementara rekonstruksi di samping melakukan apa yang diperbuat dengan dekonstruksi ditambah dengan usaha memberikan teori/konsep alternatif yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Dengan demikian, rekonstruksi adalah usaha membangun kembali teori/konsep lama dengan melihat dan mempertimbangkan kebutuhan dan tuntutan kontemporer. Lihat Asy-Syakanie, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, vol. 1, no. 1, (Juli - Desember, 1998), hlm. 58-95.

<sup>15</sup> Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (London: Edinburgh University Press, 1964), Edis: Indonesia, Hamid Ahmad (penterjemah), *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1987), hlm.182-217



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayar mas kawin kepada bapak pengantin wanita. Bila dalam fikih tradisional perkawinan tidak memerlukan pencatatan, telah berubah dan bergeser dalam *Qanun* Mahkamah Syari'ah tahun 1987 di Mesir, kepada pentingnya suatu pencatatan, terutama bila berurusan dengan pengadilan, baik dalam kasus perceraian maupun pengesahan perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa reinterpretasi hukum Islam di Timur Dekat dan Timur Tengah serta di anak benua India, kecenderungan reinterpretasi dalam Hukum Keluarga selain dalam bentuk administratif (*siyasyah syar'iyyah*), seperti keharusan pencatatan perkawinan; *takhayyar*, berarti melakukan seleksi diantara berbagai mazhab dan pendapat yang ada dalam kitab-kitab fikih dan memilih yang lebih maslahat untuk diterapkan; *talfiq*, yaitu mencampur aduk berbagai pendapat untuk dijadikan menjadi satu keputusan untuk masalah tertentu, juga melakukan ijtihad atau mengkaji ulang dalil-dalil yang digunakan fikih-fikih tradisional, kemudian ditafsirkan sehingga sesuai dan dapat memecahkan masalah-masalah kontemporer.

Abdurrahman, yang membahas tentang pengertian, latar belakang, proses, landasan dan kedudukan, serta isi KHI, secara umum menjelaskan bahwa kerangka sistematika KHI ternyata ada beberapa materi yang dapat digabungkan satu dengan yang lainnya, dan ada pula pengaturan yang seharusnya tidak perlu dimasukkan dalam satu bab tersendiri. Khusus mengenai hukum perkawinan, banyak terjadi duplikasi dengan apa yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan/atau P.P. No. 9 Tahun 1975. Selanjutnya dalam hukum perkawinan, ia hanya membandingkan pasal demi pasal KHI dengan UU No. 1 Tahun 1974 jo. P.P. No. 9/Tahun 1975.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian juga halnya dalam hukum perwakafan, dibandingkan isi KHI dengan P.P. No. 28 Tahun 1977. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Tahun 1996/1997 menerbitkan sebuah buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memuat pasal-pasal KHI dan penjelasannya tanpa membandingkannya dengan UU No. 1 Tahun 1974 jo. P.P. No. 9 Tahun 1975, tetapi menjelaskan secara lengkap sejarah penyusunan KHI di Indonesia, dengan melampirkan nama-nama kitab-kitab fikih sebagai sumber KHI, nama-nama ulama dan cendekiawan sebagai responden serta pelaksana wawancara, sidang-sidang komisi lengkap dengan nama-nama peserta lokakarya pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi.

Tulisan Busthanul Arifin yang berjudul *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, membahas tentang sistem hukum di Indonesia, yaitu Hukum Islam, Hukum Sipil (Barat), dan Hukum Adat. Ketiga sistem hukum ini seolah-olah terjadi konflik, tetapi yang sebenarnya konflik semu, karena ketidakjelasan perbedaan syari'at dengan fikih. Dikemukakan contoh, pada waktu Undang-undang No.1 Tahun 1974 dibicarakan di DPR, muncul debat tentang keharusan suami yang akan menalak istrinya untuk meminta izin dari Pengadilan Agama, tentang kebolehan poligami, tentang harta perkawinan dan tentang dapat atau tidaknya seorang janda memperoleh tunjangan hidup dari bekas suaminya. Dalam hukum sipil, hal-hal tersebut tidak diatur dan karenanya dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam. Untuk solusinya pertama-tama harus menyamakan "bahasa hukum", dengan cara kodifikasi atau kompilasi hukum Islam dan undang-undang Peradilan Agama. Keunikan buku ini,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemukakan kedudukan wanita Islam Indonesia dalam hukum. Kedudukan sebagai istri disebut dalam pasal 2, 3, 79 KHI, seimbang dengan pria; kedudukan istri terhadap harta bersama pasal 85-97 KHI; menetapkan bahwa setengah dari harta bersama adalah milik istri manakala terjadi cerai mati atau cerai hidup. Dasar pemikirannya adalah, kurang tepat mengukur bagian istri dalam hal-hal tersebut dengan nilai saham istri dalam mengumpulkan harta bersama itu. Apalagi kalau saham istri itu dinilai dengan keharusan hasil usaha nyata seperti halnya suami. Padahal fungsi dan kedudukan suami-istri telah ditegaskan seimbang. Sedang dalam kitab-kitab fikih tradisional tidak diakui adanya harta bersama suami-istri, sesuai dengan pemahaman fikih waktu kitab-kitab itu ditulis, dan sesuai pula dengan susunan kemasyarakatan waktu itu; kedudukan istri terhadap anak dikatakan seimbang dengan suami dalam hal hak dan kewajiban orang tua dan anak, kekuasaan itu tetap ada pada suami-istri seandainya perkawinan putus. Berbeda dengan negara-negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, di mana kekuasaan orang tua terhadap anak hanya ada selama perkawinan masih ada; kedudukan wanita dalam proses perceraian dinyatakan ada keseimbangan kedudukan suami-istri sejak awal proses perceraian. Hal ini dirintis yurisprudensi dan diambil alih oleh UU No. 7 Tahun 1989; kedudukan wanita dalam hukum kewarisan dikatakan mendapat banyak sorotan, terutama pada ketentuan *faraid* yang menetapkan bagian anak perempuan dan anak laki-laki adalah satu berbanding dua. Menurutnya pro dan kontra dalam masalah ini adalah akibat politik hukum Belanda yang memberlakukan tiga sistem hukum di Indonesia. Hal yang sama tidak terjadi di Filipina, India dan Pakistan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2001 Drs. Pagar, M.Ag., mahasiswa Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melakukan penelitian dengan judul: *Sisi Keadilan Ahli Waris Pengganti dalam Reinterpretasi Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Kompilasi Hukum Islam Indonesia)*. Penelitian yang dilakukannya hanya terfokus pada sisi keadilan ahli waris pengganti dalam reinterpretasi hukum Islam di Indonesia, sedangkan penelitian yang mengungkapkan bentuk reinterpretasi hukum Islam sebagaimana terdapat dalam KHI di Indonesia secara menyeluruh belum pernah dilakukan.

Selanjutnya karya Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution tentang *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberangkatan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fiqih* yang berkaitan dengan modernisasi hukum Islam di Indonesia yang merupakan negara hukum dan masyarakatnya terus berkembang. Hukum di Indonesia pun terus berkembang mengikuti dinamika dan Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode yaitu: (1) pra penjajahan; (2) masa penjajahan; dan (3) masa kemerdekaan (masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi). Dalam masing-masing periode ini, hukum keluarga Islam mengalami perubahan dan pembaruan. Namun, pada kenyataannya, perubahan dan pembaruan itu tidak selalu bermakna positif bagi masyarakat. Pemberlakuan perubahan dan pembaruan itu memunculkan berbagai macam tanggapan dari masyarakat. Masyarakat terpecah menjadi dua, yaitu: ada masyarakat Muslim yang menerima dan melaksanakan hukum itu, ada pula masyarakat Muslim yang menolak adanya pemberlakuan dan pembaruan tersebut. Selain itu dalam penelitian ini juga dijelaskan komparasi antara penerapan undang-undang secara nasional dengan kitab-kitab klasik.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejauh penelaahan penulis terhadap karya-karya ilmiah dan buku-buku di atas, belum ditemukan penelitian spesifik yang meneliti dan mengkaji secara sistematis-metodologis mengenai reinterpretasi hukum Islam di Indonesia dengan studi kasus Kompilasi Hukum Islam. Apalagi dilihat dari permasalahan yang akan diteliti dan dikaji adalah bentuk reinterpretasi hukum Islam sebagaimana terdapat dalam KHI. Dengan demikian penelitian ini berbeda baik dari segi materi maupun metodologinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah.

## E. Kerangka Teori

Adapun Kerangka teori yang digunakan untuk melihat model atau bentuk perubahan dan pergeseran itu dapat dikemukakan kerangka teori beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain: Noul J. Coulson mengkategorikan kecenderungan reinterpretasi hukum Islam menjadi empat bentuk: (1) dikodifikasikannya (pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam kitab undang-undang) hukum Islam menjadi hukum perundang-undangan negara yang disebutnya sebagai doktrin *siyāsah*, (2) tidak terikatnya umat Islam pada hanya satu mazhab hukum tertentu yang disebutnya doktrin *takhayyar* atau menyeleksi pendapat mana yang lebih dominan dalam masyarakat, (3) perkembangan hukum dalam mengantisipasi perkembangan peristiwa hukum yang timbul, yang disebut dengan doktrin *tatbiq* (penerapan hukum terhadap peristiwa baru), dan (4) perubahan hukum yang baru timbul, yang disebutnya dengan *tajdid* atau neo-ijtihad.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 212-251.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Anderson mencatat empat bentuk (metode) umum<sup>17</sup> yang digunakan sarjana dalam melakukan reinterpretasi hukum keluarga Islam kontemporer, yakni: (1) bersifat administratif (*takhṣiṣ al-qaḍa'* atau *siyāsah al-syar'iyyah*) lewat aturan yang bersifat prosedur sesuai dengan tuntutan zaman modern, tetapi substansinya tetap tidak berubah; (2) *takhayyār* yaitu memilih salah satu dari sekian banyak pandangan mazhab fikih yang ada, bukan saja dari empat atau lain mazhab populer, akan tetapi juga dari mazhab-mazhab lain (termasuk pendapat Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah), dan *talfiq* yaitu menggabungkan pendapat sejumlah mazhab dalam satu masalah tertentu; (3) ijtihad dengan cara kembali menginterpretasikan (reinterpretasi) teks *naṣ*; dan (4) menggunakan alternatif, yaitu menggunakan aturan administrasi, misalnya dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar, tetapi tidak berdasarkan alasan *naṣ*. Dalam banyak hal metode keempat ini mirip dengan metode pertama, karena itu logis ketika disebut Mesir pada prinsipnya mengombinasikan bentuk pertama (*takhṣiṣ al-qaḍa'* atau *siyāsah al-syar'iyyah*) dan keempat (administratif).

Selain itu, reinterpretasi dekat dengan istilah ijtihad. Dalam hal ini, terdapat berbagai macam rumusan yang dikemukakan ulama berkaitan tentang ijtihad. Adapun ijtihad yang dikemukakan oleh Imam al-Syaukani (w. 1255 H) dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul* setelah membandingkannya dengan definisi yang dikemukakan al-Amidi (w. 631 H) dalam kitabnya *al-Ihkam fī Uṣul al-Ahkam*. Definisi ijtihad yang dikemukakan al-Syaukani sebagai berikut:

<sup>17</sup> Disebut bentuk (metode) umum, karena India dan negara-negara yang pernah dipengaruhi hukum Inggris, menurut Anderson menggunakan metode khusus. Anderson, *Law Reform in The Muslim World*, (London: The Athlone Press, 1976), hlm. 74 dst.



بَذَلُ الْوَسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقَةِ الْإِسْتِنْبَاطِ

“Mencurahkan seluruh kemampuan guna menemukan hukum syari’at yang bersifat praktis dengan cara mengambil kesimpulan hukum”

Sedangkan menurut al-Amidi, definisi ijtihad sebagai berikut:

إِسْتِفْرَاحُ الْوَسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يَحْسُ مِنَ النَّفْسِ الْعَجزِ عَنْ غُلْيَةٍ

“Mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencari hukum syari’at yang bersifat zanni, sampai dirinya tidak merasa mampu lagi mencari tambahan kemampuannya tersebut”.

Yusuf al-Qardhawi menjelaskan bahwa dua definisi di atas sebenarnya sudah cukup memadai, meskipun tanpa mengungkapkan kata “إِسْتِفْرَاحُ الْوَسْعِ” (mengerahkan seluruh kemampuan)<sup>18</sup> Sebab menurutnya, seorang mukallaf tidak dibebani kecuali sesuai kemampuannya, seperti diterangkan Allah dalam surat al-Baqarah (2): 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebaskan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir.”

<sup>18</sup> Asni, *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6 No. 1 Januari 2013.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, ijtihad yang diserukan al-Qardhawi memberikan kemudahan dan kehati-hatian kepada orang-orang yang berkompeten (*qualified*) untuk mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum Islam berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.

Selain itu interpretasi juga identik dengan modernisasi hukum keluarga sebagai hukum nasional yakni Hukum keluarga klasik yang terdapat dalam fikih-fikih klasik telah menjadi Hukum Nasional, karena telah dimasukkan ke dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI berdasarkan INPRES No.1 Tahun 1991. Hukum keluarga Islam bisa diterima di Indonesia menjadi Hukum Nasional, karena secara yuridis formal dan secara normatif, telah menjadi hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Hukum keluarga Islam di samping sebagai identitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat dan telah lama berlangsung di Indonesia.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan kerangka teori diatas, pendapat Coulson lebih terperinci dalam menguraikan reinterpretasi hukum Islam. Oleh karena itu teori inilah yang peneliti gunakan untuk mengkaji reinterpretasi atau adopsi hukum keluarga Islam dalam hukum nasional dan relevansinya masa kini.

<sup>19</sup> beberapa daerah di Indonesia, Hukum Islam sudah dipegang teguh dan dijadikan landasan kehidupan masyarakatnya. Misalnya, di Minangkabau tercermin dalam pepatahnya: "Adat dan syara' sanda menyanda, syara' mengato adat memakai". Menurut Hamka pepatah ini menunjukkan bahwa Hukum Adat dengan Hukum Islam sangat erat hubungannya. Dalam masyarakat muslim Gorontalo dapat dilihat dalam ungkapannya: "Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati". Artinya kurang lebih sama dengan ungkapan adat bersendi syara' dan syara' bersendi adat. Ungkapan ini menunjukkan eratnya hubungan Adat dengan Hukum Islam. Daud Ali mengutip ungkapan ini dari A. Gani Abdollah, (1087:89). Selanjutnya berkenaan dengan masalah ini, hubungan adat dan Hukum Islam juga erat di Jawa. Ini mungkin disebabkan karena prinsip rukun dan sinkritisme agama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Jawa, terutama di daerah Pedesaan. Lihat: Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum islam di Indonesia (Jakarta, Grafindo persada, 2005), hlm. 223



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan yang ada kaitannya dengan reinterpretasi hukum keluarga dalam hukum nasional. Proses menghimpun data dapat diperoleh dari berbagai literatur pokok maupun pelengkap. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan literatur bukan hanya buku-buku yang relevan dengan topik penelitian, melainkan juga berupa bahan-bahan dokumen tertulis lainnya, seperti jurnal yang berhubungan dengan penelitian.<sup>20</sup> Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

Analisis data studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana (*discourse analysis*)<sup>21</sup> dan teknik analisis *hermeneutic*,

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hlm.16

<sup>21</sup> Diantara karakteristik analisis wacana adalah pertama, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). Dengan pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi, dan bukan ditempatkan seperti dalam ruang tertutup dan internal. Kedua, mempertimbangkan konteks dari wacana seperti latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana dipandang diproduksi, dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu. Ketiga, menempatkan wacana dalam konteks social tertentu, berarti wacana diproduksi dalam konteks dan tidak dapat dimengerti tanpa menyertakan konteks yang menyertainya. Salah satu aspek penting untuk bisa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

artinya pemikiran-pemikiran tentang reinterpretasi hukum keluarga dalam hukum nasional yang tersebar dalam pemikiran intelektual muslim akan dideskripsikan apa adanya untuk kemudian pemikiran tersebut dianalisis.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

Pengumpulan data penelitian ini dapat dikategorikan pada pengumpulan data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>23</sup> Data primer penelitian ini adalah kitab peraturan perundang-undangan adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 jo. Kep. Meneg. No. 154 Tahun 1991, serta kitab-kitab mazhab yang berhubungan dengan penelitian reinterpretasi hukum keluarga dalam hukum nasional seperti *al-Mabsut*, karya as-Sarakhsi (w. 483 H) dari mazhab Hanafi; *al-Muwatt'at* karya Imam Malik (93-170 H), *al-Mudawwanah al-Kubra*, karya Sahnun at-Tanuki (160-240 H) dari mazhab Maliki; *al-Umm*, karya Imam asy-Syafi'i (150-204 H); *al-Mughni*, karya Ibn Qudamah, dari mazhab Hambali, dan *al-Muhalla*, karya Ibn Hazm (w. 456 H).

Sedangkan sumber hukum sekunder adalah kumpulan peraturan perundang-undangan (*Qanun*) dari berbagai negara muslim, tulisan-tulisan para pakar yang meneliti masalah-masalah yang sama atau hampir sama,

dimengerti teks adalah menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Bahasan elaboratif periksa Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 8-11

<sup>22</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 195.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, *Ibid*, hlm.116





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kumpulan-kumpulan fatwa dan kumpulan putusan-putusan Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya, penulisan disertasi ini menggunakan metode pengumpulan data secara literatur, yaitu dengan melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran tentang hukum keluarga yang telah ditentukan dalam penelitian.
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan subyek penelitian. Di samping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka yang menunjang sumber data primer. Pemilihan sumber data primer dan data sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.

<sup>24</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), cet. Ke-3, hlm. 223-225

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang dipandang pokok sehingga dapat digunakan, dan mana yang dipandang penting dan menunjang penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data dan Penulisan

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis kumpulkan, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*Content Analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi dan budaya. Metode ini adalah salah satu alternatif untuk melengkapi dan menutupi kelemahan dari analisis isi kuantitatif yang selama ini banyak digunakan oleh para penelitian. Jika pada analisis kuantitatif, pertanyaan lebih ditekankan untuk menjawab “apa” (*what*) dari pesan atau teks komunikasi, pada analisis wacana lebih difokuskan oleh untuk melihat “bagaimana” (*how*), yaitu bagaimana isi teks berita dan juga bagaimana pesan disampaikan. Beberapa perbedaan mendasar antara analisis wacana dengan analisis isi yang bersifat kuantitatif adalah analisis wacana lebih bersifat kualitatif daripada yang umum dilakukan dalam analisis isi kuantitatif karena analisis wacana lebih menekankan pada pemaknaan teks daripada penjumlahan unit kategori, seperti dalam analisis isi. Analisis isi kuantitatif digunakan untuk membedah muatan teks komunikasi yang bersifat manifest (nyata), sedangkan analisis wacana justru memfokuskan pada pesan yang bersifat laten (tersembunyi). Analisis isi kuantitatif hanya dapat mempertimbangkan “apa yang dikatakan”, tetapi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tidak dapat menyelidiki bagaimana ia dikatakan (*how*). Model analisis wacana yang diperkenalkan oleh *Van Dijk* sering kali disebut sebagai “kognisi sosial”, yaitu: suatu pendekatan yang diadopsi dari bidang psikologi sosial.

Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam tulisan ini ada beberapa hal di antaranya:

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan suatu data yang bersifat umum, kemudian diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu pengambilan fakta-fakta dan pengalaman empiris, kemudian digeneralisasikan menjadi suatu pernyataan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, pembahasan dan penulisan hasil penelitian ini disajikan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Pembahasan tentang Reinterpretasi Hukum Islam di Indonesia meliputi penjelasan tentang Hukum Islam dan Pengembangannya, Konsep Reinterpretasi Hukum Islam, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Reinterpretasi: Meluruskan Konsep Hukum Islam, dan Peranan Ijtihad dalam Reinterpretasi Hukum Islam.

Bab III: Pembahasan tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, meliputi penjelasan tentang: Pengertian Kompilasi Hukum Islam

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KHI), Proses Pembentukan KHI, Pokok-pokok Isi (materi) KHI Dalam Bentuk Garis-garis Besar, Landasan Hukum Kompilasi Hukum Islam, Tujuan dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam dan Kedudukan KHI Dalam Sistem Hukum Nasional.

Bab IV: Membahas tentang bentuk Reinterpretasi Hukum Keluarga Islam sebagaimana terdapat dalam KHI, yang memuat uraian tentang Reinterpretasi Hukum Islam Suatu Keniscayaan, Reinterpretasi Hukum Keluarga Dalam Hukum Nasional seperti pencatatan perkawinan, pembatasan usia kawin, izin poligami, perceraian harus di depan sidang pengadilan agama. Selanjutnya diuraikan pula tentang bentuk reinterpretasi hukum kewarisan sebagaimana terdapat dalam KHI, seperti fitnah menjadi salah satu penghalang mewarisi, ahli waris pengganti berkenaan dengan pengertiannya, dalam pandangan ulama dan dalam KHI. Selanjutnya diuraikan pula tentang wasiat *wajibah*, mencakup pengertiannya, pandangan ahli hukum Islam terhadap wasiat *wajibah*, wasiat *wajibah* dalam berbagai perundang-undangan, seperti Mesir, KHI di Indonesia. Terakhir, membahas tentang penerapan KHI dalam putusan-putusan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama.

Bab V : Adalah bab penutup, dimana ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Bab ini pun dilengkapi dengan beberapa saran yang dianggap penting.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### REINTERPRETASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

#### A. Hukum Islam dan Pengembangannya

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan paduan kata (kata majemuk) yang terdiri dari kata “hukum” dan “Islam”. Kedua kata itu secara terpisah, menurut Amir Syarifuddin, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Quran, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak ditemukan dalam al-Quran, juga tidak ditemukan dalam literatur yang berbahasa Arab. Karena itu, kita tidak akan menemukan artinya secara definitif.<sup>25</sup>

Pendapat senada dikemukakan Fathurrahman Jamil yang mengatakan bahwa kata “hukum Islam” tidak ditemukan sama sekali dalam al-Quran dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Quran adalah kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari istilah ‘*Islamic Law*’ dari literatur Barat.<sup>26</sup>

Hukum yaitu “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-1, jilid I, hlm. 4.

<sup>26</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977), hlm. 11.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya”.<sup>27</sup> Bila kata “hukum” menurut definisi di atas dihubungkan kepada “Islam” atau “Syara”, maka “Hukum Islam” akan berarti: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>28</sup>

Kata “seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata “yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, atau yang populer dengan sebutan “syari’ah”.

Kata “tentang tingkah laku manusia mukallaf” mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan Sunnah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam.

Bila artian sederhana tentang “hukum Islam” itu dihubungkan kepada pengertian “fiqh”, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah bernama “fiqh” dalam literatur Islam yang berbahasa Arab.

Menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy (w.1975), hukum Islam--yang sebenarnya tidak lain daripada fiqh Islam atau syari’at Islam—yaitu koleksi

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 5.

<sup>28</sup> *Ibid*.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Istilah Hukum Islam—kata Hasbi—walaupun berlafaz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia, sebagai terjemahan dari fiqh Islam, atau syari'at Islam, yang bersumber kepada al-Quran, al-Sunnah dan Ijma' para sahabat dan tabi'in.<sup>29</sup>

Menurut Mohammad Daud Ali: Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>30</sup> Lebih lanjut ia mengatakan: Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab disebut *hukm*, jamaknya *ahkâm*.<sup>31</sup>

Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia, baik di bidang ibadah maupun di lapangan mu'amalah. Kelima jenis kaidah tersebut disebut *al-ahkâm al-khamsah* atau penggolongan hukum yang

<sup>29</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), cet. ke-3, hlm. 44.

<sup>30</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1994), cet. ke-4, hlm. 38.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 39.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

lima, yaitu *wajib*, *mandûb* (*sunnat*), *ḥarâm*, *makruh*, dan *mubah* (*ibahah*) atau *jà'iz*.

Penggolongan hukum yang lima atau yang disebut juga lima katagori hukum atau lima jenis hukum ini di dalam kepustakaan hukum disebut juga *hukum taklifi*, yakni norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, yang disebut *jà'iz*, *mubah* atau *ibahah*. Mungkin juga *hukum taklifi* itu mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya bagi pelaku, yang disebut *sunnat*. Mungkin juga mengandung kaidah yang seyogyanya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan orang yang melakukannya (*makruh*). Mungkin juga mengandung perintah yang wajib dilakukan, yang disebut *farḍu* atau *wajib*, dan mengandung larangan untuk dilakukan, yang disebut *ḥarâm*.<sup>32</sup>

Masing-masing penggolongan, penjenisan dan kategori hukum ini dibagi lagi oleh para ahli hukum Islam ke dalam beberapa bagian yang lebih rinci dengan tolok ukur tertentu yang dapat dipelajari dalam kitab-kitab ilmu usul fikih.

## 2. Tujuan Hukum Islam

Kalau kita pelajari dengan seksama ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya yang terdapat dalam al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Secara umum sering

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 40. Lihat pula Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ilm Usûl*, h. 105; Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, h.28; Wahbah al-Zuhaili, *Usûl 1*, hlm. 42.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>33</sup>

Abd al-Wahhab Khallaf (w.1956) merumuskan: Tujuan umum syar'i mensyari'atkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, mengambil manfaat dan menolak mudarat dari mereka. Karena kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini terdiri dari beberapa hal yang bersifat *ḍaruriyah* (kebutuhan pokok), *ḥājiyah* (kebutuhan sekunder) dan *taḥsīniyah* (kebutuhan pelengkap), dan apabila ketiga hal tersebut terpenuhi maka terwujudlah kemaslahatan mereka.<sup>34</sup>

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam itu adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.

Adapun yang dimaksud dengan *al-umur al-ḍaruriyah* (hal-hal yang bersifat darurat, primer) yaitu sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu. Apabila tanpa adanya sesuatu yang bersifat *ḍaruri* itu maka akan terganggu keharmonisan hidup manusia dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan mereka serta terjadilah kehancuran dan kerusakan bagi mereka. Hal-hal yang bersifat daruri (primer) bagi manusia

<sup>33</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, hlm. 53.

<sup>34</sup> Abd Al-Wahhab Khallaf, *Uṣul al-Fiqh*, h.198. Lihat pula Mukhtar Yahya dan Fatherrahman, *Dasar-Dasar*, hlm. 333; M. Hasbi Ash -Shiddieqy, *Falsafah*, hlm. 186.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pengertian ini berpangkal kepada pemeliharaan lima perkara: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Jadi, memelihara salah satu di antara lima perkara itu merupakan kepentingan yang bersifat daruri (primer) bagi manusia.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan *al-umûr al-ḥājiyah* (hal-hal yang bersifat skunder) yaitu sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk membuat ringan dan lapang, serta untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul, dan kepayahan-kepayahan dalam mengarungi kehidupan. Artinya, bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya membuat kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam *al-umûr al-ḥājiyah* (hal-hal yang bersifat skunder) berpangkal kepada tujuan menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan manusia dalam bermuamalat dan tukar-menukar manfaat.

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-umûr al-taḥsiniyah* yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta berperilaku menurut jalan yang lurus. Artinya, apabila *al-umûr al-taḥsiniyah* ini tidak dapat dipenuhi, maka kehidupan manusia tidaklah sekacau seperti ketika tidak adanya hal-hal yang bersifat *ḍaruriyah*. Juga tidak ditimpa kepayahan seperti ketika tidak adanya hal-hal yang bersifat *ḥājiyah*. Hanya saja kehidupan manusia bertentangan dengan akal sehat dan naluri yang suci. Hal-hal yang bersifat membuat indah manusia (*taḥsini*) dalam pengertian

<sup>35</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Uṣul al-Fiqh*, h. 199. Lihat pula Abu Ishaq Ibrahim Al-Syatibî, *Al-Muwāfaqāt fî Uṣul al-Ahkâm*, (Beirut: Dâral-Fikr al-Mu'âsir, 2001), juz 2, hlm. 4; Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul*, hlm. 1048-49; Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar...*, hlm. 333-334.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini adalah berpangkal kepada akhlak mulia, tradisi yang baik dan segala tujuan prikehidupan manusia menurut jalan yang paling baik.<sup>36</sup>

Adapun hukum-hukum untuk memelihara *al-umûr al-ḍaruriyah*, *al-umûr al-ḥajiyah* dan *al-taḥsiniyah* adalah sebagai berikut:

a. Hukum-hukum untuk Memelihara *al-umûr al-ḍaruriyah*.

*Al-umûr al-ḍaruriyah* (hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia), seperti telah disebutkan di atas, ada lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Islam telah mensyari'atkan hukum-hukum bagi setiap urusan *ḍaruri* yang lima itu untuk menjamin eksistensi dan pemeliharaannya, yang disebut dengan hukum *ḍaruri*. Dengan dua jaminan hukum itu terpenuhilah kebutuhan primer manusia. Untuk menegakkan agama, Islam mewajibkan iman dan mensyari'atkan hukum-hukum yang berkaiatan dengan rukum Islam, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Untuk mempertahankan dan memelihara agama, Islam mensyari'atkan hukum-hukum yang berhubungan dengan jihad, hukuman bagi orang murtad, orang yang membuat bid'ah dan melarang *mufti* gila yang menghalalkan yang haram (untuk memberikan fatwa).

Untuk mewujudkan kelangsungan jiwa, Islam mensyari'atkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan sesempurna-sempurnanya. Untuk memelihara jiwa dan menjamin

<sup>36</sup> Abd Al-Wahhab Khallaf, *Usûl al-Fiqh*, hlm. 200; Lihat pula Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât*, hlm. 5; Wahbah al-Zuhaili, *Usûl..*, hlm. 1051.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kelangsungan hidupnya, Islam mensyari'atkan hukum dan mewajibkan manusia untuk memperoleh sesuatu yang dapat menegakkan jiwa itu, berupa makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal sekedar cukup untuk memelihara diri dari kebinasaan. Begitu pula disyari'atkan hukum *qīṣaṣ*, *diyat* dan *kifārat* atas kejahatan terhadap badan dan jiwa; diharamkan membunuh diri dan diwajibkan menolak bahaya yang mengancam jiwa.

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan setiap minuman yang memabukkan, serta mengancam peminumnya dengan hukuman. Untuk memelihara *al-'irḍ* (kehormatan), Islam mensyariatkan had (hukuman badan) atas orang yang berzina dan orang menuduh orang-orang baik berbuat zina. Untuk memperoleh harta disyari'atkan usaha-usaha yang halal, seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian. Untuk memelihara harta disyari'atkan haram mencuri dan hukuman atas pencuri, haram menipu, menjalankan riba, merusakkan harta orang lain dan sebagainya.<sup>37</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam mensyari'atkan beberapa hukum dalam berbagai bab ibadah, mu'amalah, munakahah, dan *Jinayat* (pidana) dengan tujuan menjamin keperluan pokok manusia, dengan cara mewujudkan, memelihara dan menjaganya.

<sup>37</sup> Lihat Abd Al-Wahhab Khallaf, *Uṣul al-Fiqh*, hlm. 2001. Lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *Uṣul*, hlm.1049-1050.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hukum-hukum untuk Mewujudkan *al-umûr al-ḥājiyah* (hal-hal yang menjadi kebutuhan skunder manusia).

Hal-hal yang menjadi kebutuhan skunder manusia, seperti telah dikemukakan diatas, kembali kepada prinsip-prinsip: menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan. Atas dasar prinsip-prinsip itu, Islam telah mensyari'atkan sejumlah hukum dalam berbagai bab ibadah, mu'amalah dan uqûbah (pidana), yang bertujuan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban serta memberi kemudahan kepada manusia.

Dalam lapangan ibadah misalnya, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukḥṣah*, yaitu keringanan bagi *mukallaḥ*, seperti: boleh berbuka puasa bagi orang sakit atau dalam perjalanan, mengqasar salat yang empat rakaat bagi musafir (orang yang dalam perjalanan), salat sambil duduk bagi orang tidak sanggup berdiri dan sebagainya.

Dalam lapangan muamalat dibolehkan akad-akad yang dibutuhkan manusia, meskipun menyimpang dari *qiyās*, seperti jual beli salam (jual beli pesanan), jual beli barang yang belum dibikin dan sebagainya. Begitu juga disyariatkan *talak* untuk melepaskan diri dari kehidupan suami istri bila keadaan membutuhkan.

Dalam masalah hukuman misalnya, dijadikan *diyat* atas keluarga pembunuh yang membunuh secara tidak sengaja, untuk meringankan baginya. Begitu pula wali si terbunuh diberi hak untuk memaafkan *qīṣās* atas pembunuh, *ḥad* (hukuman badan) tidak dikenakan kalau ada keragu-raguan dalam pembuktian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Hukum-hukum untuk Mewujudkan Kebaikan bagi Manusia.

Hal-hal yang merupakan kebaikan (*al-umûr al-tahsiniyah*) bagi manusia pada hakikatnya kembali kepada prinsip: Memperbaiki keadaan mereka menjadi sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak mulia.

Dalam bidang ibadah misalnya, disyari'atkan suci badan, pakaian dan tempat, menutup aurat, menjauhkan diri dari najis, berpakaian bersih dan bagus ketika pergi ke mesjid. Begitu pula disyari'atkan amalan-amalan sunnat berupa sedekah, yang kesemuanya itu untuk mebiasakan manusia dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik.

Dalam bidang muamalat misalnya, diharamkan mengicuh, menipu, boros, kikir, menjual dan membeli atas penjualan dan pembelian orang lain dan sebagainya, yang bertujuan menjadikan hubungan manusia dengan manusia berjalan dengan sebaik-baiknya.

Mengenai *'uqubât* (hukuman), dalam peperangan diharamkan membunuh pendeta, anak-anak dan wanita, membalas dendam dan sebagainya. Tentang akhlak, Islam mendidik pribadi dan masyarakat dengan akhlak-akhlak yang utama dan memperlakukan manusia dengan jalan yang setepat-tepatnya.<sup>38</sup>

## B. Konsep Reinterpretasi Hukum Islam

Reinterpretasi berasal dari dua kata yaitu *re* dan *interpretasi*. *Re* artinya kembali, mengulang.<sup>39</sup> Maksudnya adalah mengulang kembali apa yang sudah ada. Sedangkan *interpretasi* artinya penafsiran, yang dimaksud disini adalah

<sup>38</sup> Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ibid*, hlm. 203-204. Lihat pula Wahbah al-Zuhaili, *Uşul...*, hlm. 1051-52.

<sup>39</sup> *Kamus Bahasa Indonesia edisi kelima*, hlm. 512.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses penafsiran melalui lisan atau tulisan antara dua atau lebih pemikiran yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan (dikenal sebagai interpretasi simultan) atau berurutan (dikenal sebagai interpretasi berurutan). Istilah *interpretasi* sendiri dapat merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasilnya. Suatu *interpretasi* dapat merupakan bagian dari suatu presentasi atau penggambaran informasi yang diubah untuk menyesuaikan dengan suatu kumpulan simbol spesifik. Informasi itu dapat berupa lisan, tulisan, atau berbagai bentuk bahasa lainnya. Makna yang kompleks dapat timbul sewaktu penafsir baik secara sadar ataupun tidak melakukan rujukan silang terhadap suatu objek dengan menempatkannya pada kerangka pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas.<sup>40</sup> Dalam bahasa belanda *Interpretasi* disebut juga dengan *interpretatie* yang artinya penafsiran baik sistematis maupun restriktif.<sup>41</sup> Penafsiran sistematis adalah: Penafsiran yang tidak boleh keluar dari perundang-undangan dan bertautan antara yang satu dengan yang lainnya, sedangkan penafsiran restriktif adalah: Penafsiran dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang ada dalam perundang-undangan. Di dalam penelitian ini dipakai kedua-duanya. Menurut penulis dapat disimpulkan reinterpretasi disini adalah menafsirkan kembali apa yang sudah ada kemudian di susun menjadi sebuah kodifikasi dengan sungguh-sungguh untuk lebih sempurna menurut orang-orang yang menfasirkannya.

Para pakar hukum Islam Indonesia sering melemparkan gagasan tentang reinterpretasi hukum Islam dengan menggunakan berbagai istilah,

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Fauzan, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, edisi pertama, (Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017), Cet I, hlm. 372





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya, *restrukturisasi*, *redefinisi*, *reformulasi*, *reaktualisasi*, maupun *modernisasi*. Beberapa istilah diatas tidak jauh berbeda artinya dengan *interpretasi*. Misalnya saja *restrukturisasi* berarti menyusun kembali apa yang sudah ada. *Redefenisi* artinya kembali mengartikan yang sebelumnya.<sup>42</sup> Dalam tulisan ini peneliti menggunakan interpretasi dikarenakan istilah ini lebih luas makna dan artinya sesuai dengan yang dijelaskan di atas. Dalam interpretasi, seorang ahli tidak perlu terkekang oleh batas-batas apa yang sudah ada, sebab sebenarnya seorang ahli akan merasa bahwa hukum melingkupi segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk interpretasi penting memahami kompleksitas sesuatu, maka mau tidak mau seseorang memerlukan pendekatan multidimensi.

Dalam hal ini *interpretasi* sangat membutuhkan berbagai ilmu bantu dengan tujuan mempertajam analisis sehingga diharapkan dapat diperoleh generalisasi ke tingkat yang lebih sempurna. Perlu pula dikemukakan di sini, bahwa interpretasi tidak ada yang bersifat final. Sehingga, setiap generasi berhak mengerangkakan interpretasinya sendiri. Karena dengan interpretasi kita dapat melihat garis yang bisa membawa kemajuan menuju solusi atas apa yang kita rasakan sekarang dan masa depan. Jika kebutuhan ini tidak kita jawab secara rasional dan jujur, maka kita akan kembali jatuh pada interpretasi historis yang tak lebih dari keputusan masa lalu saja.

Di sini dapat dipahami bahwa reinterpretasi akan menghasilkan pembaharuan mendekati kesempurnaan sesuai dengan masa, kondisi, dan waktu yang ada. Sehingga sering dikaitkan antara interperetasi dengan

<sup>42</sup> Kamus Bahasa Indonesia Edisi Kelima, *Ibid*.



pembaharuan yang berasal dari kata “baru” atau “baharu”<sup>43</sup> yang mendapat penambahan awalan “pe” dan akhiran “an”. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pembaharuan adalah:

1. yang sebelumnya tidak ada, atau belum pernah dilihat (diketahui, didengar);
2. mula-mula atau pertama-tama dilihat (didengar, dan diketahui);
3. pada masa (zaman) akhir-akhir ini; modern.<sup>44</sup>

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata “pembaharuan” silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, dan interpretasi. Dalam istilah hukum Islam disebut dengan *tarjih*, *işlah* dan *tajdid*. Diantara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata reformasi, *işlah*, dan *tajdid*.

Reformasi berasal dari bahasa Inggris *reformation* yang berarti membentuk atau menyusun kembali.<sup>45</sup> Reformasi sama artinya dengan memperbaharui, asal kata “baharu” atau “baru” dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbaharui, proses

<sup>43</sup> Penambahan huruf “m” pada kata “pembaharuan” disebut dengan *alomorf*. *Alomorf* adalah variasi bentuk dari suatu *morfem* disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. *Morfem* adalah kesatuan yang ikut serta dalam pembentukan kata yang dapat dibedakan artinya. Untuk penambahan *alomorf* “m” ini dapat dijadikan pedoman sebagai berikut; setiap kata kerja yang apabila dibentuk dengan awalan “me” akan menjadi “mem”, maka secara pasti pembentukan kata bendanya menjadi “pem”. Contoh: bina, membina, pembina; buru, memburu, pemburu; baharu, membaharui, pembaharuan. J.S. Badudu, *Pelik – Pelik Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Prima, 1985), cet. ke 32, hlm. 82. Lihat juga Gorys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Nusa Indah, 1979), cet. ke 8, hlm. 52. Untuk seterusnya secara umum digunakan kata “baru” dan “baharu” dalam arti yang sama.

<sup>44</sup> W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1954), cet. ke 8, hlm. 93.

<sup>45</sup> John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hlm. 473. Lihat juga Peter Collin, *Dictionary of Law*, (Peter Collin Publishing, Third Edition, 2000), hlm. 311.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan adat istiadat atau cara hidup yang baru.<sup>46</sup>

*Tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan,<sup>47</sup> sedangkan kata *işlah* diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki.<sup>48</sup> Kata *tajdid* merupakan bentuk masdar dari kata *jaddada-yujaddidu*, yang artinya “memperbaharui” dan *tajdid* artinya “pembaharuan”. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa *tajdid* ‘*aks alqadim*’ (*tajdid* adalah kebalikan *qadim*). *Qadim* artinya “lama”. Kata *jadid* mempunyai arti “pembaharuan”, berarti menjadikan sesuatu menjadi baru. Sedangkan kata *aşlih* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *aşlah-a-yaşlihu* yang artinya memperbaiki atau perbaikan. Kata *aşlih* berasal dari *şulāṣi mujarad*, *şalaha-yaşlihu-şalhan* yang artinya baik, layak, patut dan memberikan faedah atau manfaat. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam, kata *işlah* dan *tajdid* sering dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama yaitu “pembaharuan”.<sup>49</sup>

Bustami Muhammad Saad,<sup>50</sup> mengemukakan bahwa kata *tajdid* lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaharuan hukum, sebab kata *tajdid* mempunyai arti pembaharuan, sedangkan kata *işlah* meskipun sering digunakan secara berdampingan, tetapi lebih berat pengertiannya kepada pemurnian. Pendapat ini sejalan dengan pendapat para *muhaddisin* dan

<sup>46</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, cetakan ketiga, 1990), hlm. 82.

<sup>47</sup> Lois Ma'luf, *Al-Munjid al-Abjad*, (Beirut, Libanon: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 229.

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 154- 155.

<sup>50</sup> Bustami Muhammad Saad, *Mufhum Tajdid al-Din ad-Da'wah*, (Kuwait: t.tp., t.p., t.th.), hlm. 26-27.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komentatornya seperti *Ibnu al-Asr*, *an-Nawawi* dan *as-Suyuti* yang banyak mempergunakan kata *tajdid* ketika mereka membicarakan pembaharuan hukum dengan arti “pembaharuan”. Karena penggunaan kata *tajdid* dan *işlah* tanpa dibedakan artinya yaitu pembaharuan, maka tokoh semacam Ibnu Taimiyyah lebih tepat disebut sebagai *muşlih (işlah)*, sebab ia tokoh yang berusaha keras memurnikan ajaran Islam, sedangkan Muhammad Abduh lebih tepat disebut sebagai *mujaddid* sebab ia tokoh pembaharuan dalam agama Islam.

Perkataan *tajdid* dalam pembaharuan hukum Islam mempunyai dua makna: pertama, apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaharuan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. Kedua, pembaharuan bermakna modernisasi, apabila *tajdid* itu sasarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang berubah-ubah, seperti metode, sistem, teknik, strategi, dan lainnya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang, dan waktu.<sup>51</sup>

Meskipun *tajdid* dalam rumusan ini tidak terlalu jelas penjelasannya, tetapi secara umum *tajdid* itu dapat diartikan sebagai reformasi, purifikasi, modernisasi atau pembaharuan. Kata *tajdid* yang diartikan sebagai “pembaharuan” lebih tepat dipergunakan daripada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam agama Islam juga lebih luas cakupannya dan lebih komprehensif.

<sup>51</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 6.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Menurut Masjfuk Zuhdi<sup>52</sup> kata *tajdid* lebih komprehensif pengertiannya sebab dalam kata *tajdid* terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu:

1. *al-I'adah*, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu al-Quran dan al-Hadis.
2. *al-Ibanah*, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk *bid'ah* dan *khurafat* serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.
3. *al-Ihya*, artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.

Menurut Yusuf Qardhawi<sup>53</sup> yang dimaksud dengan *tajdid* adalah berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal itu dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal kegiatan yang retak sehingga kembali mendekat pada bentuknya yang pertama. Dengan kata lain, *tajdid* bukan merombak bentuk yang pertama atau menggantinya dengan yang baru. Sebagai contoh konkret, bila ingin mentajdid (memperbaharui) suatu bangunan tua, berarti kita membiarkan substansi, ciri-ciri, bentukan dan karakteristik bangunan itu. Kita hanya memperbaiki yang rusak, menghiasinya kembali, menambal yang kurang, memperindah bagian yang sudah lumat. Jadi,

<sup>52</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*, (Surabaya: PTA Surabaya, 1995), hlm. 2-3.

<sup>53</sup> Yusuf Qardhawi, *Min Ajli Sahwatin Rasyidah Tujaddidud-din*, Terjemahan Nabhani Idris, *Fiqh Tajdid dan Sahwah Islamiah*, (Jakarta: Islamuna Pers, 1997), hlm. 28-29.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaharui bangunan bukan menghancurkannya lantas diganti dengan bangunan yang baru yang berbeda. Demikian pula *tajdid ad-din* bukan bermakna mengubah *din*, tapi mengembalikannya menjadi seperti dalam era Rasulullah ﷺ, para sahabat dan tabi'in.

Secara sederhana, gerakan pembaharuan (*tajdid, renewal*) dalam Islam dapat diartikan sebagai upaya, baik secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan (*established*) kepada pemahaman dan pengamalan baru. Lazimnya, menurut Azyumardi Azra, pembaharuan bertitik tolak dari asumsi atau pandangan –yang jelas dipengaruhi situasi dan lingkungan sosial– bahwa Islam sebagai realitas dan lingkungan sosial tertentu tersebut tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari apa yang dipandang sebagai Islam yang sebenarnya. Islam yang lebih sesuai dengan Islam ideal, sesuai dengan cara pandang, pendekatan, latar belakang sosio-kultural dan keagamaan individu, dan kelompok pembaharu yang bersangkutan. Karena alasan-alasan inilah, muncul berbagai tipologi gerakan pembaharuan Islam. Misalnya Puritanisme, Neo-Sufisme, Fundamentalisme, Sekularisme, atau Westernisme.<sup>54</sup>

Berbeda dengan itu, Harun Nasution (w.2000) lebih menekankan bahwa pembaharuan diperlukan untuk menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>55</sup> Memang dalam

<sup>54</sup> Azyumardi Azra, “Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia Neo-Sufisme Abad Ke-11/12 H.”, dalam *Tasawuf*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.th.), hlm. 179.

<sup>55</sup> Harun Nasution mengatakan bahwa “Pembaharuan adalah pikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merubah faham-faham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataannya perkembangan sains dan teknologi modern membawa perubahan nilai, sistem dan sekaligus problema – terutama dalam aspek hukum – yang sudah tentu memerlukan jawaban dan penyelesaian. Karena dengan jalan pembaharuan inilah tokoh-tokoh Islam modern berharap akan dapat melepaskan umat Islam dari suasana keterbelakangan untuk selanjutnya dibawa kepada kemajuan.

Nurcholis Madjid (w.2005) menggunakan istilah modernisasi untuk pembaharuan dengan pengertian yang identik, atau hampir identik, dengan pengertian rasionalisasi. Yaitu: “Proses perombakan pola berfikir dan tata kerja lama yang tidak (rasional), dan menggantinya dengan pola berfikir dan tata kerja baru yang akliah. Kegunaannya ialah untuk memperoleh daya guna dan efisiensi yang maksimal”.<sup>56</sup>

Istilah pembaharuan yang dikaitkan dengan agama Islam sudah biasa digunakan penulis-penulis Indonesia, baik pembaharuan pemikiran Islam maupun pembaharuan hukum Islam, seperti dijumpai dalam tulisan-tulisan Harun Nasution, Amir Syarifuddin, Ibrahim Hosen, Nurcholis Madjid, dan lain-lain. Selain istilah pembaharuan dalam bahasa Indonesia, juga dalam berbagai tulisan kita temukan istilah lain sebagai konversi dari makna pembaharuan. Misalnya Harun Nasution dan Fazlurrahman memadankannya dengan *modernisation* dalam Bahasa Inggris, dan *tajdid* dalam Bahasa Arab. Berbeda dengan Chandra Muzaffar yang menggunakan istilah *Reformation*

disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern”. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), cet. Ke-1, hlm. 9. Juga Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: UI-Press, 1986), cet. ke 6, jilid II, hlm. 93.

<sup>56</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1988), cet. ke 2 hlm. 172.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Reformasi) dan *Reserrence* (kebangkitan) sebagai padanan pembaharuan dalam bahasa Inggris.<sup>57</sup> Dan Abul A'la Maududi (w.1979) memadankan makna pembaharuan dengan *innovation* dalam bahasa Inggris, dan *tajdid* dalam Bahasa Arab.<sup>58</sup> Khusus dalam konteks pembicaraan hukum Islam, Munawir Sjadzali menggunakannya dengan istilah Reaktualisasi Ajaran Islam,<sup>59</sup> dan Amir Syarifuddin menggunakan istilah Reformulasi Fikih (hukum Islam).<sup>60</sup>

Bervariasinya istilah yang digunakan untuk maksud kata pembaharuan tersebut menunjukkan ada perbedaan bentuk-bentuk pembaharuan itu sendiri. Seperti terlihat dari penjelasan Azyumardi Azra, lebih menekankan kepada ajaran Islam yang sebenarnya, Islam yang ideal, yang terlepas dari pengaruh situasi dan lingkungan yang lama kepada situasi dan lingkungan yang baru. Sementara itu Harun Nasution lebih menekankan adanya penyesuaian terhadap pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lain halnya dengan Nurcholis Madjid yang lebih menekankan kepada rasionalisasi ajaran itu sendiri.

Beranjak dari berbagai pandangan tentang *tajdid* atau pembaruan diatas, maka penulis merumuskan pengertian pembaharuan yang dimaksudkan dalam disertasi ini adalah usaha untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak dikenal sebelumnya, dengan indikasi yang lebih rasional, sehingga lebih

<sup>57</sup> Chandra Muzaffar, "Kebangkitan Islam: Suatu Pandangan Global", dalam Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 70 -72.

<sup>58</sup> Abul A'la Maududi, "A Short History of the Revivalist Movenment in Islam", terjemahan Hamid L. A. Basalamah, *Gerakan Kebangkitan Islam*, (Bandung: Risalah, 1984), cet. ke 1, hlm. 41.

<sup>59</sup> Munawir Sjadzali, "Reaktualisasi Ajaran Islam", dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (Penyunting), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), cet. ke 1, hlm. 1 –

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), cet. ke-1, hlm. 89-90.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik dengan cara mengkonversi yang lama untuk dapat diaktualkan, ataupun penciptaan murni yang sifatnya baru sama sekali, tentunya dengan berbagai bentuk atau model pembaharuan yang dikemukakan para ahli.

Pembaharuan Hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah *istinbat* hukum yang dibenarkan, sehingga menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, tidak ketinggalan zaman. Inilah yang dalam istilah usul fikih dikenal dengan *ijtihad*. Pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki otoritas dan kompetensi dalam pengembangan hukum Islam sebagai mujtahid atau tidak dilakukan berdasarkan aturan main atau tidak dilakukan berdasarkan kaidah yang benar, hal itu tidak disebut sebagai pembaharuan hukum Islam.

Penggunaan kata *tajdid* dalam membicarakan pembaharuan hukum Islam didasarkan kepada al-Quran; antara lain Q.S. Ibrahim (14): 19:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَشَاءُ يُدْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

*Artinya:* "Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mengganti(mu) dengan makhluk yang baru".

Sejak awal abad ke-15 H, *tajdid* (pembaharuan) telah dilaksanakan dalam bidang intelektualitas dan peradaban yang luas dan dalam. Suatu *tajdid*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat kedua bentuk ijtihad, yakni ijtihad *intiqā'i* (dengan mentarjih pendapat melalui penelitian dan penyeleksian) dan ijtihad *insyā'i* (dengan cara menetapkan hukum perkara baru). Yaitu, ijtihad untuk mendiagnosa dan menyebutkan beragam permasalahan zaman modern dengan obat Islam itu sendiri, bukan menyembuhkan dan resep buatan Barat maupun Timur.<sup>61</sup>

Berkaitan dengan ruang lingkup *tajdid* para ahli usul fikih menetapkan hukum yang menjadi wilayah ijtihad dan yang bukan menjadi wilayah ijtihad. Secara garis besar, wilayah ijtihad meliputi dua hal, yaitu hukum-hukum yang tidak ada petunjuk *naş* sama sekali dan hukum-hukum yang ditunjuk oleh *naş* yang *ḡanniy*. Sedangkan hukum-hukum yang telah ditunjuk oleh *naş qat'i* dalalahnya maka tidak ada sedikitpun ruang gerak untuk ijtihad. Dorongan berijtihad terhadap hukum yang ditunjuk *naş qat'i* tersebut dikristalkan menjadi sebuah kaidah "*la mushaga lil ijtihad fi ma fi naş sarih qat'i*" (tidak ada peluang untuk berijtihad dalam hukum-hukum yang telah ada *naş*-nya secara jelas dan *qat'i*).<sup>62</sup>

Untuk pengembangan *tajdid* dalam legislasi Indonesia kontemporer erat kaitannya dengan pengembangan budaya hukum Islam. Dalam pengembangan budaya hukum Islam di Indonesia kaum Muslimin dihadapkan pada dua kemungkinan; pertama, hukum positif Islam hanya terbatas pada memperlakukan hukum yang berlaku bagi kaum Muslimin; dan kedua, nilai-nilai hukum Islam berlaku bagi seluruh warga negara, bahkan mungkin seluruh penduduk (termasuk yang bukan warga negara). Kedua alternatif

<sup>61</sup> Yusuf Qardhawi, *loc. cit.*, hlm. 30-31.

<sup>62</sup> Masjfuk Zuhdi, *loc. cit.*, hlm. 5-6.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut akan mempengaruhi pembentukan hukum nasional pada masa yang akan datang.<sup>63</sup>

### C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Reinterpretasi: Meluruskan Konsep Hukum Islam

Mengingat bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah Nabi yang terakhir dan risalahnya berlaku bagi seluruh umat yang datang kemudian, maka syariat itu haruslah bersifat universal agar dapat menjamin terciptanya kemaslahatan di setiap masa dan tempat. Akan tetapi, juga menjadi sunnatullah, manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan; sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu, hukum, dan lain-lain. Kehidupan pada masa modern sekarang telah jauh berbeda dengan kehidupan di zaman Rasullulah ﷺ. Perubahan sosial dalam berbagai aspeknya, selalu melahirkan tuntutan agar perangkat hukum yang menata masyarakat itu haruslah “ikut” berkembang bersamanya.

Perubahan sosial dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti kepadudukan, habitat fisik, teknologi atau struktur dan kebudayaan masyarakat, sedangkan prosesnya dapat didorong oleh kemajuan sistem pendidikan, sikap toleransi terhadap penyimpangan perilaku, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, tingkat heterogenitas penduduk, dan rasa ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan tertentu.<sup>64</sup> Perubahan sosial dengan berbagai faktor dan akibatnya memberikan pengaruh terhadap hukum, dalam arti menuntut adanya perubahan hukum dalam rangka menanggapi problema dimaksud,

<sup>63</sup> Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 78.

<sup>64</sup> Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI. Press, 1975), hlm. 139 – 140.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dikatakan oleh Soejono Dirdjo Sisworo: “Terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata titik sentral sebagai penentu dari berbagai gejala yang juga menentukan watak dan perubahan hukum manusia sendiri.”<sup>65</sup>

Dalam hubungannya dengan masyarakat, hukum mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai *social engineering* dan sebagai *social control*. Pada fungsi pertama, hukum berperan menciptakan perubahan struktur sosial dan memacu masyarakat agar bergerak. Artinya, hukum-hukum diatur untuk tujuan menggerakkan masyarakat pendukungnya supaya maju. Sebaliknya, pada fungsi kedua hukum itu berperan memelihara stabilitas sosial serta mengendalikan arah dan mengontrol lajunya perubahan masyarakat, agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, hukum selalu ketinggalan dan mengalami tarik menarik dengan tuntutan perubahan masyarakat yang dinamis. Pada satu sisi hukum mengekang berbagai gerakan masyarakat, dan di sisi lainnya dinamika masyarakat selalu menuntut agar hukum menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.<sup>66</sup>

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia,<sup>67</sup> pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Masyarakat selalu menuntut agar hukum menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.
2. Pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah yang belum ada aturan hukumnya.

<sup>65</sup> Soejono Dirdjo Sisworo, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 83.

<sup>66</sup> Soerjono Sukanto, *Op. Cit*, hlm. 146 – 147.

<sup>67</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 153-154.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional.
4. Pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembaharuan hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu, sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.<sup>68</sup> Selain itu, hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqasidu syari'ah*.

Ahmad Mustafa al-Maraghi (w.1952), mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan nada yang hampir sama Muhammad Rasyid Ridha (w.1935) mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan

<sup>68</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hlm. 243-246, lihat juga Ahmad Nakhrowi Abdul Salam, *Imam Syafi'i Mazhab Qadim wal Jadid*, (Disertasi pada Universitas Al Azhar Cairo, 1994), hlm. 30-32.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang lama itu segera diperbaharui dengan hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu dan tempat telah mengundang berbagai masalah serius berkaitan dengan hukum Islam, sedangkan metode ijtihad yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab berbagai masalah tersebut belum memuaskan. Dalam hal ini Anderson<sup>69</sup> telah membuat kritik dengan mengatakan bahwa ahli hukum Islam dalam menghadapi masalah kontemporer cenderung mengadakan kajian hukum Islam yang bersifat parsial, metode yang digunakan masih bertumpu pada pendekatan yang *adhoc* dan terpilah-pilah dengan menggunakan prinsip *takhayyur* dan *talfiq*, sehingga tidak mampu menghasilkan hukum Islam yang komprehensif. Terhadap hal ini Joseph Schacht<sup>70</sup> mengemukakan bahwa hukum Islam kontemporer membutuhkan basis teori baru yang lebih tegas dan menyeluruh dalam berbagai masalah hukum.

Ijtihad dalam rangka pembaharuan hukum Islam perlu dilaksanakan secara terus-menerus guna mengisi kekosongan hukum, sebab tidak mungkin ijtihad ulama terdahulu dapat mencakup semua hal secara mendetail ketentuan hukum masa sekarang. Apalagi saat ini frekuensi perubahan tingkah laku manusia sangat tinggi jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan di atas. Ijtihad yang dilaksanakan tidak boleh menyimpang dari prinsip-prinsip kemaslahatan dan harus sesuai

<sup>69</sup> JND Anderson, *Law Reform in The Moslem World*, (London: University of London, 1976), hlm. 42.

<sup>70</sup> Joseph Schacht, "Problem of Modern Islamic Legislation", dalam *Studia Islamica*, vol. 12, 1960, hlm. 120.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tujuan syariat. Maka ijtihad menjadi sangat penting dalam interpretasi untuk menemukan pembaharuan hukum yang lebih baik dari yang sebelumnya.

#### D. Peranan Ijtihad dalam Reinterpretasi Hukum Islam

Perkataan al-Ijtihad berasal dari akar kata *jāhada*, *yajhadu*, *jahd* dan *juhd*, berarti tenaga, kuasa dan daya), sementara *al-Ijtihad* dan *al-Tajahud* berarti *baḥl al-wus'i wa al-majhid* (penumpahan segala kesempatan dan tenaga).<sup>71</sup>

Bertitik tolak dari pengertian kata tersebut, al-Gazali,<sup>72</sup> merumuskan ijtihad dalam arti bahasa: “pencurahan segala daya upaya dan penumpahan segala kekuatan untuk menghasilkan sesuatu yang berat dan sulit”. Karena itulah Muhammad Iqbal (w.1938),<sup>73</sup> Ketika membicarakan prinsip gerak dalam struktur Islam, ia mengidentikkan *ijtihad* dengan *mujtahadah*. Menurut praktek sahabat, kata Ibrahim Hosen (w.2001),<sup>74</sup> ijtihad ialah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan kitab Allah dan Sunnah Rasul, baik melalui suatu *naṣ*, yang disebut *qiyas* (*ma'qul al-naṣ*), maupun melalui maksud dan tujuan ataupun hikmah Syariat yang disebut *Ma'layah*. Dari sejumlah definisi ijtihad yang dikemukakan, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengertian ijtihad adalah:

<sup>71</sup> Lihat Jamal al-Din Muhammad Ibn Muarram, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al- Miṣriyat li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, t.th.), jilid III, hlm. 107-109.

<sup>72</sup> Al-Gazali, *Al-Mustasfa*, (Mesir: Al-Matba'ah al-'Amiriyyah, 1324 H), jilid II, hlm. 350.

<sup>73</sup> Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, (Terjemahan), (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 204.

<sup>74</sup> Ibrahim Hosen, “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru” dalam Haidar Bagir dan Syarif Basri (Ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 23



الْإِجْتِهَادُ هُوَ اسْتِغْرَاغُ الْجَهْدِ فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ

“Ijtihad adalah mencurahkan Kemampuan maksimal dalam upaya menggali dan menemukan hukum-hukum syarak”.

Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan ijtihad dengan: *Bazl al-jahdi li al-wuṣul ila al-ḥukm al-syari'y min dalil tafṣiliy min al-adillah al-syar'iyya* (mencurahkan daya upaya untuk sampai pada (menemukan) hukum syarak dan dalil yang spesifik dari dalil-dalil syar'i). Al-Syirazi, menyebut ijtihad dengan kekuatan kemampuan dan mencurahkan daya upaya untuk memperoleh (menemukan) hukum syarak).

Di samping pengertian ijtihad tersebut, para pakar hukum Islam memberikan batasan pengertian ijtihad dalam arti sempit dan luas. Menurut pengertian yang sempit, ijtihad sama artinya dengan pengertian kias, dengan kata lain ijtihad itu hanya menjalankan kias atau membandingkan suatu hukum dengan hukum yang lain. Sedangkan dalam arti yang luas, ijtihad adalah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syarak dari Kitabullah dan hadis atau usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang serius.

Menurut Ibrahim Hosen,<sup>75</sup> peran ijtihad pada garis besarnya dapat dibagi menjadi tiga segi:

Ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum dari zahir *naṣ* manakala persoalan dapat dimasukkan ke dalam lingkungan *naṣ*. Cara ini dilakukan setelah memeriksa keadaan ‘*amm*-kah atau *khaṣ*, *muṭlaq*-kah atau *muqayyad*, *nasikh*-kah atau *mansukh*, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan lafaz.

<sup>75</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 15-16.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ijtihad dilakukan untuk mengeluarkan hukum yang tersirat dari jiwa dan semangat *naş* dengan memeriksa lebih dahulu apakah yang menjadi illat bagi hukum *naş* itu: *illat manşah* atau *mustanbaţah*, *illat qaşirah*, ataukah *muta'addiyah*, dan sebagainya. Cara ini dikenal dengan kias.

Ijtihad dilaksanakan untuk mengeluarkan hukum dari kaidah-kaidah umum yang diambil dari dalil-dalil yang tersebar. Cara ini dikenal dengan *istişlah*, *istishab*, *masalah mursalah*, *sadd żariah*, *istihsan*, dan sebagainya. Dari ketiga segi ini terlihat bahwa ijtihad tidak dilakukan apabila ada *naş* yang *şarih* (tegas dan pasti).

Bila dikaitkan dengan pembaharuan, maka hukum Islam yang dapat diperbaharui secara teoritis adalah hukum Islam kategori fikih (*fiqh ijthadi*). Namun dalam praktek sejarah hukum Islam menyatakan bahwa perubahan hukum terjadi bukan hanya dalam bidang hukum hasil ijtihad ulama (*fiqh ijthadi*), tetapi juga dalam bidang hukum yang ditentukan secara jelas, tegas dan rinci dalam al-Quran sendiri.

Hal seperti itu nampak pada periode awal, pembaharuan hukum Islam dapat dilihat dari banyaknya kegiatan ijtihad yang dilakukan para ulama dalam merespons perkembangan yang terjadi, sejalan dengan ekspansi wilayah pada abad pertama dan kedua Hijriyah. Melalui kegiatan tersebut, mereka berhasil mengembangkan ijtihad dengan pendekatan substantif (*ma'qul al-ma'nawi* atau *maqasid al-syari'ah*) untuk melengkapi pendekatan tekstual (lafzi) dalam memahami *naş-naş* al-Quran dan al-Sunnah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ijtihad dengan pendekatan *maqasid al-syari'ah* (tujuan umum kehendak Tuhan) adalah kemaslahatan umat. Oleh karena kemaslahatan umat itu tidak bersifat universal dan dapat berubah menurut perubahan situasi dan kondisi, maka asumsi terhadap kehendak Tuhan mungkin berubah dan mungkin pula dianggap secara berbeda. Kenyataan ini terlihat sudah mulai tumbuh pada masa Khulafa al-Rasyidin. Pemikiran yang progresif itu muncul mungkin disebabkan oleh perubahan situasi yang sangat pesat dengan meluasnya kekuasaan Islam, sehingga banyak tingkah laku manusia yang harus diurus dan dicocokkan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan umum kehendak Tuhan).

Tokoh yang terkenal mempunyai pemikiran hukum seperti ini adalah Umar ibn Khattab. Bahkan di dalam beberapa masalah beliau melangkah lebih maju, sehingga terlihat berbeda dengan langkah yang dirintis oleh Nabi, dan dalam beberapa hal tampak berbeda dengan teks al-Quran yang dipandang mempunyai makna yang jelas, tegas dan terperinci. Misalnya dalam masalah harta rampasan perang (*ghanimah*). Al-Quran menyebutkan bahwa harta rampasan perang ditentukan sebanyak 1/5 (*khumus*) untuk kebutuhan ibadah dan sosial. Sedangkan sisanya dibagi untuk pasukan. Namun, Umar ibn Khattab menyerahkan seluruhnya kepada pasukan kemudian diambil pajaknya untuk kas negara. Di sisi lain, Nabi menyebutkan bahwa talak tiga yang diucapkan dalam sekali perkataan maka talak yang jatuh hanya satu. Namun, Umar ibn Khattab mengatakan talak tersebut jatuh tiga sekaligus.

Pada masa tabi'in, tradisi ijtihad yang sering dilakukan para sahabat tetap diteruskan. Pada masa itu dikenal seorang mujtahid bernama Ibrahim an-Nakha'i (w. 96 H) yang mempunyai pengaruh besar dalam mengistinbat





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, beliau telah mengajarkan berbagai kajian fikih kepada Hamid Ibn Abi Sulaiman yang kemudian beliau ini menjadi guru Abu Hanifah. Dalam masa yang sama, di Madinah juga dikenal seorang ahli fikih yang bercorak rasional bernama Rabi'ah bin Abdu al-Rahman Furh. Beliau adalah guru dari Imam Malik, sehingga Imam Malik memiliki kecenderungan dalam berijtihad mencapai puncaknya pada masa pasca tabi'in yang disponsori oleh Abu Hanifah yang bernama asli Nu'man bin Tsabit bin Zuta (80-150 H) dari Kufah. Gelar Abu Hanifah diberikan oleh masyarakat karena kecenderungannya kepada kebenaran, kerajinan beribadah dan keikhlasannya dalam beramal.<sup>76</sup>

Imam Abu Hanifah dalam melaksanakan ijtihad tidak hanya dalam bidang fatwa agama saja, tetapi ia mampu menciptakan metode-metode baru dalam berijtihad di luar metode ijtihad yang telah dilakukan oleh pendahulunya. Dalam berijtihad ia berani menyisihkan hadis ahad dari sumber hukum dan mengambil istihsan sebagai pengembangan dari kias yang telah ada sebelumnya.<sup>77</sup>

Dalam waktu yang bersamaan, muncul pula pikiran Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amar al-Madany (93-179 H). Beliau adalah salah satu murid dari Imam Rabi'ah ar-Ra'yu seorang ahli fikih dari generasi tabi'in. Imam Malik juga melahirkan metode baru dalam kajian hukum Islam yang dipergunakan dalam berijtihad. Metode ijtihad yang dikembangkan adalah metode *istiṣlah*, yaitu menyelesaikan segala persoalan hukum yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam *naṣ* dengan mengacu pada

<sup>76</sup>Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 122-123.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hlm. 123-126.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

kemaslahatan umum manusia yang secara keseluruhan bertumpu pada *maqāṣid al-syari'ah*.<sup>78</sup>

Selain metode ijtihad yang dikembangkan kedua tokoh tersebut, perlu juga diketahui metode ijtihad yang dikembangkan oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i (w.204 H). Beliau adalah murid Imam Malik yang berbeda dengan gurunya dalam melakukan kajian Islam. Dalam melaksanakan ijtihad, Imam Syafi'i mempergunakan hadis-hadis ahad sejauh kriteria sebagai hadis sahih yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penetapan hukum, karena terpakai atau tidaknya sebuah hadis tidak ditentukan oleh sejumlah perawi pada setiap *ṭabaqat*-nya, tetapi oleh kualitas mereka yang terlibat dalam periwayatan hadis-hadis tersebut. Sejauh mereka itu adil, *ḍābit* dan *siqah*, serta sanadnya bersambung dan tidak ada *'illat* serta tidak *syaz*, hadis-hadis ahad tersebut dapat dipakai sebagai dalil hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tindakan Imam Syafi'i menggunakan metode ijtihad seperti ini dianggap positif oleh sebagian ulama penerus beliau karena hal tersebut memperkaya perbendaharaan al-Sunnah sebagai rujukan dalam kajian hukum.<sup>79</sup> Yang dimaksud di sini adalah Hukum Islam yang menurut Ahmad Rofiq merupakan seperangkat kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>80</sup>

Sejalan dengan perkembangan ini, lahir metodologi baru dalam kajian hukum Islam yang disebut metode ushul fiqh dan metode ini digunakan oleh

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia (Kencana: 2019), Cet ke I, hlm. 25-26.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semua mazhab dalam kajian fikih, meskipun ada perbedaan dalam penerapannya. Metode ushul fiqh ini pertama kali digagas oleh Imam Syafi'i yang kemudian dirumuskan lagi secara lebih komprehensif oleh murid-muridnya.<sup>81</sup>

Fenomena yang muncul pada akhir abad ke-13 H merupakan suatu wujud kesadaran dari bangkitnya kajian hukum Islam yang dilakukan oleh para cendekiawan dan pembaharu (*mujtahid*) dalam rangka menghadapi kebekuan berfikir dan meluasnya taqlid dalam kalangan Islam, serta perlunya kesadaran bersama yang konstruktif memikirkan kembali warisan Islam untuk menjawab tantangan intelektual dari pemikiran modern melalui asimilasi kreatif, serta menghadapi Kristen yang selalu memberi citra buruk kepada hukum Islam. Munculnya tokoh-tokoh pembaharu seperti Ibnu Taimiyah (w.1263), Muhammad Abduh (w.1905), Muhammad bin Abdul Wahab (w.1792), Jamaluddin al-Afghani (w.1897), dan beberapa tokoh lainnya memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembaharuan hukum Islam yang berkembang saat ini. Langkah awal yang mereka laksanakan adalah menentang sikap *taqlid*. Mereka menekankan perlunya pemahaman tentang argumentasi yang terlibat dalam suatu sikap keagamaan. Sebagai konsekuensinya, ijtihad harus terus-menerus dilakukan untuk menghasilkan pemahaman keagamaan yang segar dan kontekstual. Dalam argumentasi pentingnya ijtihad ini ia menekankan posisi sentral al-Quran dan al-Sunnah dan mencela penghargaan yang berlebihan kepada karya-karya ulama terdahulu, tetapi harus ditempatkan

<sup>81</sup> Ammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 14.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada suatu hal yang wajar dan proporsional sebagai khazanah yang memang perlu dihargai.<sup>82</sup>

Menurut Yusuf al-Qardhawi,<sup>83</sup> ada dua metode yang tepat dan cocok digunakan, untuk dilaksanakan dalam menghadapi era globalisasi saat ini, yaitu:

1. Ijtihad *intiq'a'i (tarjih)* ialah memilih satu pendapat dari pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fikih Islam, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi sekarang ini. Kemungkinan besar pendapat para ahli hukum Islam terdahulu mengenai masalah yang dipecahkan ini berbeda-beda. Dalam hal ini mujtahid muntaqi bertugas mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi tersebut, kemudian memberikan referensinya pada pendapat yang dianggap kuat dan dapat diterima.
2. Ijtihad *insya'i* ialah pengambilan kesimpulan baru dari suatu persoalan, di mana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik berupa persoalan lama maupun baru. Dalam ijtihad model ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik dan bagaimana kasus baru itu ada, sulit bagi mujtahid munsyi untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Disamping itu, dalam metode ijtihad insya'i diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penentuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqh, yaitu *qiyas*,

<sup>82</sup> Yusuf Qardhawi, *loc.cit*, hlm. 35-37.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 37-38.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*istihsan, istiṣlah, maslahah mursalah dan sad al-ẓari'ah*. Kini kembali menjadi sangat penting sebagai alternatif jalan keluar dari persoalan hukum abad modern dengan permasalahannya yang kompleks.<sup>84</sup> Konsep *ijtihad jama'i*, yang sejak awal dipraktikkan oleh Khulafa' al- Rasyidin dan para mujtahid terdahulu, seperti Abu Hanifah dan para sahabatnya, kini kembali menjadi sangat penting sebagai alternatif jalan keluar dari persoalan hukum abad modern dengan permasalahannya yang kompleks.<sup>85</sup>

Dalam konteks ijtihad ini, maka pembaharuan itu dapat terjadi dalam empat bentuk:

1. Apabila kasus tersebut belum ada ketentuan hukumnya dalam kitab-kitab fikih, karena masalah tersebut adalah masalah baru, maka bentuk pembaharuan dalam masalah ini dengan menetapkan hukum berdasarkan ijtihad. Contohnya: bayi tabung (inseminasi buatan), pencangkokan kornea mata dan transplantasi organ tubuh, dan lain-lain seperti dijelaskan di atas.
2. Apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari sekian kemungkinan (keboleh-jadian) yang dikandung oleh suatu teks al-Quran dan al-Hadis. Bentuk pembaharuan dilakukan dengan mengangkat pula kemungkinan (keboleh- jadian) yang lain, yang terkandung dalam ayat atau Hadis tersebut. Contoh, kebanyakan ulama telah menetapkan lima macam kekayaan yang wajib zakat, yaitu emas dan perak; tanam-tanaman dan buah-buahan; barang-barang dagangan; binatang ternak; barang tambang dan barang peninggalan orang dahulu yang ditemukan waktu digali. Kelima

<sup>84</sup> Muhammad Salam Madkur, *Manāhij al-Ijtihād fi al-Islām*, (Kuwait: Jami'ah Kuwait, 1974), hlm. 424-425.

<sup>85</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

macam kekayaan yang ditetapkan wajib zakat itu berkisar dalam ruang lingkup keboleh-jadian (kemungkinan) arti Q.S. Al-Baqarah (2): 267:

.....مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ط

Artinya: ".....sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu."

Yusuf al-Qardawi, menetapkan penghasilan yang datang dari jasa dikenakan zakat, dan nisabnya dipersamakan dengan nisab hasil pertanian. Pendapat ini juga tetap berkisar dalam ruang lingkup kemungkinan (keboleh-jadian) arti teks al-Quran diatas.<sup>86</sup>

3. Apabila hasil ijtihad lama didasarkan kepada 'urf setempat, maka hasil ijtihad lama dapat berubah dengan berubahnya 'urf, sehingga ditetapkan hasil ijtihad baru yang didasarkan kepada 'urf setempat yang telah berubah itu. Misalnya harta pencaharian bersama suami istri; menurut hasil ijtihad ulama terdahulu menetapkan bahwa istri tidak berhak memperolehnya, sesuai dengan 'urf masyarakat Islam, terutama orang Arab, yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal (kebapakan) masa itu, dimana wanita hanya tinggal dirumah dan tidak ikut bekerja membanting tulang untuk mencari kebutuhan keluarga. Dengan timbulnya kesadaran masyarakat dan berkembangnya paham emansipasi wanita, 'urf masyarakat Islam sekarang sudah berubah, apalagi pria dan wanita sama-sama ikut bekerja membanting tulang untuk mencari kebutuhan keluarga, dan dibantu oleh yurisprudensi,

<sup>86</sup> Abd. al-Rahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Irsyad, t.th.), hlm. 527-528; Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), cet. IV, Juz III, hlm. 1819. Bandingkan dengan Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakat*, (Beirut: Dar al-Irsyad, t.th.), jilid I, hlm. 489; Panitia Penyusunan Biografi Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML., *Prof. K.H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990), cet. I, hlm. 173-177.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassan Riau

maka harta pencaharian bersama dibagi dua antara suami dan istri, apabila terjadi cerai mati atau cerai hidup.<sup>87</sup>

4. Apabila hasil ijtihad lama ditetapkan dengan kias, maka pembaharuan dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ijtihad tersebut dengan menggunakan metode-metode *istinbat* hukum lainnya, seperti *istihsan*, *istiṣlah* dan lain-lain. Misalnya hasil ijtihad tentang larangan masuk mesjid bagi wanita yang haid, kemudian dikiaskan kepada orang yang *junub* karena sama-sama berhadhas besar. Ada ulama yang merasa kias di atas kurang tepat. Menurut mereka ada unsur lain yang membedakan haid dengan *junub*, walaupun keduanya sama-sama hadas besar. *Junub* bersifat ikhtiari dan orang boleh bersuci secepat dia inginkan. Sedangkan haid, bersifat fitri dan tidak akan berhenti sebelum waktunya habis, yang relatif sangat panjang dibandingkan dengan *junub*. Karenanya tidak pantas melarang perempuan haid memasuki masjid kalau hanya dikiaskan kepada *junub*.<sup>88</sup>

Berbicara tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia secara khusus, pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan negara-negara muslim

<sup>87</sup> Pencaharian bersama suami istri secara khusus tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik yang umumnya dikarang orang-orang Arab, karena mereka tidak mengenal *'urf* seperti itu. Tetapi yang dibicarakan adalah mengenai perkongsian, yang disebut *syirkah* atau *syarikat*. Menurut bahasa, *syarikah* adalah percampuran suatu harta dengan harta lain, sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut istilah fikih, ialah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Ulama Syafi'iyah membagi *syarikah* kepada empat macam:

1. *Syarikah 'Inan* (perkongsian terbatas);
2. *Syarikah Abdan* (perkongsian tenaga);
3. *Syarikah Mufawadah* (perkongsian tak terbatas);
4. *Syarikah Wujud* (perkongsian kepercayaan).

Diantara empat macam itu, hanya *syarikah 'inan* saja yang boleh menurut ulama Syafi'iyah, itupun dengan syarat-syarat:

1. Ada *ṣigat* yang jelas menunjukkan masing-masing peserta mengizinkan peserta lainnya bertindak atas nama perkongsian.
2. Masing-masing peserta disyaratkan *Rasyid* (pandai memelihara harta), dan *baligh* (dewasa);
3. Modal: harus dapat diukur, dicampur lebih dahulu sebelum ada perjanjian *syarikah*, dan harus sama jenisnya.

<sup>88</sup> Lebih lanjut lihat al-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, (Mesir: Dar al-Hadis, t. th.), jilid I, hlm. 229-232.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau

lainnya. Meskipun secara keseluruhan pembaharuan hukum Islam di Indonesia berjalan relatif lamban dibanding dengan negara-negara muslim lain, terutama di negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahkan, pembaharuan hukum Islam di Indonesia telah menimbulkan ketegangan-ketegangan, kadang-kadang nampak samar-samar dan tertahan, dan terkadang pula nyata dan jelas, yaitu antara tuntutan ke arah kekuasaan yang terang-terangan Islam dengan kekuasaan yang kenyataannya bersifat non-Islam, maupun yang bersifat sinkretis keagamaan. Hal ini sejalan dengan analisis Daniel S. Lev Yang mengatakan:

“Berbeda dengan negara-negara Islam lain, Indonesia sangat menonjol sekali dalam dua hal, yaitu tangguhannya kekuatan dan konservatisme dari doktrin Islam serta praktek-praktek lembaga-lembaganya. Lembaga-lembaga Hukum Islam di Indonesia telah mengembangkan sayapnya bersama-sama dengan lembaga-lembaga sipil, sedangkan di negara-negara lain tampaknya mereka berhenti berkembang, menciut atau bahkan hilang tersisih oleh perkembangan kekuasaan pemerintah sipil. Lagipula dan mungkin erat hubungannya dengan kemampuan administrasi Islam untuk bertahan, maka perubahan ideologi Islam di Indonesia secara relatif lambat. Modernisme Islam di Indonesia kurang memberikan penemuan-penemuan baru serta kurangnya berlapang dada dibandingkan dengan di negara-negara lain, dan akibatnya juga kurang berpengaruh terhadap praktek-praktek administrasi Islam”.<sup>89</sup>

Untuk melihat lebih jelasnya pembaharuan hukum Islam di Indonesia, dapat kita selusuri melalui keberadaan hukum Islam di Indonesia. Ada dua bentuk berlakunya hukum Islam di Indonesia,<sup>90</sup> yaitu: *Pertama*, sebagai aturan

<sup>89</sup> Daniel S. Lev., *Islamic Courts in Indonesia: A Study of the Political Bases of Legal Institutions*, (Barkelay dan Los Angeles: University of California Press, 1972), hlm. 21.; dialih bahasakan H. Zaini Ahmad Noeh: *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Jakarta: P.T. Intermasa, 1986), cet. ke-2, hlm. 23.

<sup>90</sup> Muhammad Daud Ali, “Peradilan Agama dan masalahnya” dalam Tjun Surjaman (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Rasda Karya, 1991), hlm. 72- 73; M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum”



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

moral, yaitu (bagian) hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Hampir semua bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, bersifat aturan moral.

Pembaharuan hukum Islam dalam tahapan ini belum ada upaya menciptakan keseragaman hukum bagi masyarakat Indonesia melalui unifikasi dan kodifikasi, dan belum ada upaya melibatkan pemerintah dalam pelaksanaannya. Pembaharuan hukum Islam baru bersifat ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat, karena ketentuan-ketentuan hukum lama (fikih) yang dianut sebelumnya dirasakan tidak adil oleh masyarakat setempat. Hal ini terjadi karena akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tradisi dan budaya masyarakat setempat tidak terakomodir di dalam fikih yang dianut selama ini. Sebagai contoh telah lahir berbagai karya tulis monumental ulama-ulama Indonesia yang mengajukan ide-ide baru, seperti: *siraṭ at-tullab*, *siraṭ al-mustaqim*, *sabili al muhtadin*, *Kutaragama*, *Sajinah al-Hukm*, dan lain-lain. Meskipun semua karya tulis itu bercorak fikih mazhab Syafi'i, namun ada perkembangan yang dijumpai didalamnya. Seperti harta gono-gini (pencaharian bersama selama dalam perkawinan) yang tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih lama, karena tuntutan tradisi dan budaya setempat, maka Syekh Arsyad al-Banjari (1122-1189 H / 1716-1812 M) telah membahas harta gono-gini tersebut dan memasukkannya ke dalam kitab yang disusunnya *Sabili al-Muhtadiin*.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

*Kedua*, secara formal yuridis, adalah (bagian) hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam dalam bentuk ini, berarti telah terlebih dahulu melalui proses legalisasi hukum nasional sesuai dengan prosedur yang berlaku. Melaksanakan hukum Islam seperti ini, bukan hanya berdasarkan iman dan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga sudah berkaitan dengan *uli al-amri* (penguasa) yang turut campur tangan dalam pelaksanaannya. Artinya, hukum Islam tersebut sudah dapat dijalankan secara paksa sesuai sifat hukum positif yang melekat padanya. Cara penyajian dan sistematiknya pun tidak seperti pembahasan fikih secara umum, tetapi sudah berubah menyerupai peraturan perundang-undangan modern, dalam bentuk bab, pasal-pasal dan ayat-ayat. Ciri khas fikihnya pun telah hilang, dan identitasnya pun tidak lagi disebut hukum Islam, tapi berubah menjadi hukum nasional. Dari sini dapat dipahami bahwa dari interpretasi hukum Islam<sup>91</sup> masa lalu (tradisional) menghasilkan pembaharuan hukum Islam yang baru sesuai dengan kondisi masyarakatnya sehingga dapat di kodifikasi menjadi sumber hukum materil bagi Negara Indonesia.

Kodifikasi hukum Islam di Indonesia telah dimulai sejak zaman VOC (1600-1800 M) dengan ditetapkan kitab *Muharrar* dan *Pepakem Cirebon* sebagai buku rujukan dalam menyelesaikan perkara di daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan,<sup>92</sup>; *Sabil al-Muhtadin* karya Syekh Arsyad al-Banjari (1716-

<sup>91</sup> Yang dimaksud penulis disini adalah fokus kepada hukum keluarga Islam atau yang dikenal dengan istilah *ahwal al-Syakhsiyyah*.

<sup>92</sup> Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 59.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1812 M) dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa di Kesultanan Banjar,<sup>93</sup>; *Compendium Freijer* yang disusun oleh D.W. Freijer tentang hukum Perkawinan dan Kewarisan Islam diberlakukan di daerah jajahan VOC.<sup>94</sup>

Setelah Indonesia merdeka, hukum Islam dalam bentuk kodifikasi / kompilasi ini terbagi kepada dua macam, yaitu:

1. Tidak menggunakan simbol-simbol “agama Islam”.

Hukum Islam dalam bentuk ini sama halnya dengan hukum nasional pada umumnya. Ia bersifat netral, tanpa menunjukkan ciri-ciri agama tertentu dan kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, bagi masyarakat pada umumnya, terutama yang hangat dengan simbol-simbol keagamaan, sulit memahaminya sebagai hukum Islam. Bahkan ada kecenderungan masyarakat menganggapnya sebagai hukum sekuler, yang tidak punya kaitan dengan agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya ada unsur keterpaksaan, bukan karena didorong oleh keyakinan keimanan dan kesadaran sendiri. Misalnya tentang peraturan pencatatan perkawinan, kemestian cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, dan lain sebagainya.

Sifat integrasi hukum Islam kepada hukum positif nasional dalam konteks ini, oleh Sayuti Thalib disebut dengan teori “*Eksistensialisme*”,<sup>95</sup> yaitu meskipun bentuk hukum Islam itu tidak terlihat secara jelas, tetapi eksistensinya ada dalam hukum nasional. Artinya hukum Islam tidak

<sup>93</sup> Muhammad Daud Ali, *loc. cit.*, hlm. 72.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>95</sup> Untuk lebih jelasnya teori *eksistensialisme* dapat dibaca dalam: Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), cet. ke-3, hlm. 229-244; Harold H. Titus, dkk., *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Alih bahasa: H. M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), cet. I, hlm. 381-398.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditampilkan dalam bentuk simbol-simbol dan propaganda belaka, tetapi dimodifikasi dalam bentuk yang netral sehingga terserap dalam hukum nasional secara umum dan tidak menghilangkan esensi hukum Islam itu sendiri.<sup>96</sup>

Bila seluruh hukum Islam dilaksanakan dengan cara seperti apa yang digambarkan tersebut, penulis melihat dan berpendapat bahwa pada hakekatnya sama artinya dengan terlaksananya ide Piagam Jakarta, bahkan telah sama artinya dengan berdirinya negara Islam. Karena syariat Islam telah dilaksanakan dengan baik, meskipun telah dimodifikasi ke dalam hukum nasional.

Upaya pembaharuan hukum Islam dalam bentuk ini telah berhasil melahirkan hukum Islam yang berwarna hukum nasional, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. P.P. No. 28 Tahun 1977 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2005, jo. Undang-Undang No. 1

<sup>96</sup> Mengamati situasi politik Indonesia dari awal pembentukannya sampai sekarang ini, dimana negara Indonesia dihuni beragam penganut agama yang berbeda, demikian juga etnis, budaya, dll., potensial dapat menimbulkan konflik. Dalam keragaman itu, ternyata posisi umat Islam dan hukum Islam selalu terpinggirkan, meskipun umat Islam dinyatakan sebagai kelompok mayoritas. Hal ini terjadi, karena salah paham terhadap ide Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, yang menyebutkan: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kalimat itu dipahami bahwa sebagian umat Islam ingin menukar dasar negara Pancasila dengan Islam. Pemahaman yang seperti itu tidak hanya dari orang-orang non-Islam, tapi juga datang dari tokoh-tokoh umat Islam. Akibatnya, dimasa Orde Baru, semua partai harus berdasarkan Pancasila, tidak boleh dasar yang lain, termasuk Islam. Dan semua peraturan perundang-undangan yang mengandung simbol-simbol Islam, selalu dicurigai, bahkan ketika perubahan Rencana Undang-Undang Peradilan Agama, ada yang menuduh undang-undang itu, seolah-olah membenarkan berdirinya negara Islam dalam negara kesatuan Republik Indonesia, karena itu diminta pembahasannya dihentikan. Tantangan demi tantangan bahkan merupakan kegagalan yang dihadapi umat Islam dengan menggunakan simbol-simbol keislaman itu, barangkali salah satu faktor Nurehlish Madjid pernah mengatakan: "Islam Yes, Partai Islam No!". Oleh karena itulah, para cendekiawan muslim belakangan ini memandang bahwa penerapan teori eksistensialis tersebut sangat tepat dan proporsional untuk mendapatkan posisi umat Islam yang terabaikan selama ini, disamping tetap terciptanya kerukunan umat beragama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1951, jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- c. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. P.P. No. 9 Tahun 1975, jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 dan No. 4 Tahun 1975, serta Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang sistem Perbankan Nasional, yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah.

Dalam masyarakat yang pluralis, baik dari segi etnis, agama dan budaya, seperti Indonesia, dimana masing-masing penganut agama saling tarik-menarik kepentingan dalam berbagai hal, terutama untuk mengisi dan membangun negara Republik Indonesia, mulai dari menuangkan ideologi dalam mewarnai dasar negara, sampai kepada kebijakan teknis yang sifatnya insidental, seperti telah kita saksikan dari awal pendirian negara Republik Indonesia, sampai dalam sidang tahunan MPR 2002, bahkan diperkirakan sampai masa-masa mendatang, maka perjuangan umat Islam akan lebih mulus, dan berhasil dengan memilih teori penerapan hukum *eksistensialisme* tersebut. Dengan penerapan teori ini diharapkan kecurigaan umat lain terhadap umat Islam akan berkurang, dan mungkin juga hilang sama sekali.

2. Menggunakan simbol-simbol “*agama Islam*”.

Belakangan ini telah muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang menggunakan simbol-simbol agama Islam. Misalnya: Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang no. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; Bahkan Kompilasi Hukum Islam (K.H.I.) secara langsung menyebut dirinya “hukum Islam Indonesia” yang diatur dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, jo. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991; terdiri dari 3 buku, 30 bab, dan 229 pasal. Semua Peraturan Perundang-undangan tersebut secara khusus diperuntukkan dan diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai Fikih Indonesia, karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia, telah lahir dari upaya panjang dan kerja keras umat Islam Indonesia, karena ide pembentukannya telah dimulai sejak tahun 1970 an, dan berhasil dirumuskan setelah melalui berbagai rintangan, dengan menggunakan berbagai pendekatan, termasuk melakukan lobi-lobi politik.<sup>97</sup>

Bila keberadaan Kompilasi Hukum Islam ini kita kaitkan dengan reinterpretasi hukum Islam, seperti yang telah diuraikan diatas, maka:

- a) Dilihat dari sisi unifikasi dan kodifikasi hukum Islam serta turut campurnya penguasa negara dalam penerapannya –meskipun hanya didasarkan kepada Inpres No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama R.I. No. 154 Tahun 1991– maka keberadaan Kompilasi Hukum Islam dipandang sebagai perwujudan ide *taqnin* (kodifikasi) dan menjadi hukum positif di Indonesia.

<sup>97</sup> Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditbinbapera Ditjen Binbaga Departemen Agama R.I., 1991-1992), hlm. 127-165.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b) Dilihat dari sisi materi yang dikandungnya, maka keberadaan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan perwujudan dari ide Prof. Dr. Hazairin, SH. dan Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, yang menginginkan dibuat fikih berdasarkan budaya dan tradisi Indonesia.<sup>98</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab hukum formil yang *unifikatif*<sup>99</sup> dan *kodifikatif*<sup>100</sup> tersebut sangat diperlukan dan sifatnya segera, mengingat pada masa sebelumnya tidak terdapat keseragaman keputusan antar Pengadilan Agama karena para hakim senantiasa berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan meskipun dalam kasus yang sama. Kenyataan seperti ini terjadi hampir merata pada setiap persoalan. Dengan kenyataan ini, maka prinsip kepastian hukum kurang terealisasi dengan baik.<sup>101</sup>

<sup>98</sup> Kedua tokoh ini mencoba merumuskan hukum Islam dalam konteks keindonesiaan. *Pertama*, Hasbi ash-Shiddieqy yang memperkenalkan “Fikih Indonesia”. Ia mendefinisikan “Fikih Indonesia” sebagai fikih yang diaplikasikan sejalan dengan karakter Indonesia. Menurutnya, untuk menuju fikih Islam yang berwawasan keindonesiaan, ada tiga bentuk ijtihad yang perlu digalakkan: 1. Ijtihad dengan mengklasifikasikan hukum-hukum produk ulama mazhab masa lalu. Ini dimaksudkan agar dapat dipilih pendapat yang masih cocok untuk diterapkan dalam masyarakat kita. 2. Ijtihad dengan mengklasifikasikan hukum-hukum yang semata-mata didasarkan pada adat kebiasaan dan suasana masyarakat dimana hukum Islam itu berkembang. 3. Ijtihad dengan mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian ide “Fikih Indonesia” yang dilontarkan Hasbi ash-Shiddieqy adalah mencoba menelurkan hukum Islam yang sesuai dengan adat dan perubahan yang berkembang di Indonesia. *Kedua*, Hazairin Gelar Pangeran Alamsyah yang memperkenalkan “Mazhab Nasional (Indonesia)”. Mazhab ini dibangun semata-mata lewat upaya pembaharuan terhadap mazhab Syafii sesuai dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Untuk lengkapnya lihat Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, “Hukum Islam Dalam Konteks Masyarakat Modern” dalam Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 48 Tahun XI – 2000, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 2000), hlm. 28; Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syariat IAIN Sunan Kalijaga, *Ke Arah Fikih Indonesia Mengenang Jasa Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, (Yogyakarta: Forum studi Hukum Islam Fakultas Syariat IAIN Sunan Kalijaga, 1994), cet. ke-1, hlm. 4; Zarkowi Soeyoeti, “Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Dadan Muttaqien (Editor Edisi 2), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Edisi Ke-2, hlm. 61.

<sup>99</sup> Adanya satu pedoman hukum yang seragam untuk semua Pengadilan Agama.

<sup>100</sup> Adanya hukum tertulis yang dihimpun dalam satu hukum secara formil.

<sup>101</sup> Ditjen Binbaga R.I. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Binbaga Departemen Agama R.I., 1991/1992 M.), hlm. 128.



## BAB III

### KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

#### A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Istilah kompilasi sulit ditemukan dalam kamus-kamus, ensiklopedi dan buku-buku hukum berbahasa Indonesia. Dalam kajian hukum pada umumnya dikenal dengan istilah “kodifikasi”, yaitu pembukuan satu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam satu buku hukum. Misalnya kodifikasi hukum perdata menjadi kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kodifikasi hukum pidana menjadi kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUH Pidana).

Term kompilasi berasal dari bahasa latin *Compilare* yang kemudian berkembang menjadi *Compilation* dalam bahasa Inggris, dan *Compilatie* dalam bahasa Belanda, yang artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia “kompilasi”, sebagai terjemahan langsung dari kata tersebut.<sup>102</sup> Dalam kamus Inggris-Indonesia--Indonesia-Inggris karya S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, kata *Compilation* diterjemahkan sebagai “karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain”.<sup>103</sup>

Mengacu kepada beberapa kutipan diatas dan beberapa ensiklopedia, Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan

<sup>102</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 11.

<sup>103</sup> S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia--Indonesia-Inggris*, (Jakarta: Hasta, 1982), hlm. 88.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.<sup>104</sup> Dalam konteks hukum, kompilasi sedikit berbeda dengan kodifikasi, yang berarti pembukuan (*al-tadwin*), yaitu sebuah buku hukum tertentu atau buku kumpulan yang memuat aturan atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum.<sup>105</sup> Joesoef Sou'yb menyebutkan kompilasi atau *Compilation* berasal dari kata kerja *to compile*, yang bermakna *to compose out of material from other documents* (menyusun bahan-bahan dari berbagai dokumen lainnya). Justru Kompilasi Hukum Islam bermakna menyusun bahan-bahan hukum Islam dari berbagai dokumen tentang hukum Islam. Hal ini dilakukan dengan tata cara kerja terencana.<sup>106</sup>

Menurut kamus Black (*Black's Law Dictionary*), seperti dikutip A. Hamid S. Attamimi,<sup>107</sup> *Compilation a leterary production composed of the works of others and arranged in methodical manner* ("kompilasi" adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur). Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.

<sup>104</sup> Abdurrahman, *op.cit*, hlm. 13.

<sup>105</sup> S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *op.cit*, hlm. 12.

<sup>106</sup> Yoesoef Sou'yb, "Hakikat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Istislah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, (Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, edisi No. 3 tahun II, 1993), hlm. 9.

<sup>107</sup> A. Hamid S. Attamimi, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia" dalam Amarullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 52.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© akripsi milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Hassan Riau

John M. Echols dan Hassan Shadily dalam bukunya mengatakan *compilation of laws* (himpunan undang-undang). Kecuali itu *compilation* dapat pula diartikan sebagai *book* (buku) atau *corpus*. Dengan perkataan lain, kompilasi merupakan suatu koleksi.<sup>108</sup>

William Morris mengatakan, asal kata kompilasi dari Bahasa Latin *compilare*, yang dalam Bahasa Inggris berarti *to heap together* (menghimpun menjadi satu kesatuan).<sup>109</sup> Bila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam suatu buku. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam adalah suatu himpunan bahan-bahan Hukum Islam dalam suatu buku atau lebih tepat lagi himpunan kaidah-kaidah Hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam Perundang-undangan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak secara spesifik menjelaskan terminologi kompilasi tersebut. Tetapi apabila dihubungkan dengan penggunaan istilah kompilasi dalam konteks Hukum Islam di Indonesia, ia bisa dipahami sebagai fikih dalam bahasa perundang-undangan, yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat. Oleh karena itu, pemahaman secara utuh dan komprehensif terhadap istilah kompilasi, kiranya baru diperoleh setelah mengetahui sejarah dan proses pembentukannya.

Secara substantif, upaya-upaya penghimpunan fikih ke dalam bahasa perundang-undangan telah lama dirintis oleh para ahli hukum dan ulama

<sup>108</sup> John M. Echols and Hasan Shadily, *An English-Indonesia Dictionary* (Ytacha and London: Cornel University Press, 1975), hlm. 132.

<sup>109</sup> William Morris, editor, *The American Heritage Dictionary of the English Language*, (Boston, New York, Atlanta: American Heritage Pub. Co. Inc., 1973), hlm. 272.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Kelahiran Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dari satu sisi sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya kompilasi, meskipun namanya Undang-Undang. Karena secara Yuridis, apabila dilihat dari tertib perundang-undangan menurut TAP. MPRS No. XX/MPRS/1966 istilah kompilasi memang tidak termasuk, akan tetapi, hukum Perkawinan yang telah diundangkan menjadi UU No. 1 Tahun 1974 justru memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hanya sekedar kompilasi. Jika Undang-Undang memiliki daya ikat dan daya paksa pada subyek dan obyek hukumnya, sementara kompilasi sesuai dengan karakternya, hanyalah menjadi pedoman saja, yang relatif tidak mengikat.

Kontribusi Hukum Islam dalam pembangunan Hukum Nasional memberikan kontribusi yang sangat besar paling tidak dari segi jiwanya. Pernyataan ini diperkuat lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi hukum terapan di Peradilan Agama.<sup>110</sup> Sedangkan secara sosiologis kedudukan Hukum Islam di Indonesia melibatkan keberagaman di masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum, selalu sama-sama menuntut ketaatan.<sup>111</sup>

Oleh karena itu, pendekatan pemahaman bahwa produk pemikiran hukum Islam tidak hanya terbatas pada fikih, mutlak diperlukan. Artinya, selain fikih masih ada produk pemikiran hukum Islam lainnya yang dalam kenyataan berlaku dan diterima oleh masyarakat, seperti keputusan pengadilan (*al-wilayah*

<sup>110</sup> Mardani, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Kencana: 2013), Cet Ke-... hlm. 16-17

<sup>111</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*al-qaḍa'*), fatwa seorang mufti atau suatu lembaga, dan undang-undang.<sup>112</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, Kompilasi Hukum Islam yang secara formil penyebarannya disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pelaksanaannya ditindak lanjuti melalui Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991, dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK.003/AZ/91- adalah merupakan puncak pemikiran fikih Indonesia. Pernyataan tersebut didasari oleh kenyataan proses panjang perumusan kompilasi yang puncaknya ditempuh melalui diadakannya Loka Karya Nasional yang diikuti oleh ulama-ulama fikih dari organisasi-organisasi Islam, ulama fikih dari perguruan tinggi, masyarakat umum, dan diperkirakan semua lapisan ulama ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai konsensus (ijmak) ulama Indonesia.<sup>113</sup>

#### B. Proses Pembentukan KHI

Walaupun umat Islam Indonesia telah berhasil melalui Menteri Agama dan para ulama dalam mensahkan RUU PA menjadi Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, bukan berarti bahwa semua persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai, karena ternyata persoalan krusial yang dihadapi adalah tidak adanya keseragaman para hakim Peradilan Agama dalam menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Sering terjadi perbedaan putusan antara satu Peradilan Agama

<sup>112</sup> Untuk lengkapnya, lihat Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 30-32.

<sup>113</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya cet. ke-2, 1993) hlm. 138-139.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Peradilan Agama yang lainnya dalam masalah yang sama,<sup>114</sup> yang dapat mengurangi wibawa Peradilan Agama. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab Materi Hukum Islam yang sama. Meskipun telah ditetapkan 13 kitab fikih yang kesemuanya dalam mazhab Syafi'i yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara, akan tetapi tetap menimbulkan persoalan, yaitu tidak adanya keseragaman putusan hukum, karena dalam kitab-kitab fikih tersebut juga terdapat perbedaan pendapat (*ikhtilaf*), walaupun dalam satu mazhab (mazhab Syafi'i).<sup>115</sup>

Setelah diundangkan PP No. 45/1957 tentang pembentukan PA/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura, kepala biro PA dan Departemen Agama segera mengeluarkan surat edaran No. B/1/735 tanggal 15 Februari 1958 yang menganjurkan penggunaan 13 (tiga belas) macam kitab fikih sebagai pedoman.<sup>54</sup> Ketiga Belas kitab fiqh tersebut adalah: *al-Bajuri*, *Fath al Mu'in* berikut *Sharah*-nya, *Sharqawi 'ala al-Tahrir*, *al Mahalli*, *Fath al-Wahhab*, *Tuhfah*, *Targhib al-Mushtaq*, *Qawanin Shar'iyah lisayyid Usman bin Yahya*, *Qawanin lisayyid Sodaqah Dakhlan*, *Shamsuri fil Faraid*, *Bughyat al-Mastarshidin*, *al-Fiqh 'ala al Madhahib al-'Arba'ah* dan *Mughny al Muhtaj*.<sup>116</sup>

<sup>114</sup> Karena belum ada KHI, selain tidak seragamnya keputusan hukum untuk masalah yang sama, juga bahkan dijadikan alat politik untuk memukul orang lain yang dianggap tidak sepaham, padahal fikih itu semestinya membawa rahmat, bukan menjadi penyebab perpecahan, Lihat: Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, *Mimbar Ulama*, No. 104, Tahun X April 1986, hlm. 60.

<sup>115</sup> Lihat Dirjen Bimbaga Islam, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1991/1992), hlm. 139.

<sup>116</sup> Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Kontemporer Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Mizan, 1993), cet. I, hlm. 21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan banyaknya kitab fikih yang dianjurkan oleh Departemen Agama maupun PA, masih sangat mungkin sekali terjadi perbedaan putusan dalam wilayah PA, dikarenakan para hakim bebas menafsirkan ataupun memilih hukum apa yang akan dijatuhkan disebabkan banyaknya rujukan.<sup>118</sup>

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, berangkat dari realitas ini, keinginan untuk menyusun “kitab hukum Islam” dalam bentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak. Penyusunan kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya keseragaman referensi keputusan hukum di PA di Indonesia, tetapi juga disandarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah Peradilan, yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga Peradilan tersebut.<sup>119</sup>

Sehubungan dengan masalah tersebut, Munawir Sjadzali mengatakan, bahwa ada keanehan Indonesia berkenaan dengan implementasi hukum Islam. Peradilan Agama telah berusia sangat lama, namun hakimnya tidak memiliki buku standar yang dapat dijadikan rujukan yang sama seperti halnya KUHP. Ini berakibat jika para hakim Agama menghadapi kasus yang harus diadili, maka

<sup>117</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 128.

<sup>118</sup> Masrain Basran, *Kompilasi Hukum Islam Mimbar Ulama*, No. 105, Tahun X, Mei 1986, hlm.8-9.

<sup>119</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 29.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rujukannya adalah berbagai kitab fikih tanpa suatu standarisasi atau keseragaman. Akibat lanjutannya secara praktis, kasus yang sama dapat lahir keputusan yang berbeda jika ditangani hakim yang berbeda.<sup>120</sup>

Berkenaan dengan masalah ini maka tampillah Busthanul Arifin. Beliau lahir di Payakumbuh, Hindia Belanda, 2 Juni 1929 dan meninggal di Jakarta, 22 April 2015 pada umur 85 tahun. Beliau adalah seorang pakar Hukum Islam, hakim, dan cendekiawan Indonesia. Ia pernah menjabat Ketua Muda Mahkamah Agung Indonesia dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perhimpunan Ahli Hukum Islam Asia Tenggara. Disamping beliau adalah guru besar di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), ia pernah menjabat Rektor di kampus tersebut, Busthanul juga dikenal sebagai salah seorang arsitek Kompilasi Hukum Islam (KHI). Beliau memberi gagasan perlunya membuat kompilasi Hukum Islam.

Gagasan-gagasannya didasari pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang Fikih akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
  - 1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*man anzala Allahu*)

<sup>120</sup> Lihat Munawir Sjadzali, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 2



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu (*tanfiziyah*) dan
- 3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.<sup>121</sup>

Gagasan Busthanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 25 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 tahun 1985 yang ditanda tangani di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.<sup>122</sup> Proyek yang didasarkan SKB ini kemudian dinamakan proyek “Pengembangan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” atau proyek “Kompilasi Hukum Islam”. Tujuan proyek ini adalah mengkompilasikan aturan hukum Islam yang mencakup wilayah muamalah dan yurisdiksi Peradilan Agama ke dalam tiga kitab: (a) Kitab Perkawinan, (b). Kitab Waris (c) Kitab Wakaf, Sadaqah, Hibah dan Baitul Mal.

Dengan lahirnya SKB<sup>123</sup> tersebut usaha selanjutnya adalah membentuk panitia dari proyek tersebut yang personil diambil dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Pada waktu itu terpilihlah Busthanul Arifin sebagai ketua dari proyek tersebut.<sup>65</sup> Setelah Busthanul Arifin membentuk kepanitiaan, maka beliau langsung memulai pelaksanaan penyusunan KHI itu dengan perencanaan dan pertimbangan yang matang.

<sup>121</sup> Masrain Basran, *Kompilasi Hukum Islam Mimbar Ulama*, No. 105, Tahun X, Mei 1986, h. 7- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 133.

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.135.

<sup>123</sup> Dasar Hukum dan alasan-alasan lain yang menjadi landasan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama adalah bahwa Peradilan Agama adalah salah satu dari lingkungan Peradilan yang merupakan kekuasaan Kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI, menurut ketentuan UUD 1945 Pasal 24 dan UU No. 14/1970 sebagai UU organiknya.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu kompilasi menurut Busthanul Arifin tidak mungkin berlaku hanya dibuat dan diberikan dari atas (Pemerintah, Mahkamah Agung) saja, tanpa keikutsertaan para ulama. Para ulama masih tetap memegang peranan menentukan dalam hal-hal keagamaan, karenanya dalam hal hukum Islam para ulama fiqh tetaplah memegang peranan yang menentukan, dan dalam perencanaan dan pelaksanaan KHI faktor ulama, umara, dan zuama haruslah benar-benar tergabung.<sup>124</sup>

Selain itu menurutnya masih ada beberapa faktor lain yang harus dipertimbangkan secara matang dan perencanaan dan pelaksanaan KHI. Faktor-faktor itu antara lain adalah: faktor sejarah hukum Islam, faktor psikologi umat Islam dan faktor kitab-kitab fiqh dari mazhab-mazhab yang memang merupakan amal dan jasa para ulama mujtahid dahulu, terakhir dipertimbangkan pula faktor putusan-putusan PA di Indonesia sejak masa paling awal, karena memang faktor ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Peradilan Agama telah ada sejak lebih dari seratus tahun yang lalu dan selama masa itu telah memberikan putusan-putusan hukum yang merupakan hukum yang hidup dan dihayati oleh kaum muslimin di Indonesia.<sup>125</sup>

Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum Islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum Islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan Hukum Islam di Indonesia. Sebagai Negara berdasarkan hukum yang berfalsafah pancasila, Negara melindungi agama dan penganutnya bahkan berusaha memasukkan hukum agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan

<sup>124</sup> Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. I, hlm. 58.

<sup>125</sup> *Ibid*



bernegara, sebagaimana pernyataan *the founding father* RI, Mohammad Hatta dalam dekrit presiden 5 Juli 1959.<sup>126</sup>

Setelah mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka penyusunan Kompilasi Hukum Islam ditempuh melalui empat jalur pengumpulan data.<sup>127</sup> Keempat jalur pengumpulan data dalam penyusunan KHI tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1 Jalur Kitab-Kitab Fikih

Jalur ini dimulai dengan menelaah atau mengkaji kitab-kitab fikih yang berpengaruh di Indonesia dan dunia Islam, yang selama itu juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim PA di Indonesia. Di samping itu disusun pula daftar-daftar pertanyaan mengenai 160 masalah di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah, yang nantinya akan diteliti dan dicatat jawaban serta penyelesaiannya oleh setiap kitab yang telah terdaftar itu. Hal ini tentu saja bukanlah pekerjaan ringan. Maka dari itu, Pemerintah dan Mahkamah Agung membuat kontrak kerja dengan ketujuh Institut Agama Islam Negeri (IAIN), khususnya dengan Fakultas Syari'ah IAIN yang bersangkutan. Ketujuh IAIN tersebut diberi tugas untuk membahas kitab fiqh yang berjumlah 18 buah dalam waktu 3 bulan, dimulai dari tanggal 7 Maret sampai dengan 21 Juni 1985 sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

<sup>126</sup> Amaran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam, serta Ekonomi Syari'ah*, (Kencana: 2016), Cet ke 2, hlm. 4-5.

<sup>127</sup> Empat jalur tersebut, yaitu: a. pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/pengkajian kitab-kitab. b. wawancara dilakukan dengan para ulama. c. lokakarya. Hasil-hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara diseminarkan lewat lokakaryanya. d. studi perbandingan untuk memperoleh system/kaidah-kaidah hukum/seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari Negara-negara Islam lainnya.



Perincian ketujuh IAIN yang ditunjuk untuk membahas kitab-kitab fikih tersebut sebagai berikut:

a. IAIN al-Raniri Banda Aceh:

- 1) Al-Bajuri
- 2) Fath al-Mu'in
- 3) Sharqawi 'ala al Tahrir
- 4) Mughni al-Muhtaj
- 5) Al-Sharqawi

b. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- 1) I'anah al-Thalibin
- 2) Targhib al-Mushtaq
- 3) Bulghat al-Salik
- 4) Tuhfah
- 5) Shamsuri fi al-Faraid
- 6) Al-Mudawwanah

c. IAIN Antasari Banjarmasin

- 1) Qalyubi/Mahalli
- 2) Fat al-Wahhab berikut Sharahnya
- 3) Bidayah al-Mujtahid
- 4) Al-'Umm
- 5) Bughyat al-Mustarshidin
- 6) Aqidah wa Shari'ah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





d. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- 1) Al-Muhalla
- 2) Al-Wajiz
- 3) Fat al-Qadir
- 4) Al-Fiqh al Madhahib al Arba'ah
- 5) Fiqh Sunnah

e. IAIN Sunan Ampel Surabaya

- 1) Kashf al-Qina
- 2) Majmu' atau Fatawi ibn Taimiyah
- 3) Qawanin Shar'iyyah Lisayyid Utsman bin Yahya
- 4) Al-Mughni
- 5) Al-Hidayah Sharh Bidayah Taimiyyah Muftadi

f. IAIN Alauddin Ujung Pandang

- 1) Qawanin Shar'iyyah Lisayyid Sudaqah Dakhlan
- 2) Nawab al-Jalil
- 3) Sharah ibn Abidin
- 4) Al-Muwatta'
- 5) Hashiah Syamsuddin Muhammad Irfan Dasuqi

g. IAIN Imam Bonjol Padang

- 1) Badai al-Sana'i
- 2) Tabyin al-Haqiq
- 3) Al-Fatawi al-Hindiyyah
- 4) Fath al-Qadir
- 5) Nihayah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Jalur Wawancara Dengan Ulama

Jalur kedua ini, dilaksanakan dengan mengumpulkan ulama-ulama yang mempunyai keahlian di bidang fikih Islam.<sup>128</sup> Agar seluruh ulama Indonesia ikut serta dalam proses wawancara ini, maka tempat wawancara diadakan di sepuluh daerah di Indonesia, yakni Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Kegiatan wawancara ini berakhir dalam bulan Oktober dan Nopember 1985.<sup>129</sup>

Untuk pelaksanaan wawancara dengan para ulama ini<sup>130</sup> panitia pusat telah sepakat untuk memakai dua cara; Pertama, dengan mempertemukan para ulama tersebut untuk diwawancarai secara bersamaan. Kedua, mewawancarai mereka dengan cara terpisah jika cara pertama tidak mungkin dilaksanakan. Pokok masalah yang diajukan dalam wawancara tersebut sudah disusun sistematis dalam sebuah buku yang berbentuk *questioner* yang berisi 102 masalah di bidang hukum keluarga.<sup>131</sup>

## 3. Jalur Yurisprudensi PA

Pelaksanaan jalur ini, dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan PA terhadap Putusan dan Fatwa Pengadilan Agama yang telah dihimpun

<sup>128</sup> Pelaksanaan wawancara dilakukan antara lain dengan tokoh-tokoh ulama yang dipilih, yang benar-benar diperkirakan berpengalaman cukup dan berwibawa dan diperhitungkan kelengkapan georafis dari jangkauan wibawanya. Wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan Tim Inti – Lihat Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 140.

<sup>129</sup> Abdurrahman, *loc.cit*, hlm. 38.

<sup>130</sup> Wawancara dengan ulama dimulai bulan September 1985 di Bandung, dengan mengumpulkan para ulama se-Jawa Barat dan DKI yang pembukaannya dilakukan oleh Menko Kesra, H. Alamsyah Ratuprawiranegara sebagai Menteri Agama a.i. dan dihadiri pula oleh Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung yang mewakili Bapak Ketua Mahkamah Agung. Selama 4 hari para ulama membahas dan memberikan kesimpulan pandangan hakim fikih mengenai masalah-masalah yang dikemukakan Panitia. Cara bekerja ulama di Bandung ini dijadikan teladan bagi 9 daerah lainnya – Lihat Busthanul Arifin, *Laporan Tentang Pelaksanaan KHI* (Makalah), hlm. 3-4.

<sup>131</sup> *Ibid*



dalam 16 buku.<sup>132</sup> Ke-16 buku tersebut terhimpun dalam himpunan dibawah ini:

- a. Himpunan Putusan PA/PTA 4 buku, yaitu 1976/1977, 1977/1978, 1978/1999 dan 1980/1981.
- b. Himpunan Fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980.1981.
- c. Yurisprudensi PA 5 buku yaitu, terbitan tahun 1977/1978, 1978.1979, 1981/1982, 1982.1983 dan 1983/1984.
- d. Law Report 4 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981.1982 dan 1982/1983.<sup>75</sup>

Jalur Yurisprudensi ini dianggap perlu karena putusan yang ditetapkan oleh PA beberapa waktu sebelumnya, masih sangat mungkin untuk diterapkan pada masa setelahnya. Maka dengan dipakainya jalur yurisprudensi ini, KHI tidak hanya merujuk pada kitab-kitab fikih melainkan juga bisa merujuk kepada putusan-putusan hakim terdahulu, pada waktu itu, penafsiran mereka dalam menjatuhkan suatu putusan dianggap sesuai dengan keadaan dan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Hakim perlu memperhatikan kesadaran hukum (Kadarkum) masyarakat berdasarkan UU No. 14/1970 pasal 20 ayat (1).<sup>133</sup>

<sup>132</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 142.

<sup>133</sup> UU No. 14/1970 pasal 20, ayat (1) tersebut berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Di samping landasan yuridis berdasarkan UU ini, dalam Fikih dan kaidah Fiqhiyah dikatakan, bahwa Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berubah dan ilmu Fikih itu sendiri selalu berkembang, karena menggunakan metode-metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode-metode itu ialah *Mashlahah Mursalah*, *Istihsan*, *Istishab* dan *'urf*. – Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.134.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### 4. Jalur Studi Perbandingan

Jalur ini ditempuh untuk mendapatkan dari negara-negara Islam yang menerapkan hukum Islam, seperti Maroko, Turki dan Mesir mengenai sistem peradilan dan masuknya hukum Islam ke dalam tata Hukum Nasional di negara-negara tersebut. Dan juga informasi mengenai sumber hukum dan hukum materil yang menjadi pegangan di bidang hukum keluarga (*al ahwal al- shakhsiyyah*) yang menyangkut kepentingan kaum muslimin.<sup>134</sup>

Namun demikian menurut Busthanul Arifin, titik berat studi ini justru diletakkan pada negara-negara tetangga, karena pasti akan lebih bermanfaat dikarenakan negara-negara itu banyak persamaannya dengan kita dalam sejarah masuk dan berkembangnya Islam serta dalam perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam.

Penyusunan KHI, selain digarap melalui empat jalur di atas juga mendapat dukungan dan masukan dari beberapa organisasi Islam. Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, misalnya pada tanggal 8-9 April 1986 bertempat di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menyelenggarakan “Seminar KHI” yang juga dihadiri oleh Menteri Agama dan Ketua MUI KH. Hasan Basri. Dalam seminar ini dibahas berbagai persoalan hukum, seperti perkawinan wanita hamil karena zina, masalah *li'an*, *syiqaq*, rujuk, taklik talak, pembagian warisan, harta bersama (gono-gini) dalam perkawinan dan penjualan harta wakaf.

Kemudian setelah mengolah hasil dari pengkajian kitab-kitab fikih, penelitian yurisprudensi, wawancara dengan para ulama dan studi banding,

<sup>134</sup> Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, hlm. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dirumuskanlah KHI tersebut ke dalam naskah rancangan KHI yang terbagi dalam 3 buku, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Waris dan Buku III tentang Hukum Wakaf.

Seluruh kegiatan dari pelaksanaan proyek penyusunan naskah KHI yang terdiri dari 3 buku tersebut yang dimulai pada tanggal 25 Maret 1985 sampai selesainya, memerlukan waktu selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember naskah tersebut oleh pimpinan proyek diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama.<sup>81</sup>

Naskah rancangan KHI yang telah diserahkan kepada Ketua MA dan Menteri Agama tersebut kemudian dilokakaryakan<sup>82</sup> untuk memperoleh komentar dan perbaikan dari para ulama dan cendekiawan muslim yang diundang sebagai wakil-wakil dari daerah penelitian/pengkajian dan wawancara.

Lokakarya yang berlangsung selama lima hari (2-6 Februari 1988) tersebut bertempat di Hotel Kartika Chandra dengan diikuti oleh 124 orang peserta. Dalam membahas permasalahan yang dilokakaryakan itu maka panitia membaginya ke dalam tiga komisi, yaitu:<sup>135</sup>

- a. Komisi I Bidang Hukum Perkawinan diketahui oleh Yahya Harahap, sekretaris Mahmuddin Kosasih dan narasumber Halim Muchammad dengan anggota sebanyak 42 orang.
- b. Komisi II Bidang Hukum Kewarisan diketaui oleh A. Wasit Aulawi dengan sekretaris Zainal Abidin Abu Bakar dan narasumber A. Azhar Basyir dengan anggota sebanyak 42 orang.

<sup>135</sup> Abdurrahman, *loc.cit*, hlm. 47



- c. Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketuai oleh Masrani Basrar, sekretaris A. Gani Abdullah dan narasumber Rahmat Jatnika, beranggotakan 29 orang.<sup>84</sup>

Hasil lokakarya sebagai naskah akhir KHI ini, kemudian diserahkan kepada Presiden RI. Tanpa menunggu waktu yang lama maka pada tanggal 10 Juni 1991 keluarlah Instruksi Presiden No. 1/1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan KHI.<sup>85</sup> Tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama menetapkannya melalui Keputusan Menteri Agama No. 54 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No.1/1991 tanggal 10 Juni 1991.<sup>86</sup> Dengan lahirnya Inpres No. 1/1991 serta Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 tersebut, akhirnya bangsa Indonesia mempunyai Kompilasi Hukum Islam sendiri dalam membantu para hakim di wilayah PA untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi, dengan harapan agar putusan yang diberikan seragam pada masalah yang sama. Upaya mengkompilasi Hukum Islam ini merupakan salah satu usaha yang sangat positif dalam pembinaan hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu sumber pembentukan Hukum Nasional.

### C. Pokok-Pokok Isi (Materi) KHI Dalam Bentuk Garis-garis Besar

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku hukum, yaitu:

1. Buku I Hukum Perkawinan, terdiri dari 19 Bab dan 170 Pasal (pasal 1 sampai dengan 170);
2. Buku II Hukum Kewarisan, terdiri dari 6 Bab dan 43 Pasal (pasal 171 sampai dengan 214);





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dan 12 Pasal (pasal 215 sampai dengan 228).

Dalam bentuk yang agak lebih terinci dapat digambarkan bahwa kandungan Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut:

I. Materi pokok yang terkandung dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan:

1. Penegasan dan Penjabaran terhadap U.U. No. 1 Tahun 1974 dan P.P. No. 9 Tahun 1975.
2. Mempertegas Landasan Filosofis Perkawinan (Pasal 2)
3. Mempertegas Landasan Idiil Perkawinan (Pasal 3)
4. Penegasan Landasan Yuridis (Pasal 4-7 dan 40)
5. Penjabaran Peminangan (Pasal 11-13)
6. Penguraian secara enumeratif rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14-29)
7. Pengaturan Tentang Mahar (Pasal 30-38)
8. Penghalusan dan Perluasan Larangan Kawin (Pasal 39-44)
9. Memperluas Ketentuan Perjanjian Kawin (Pasal 45-52)
10. Mendefinitifkan kebolehan kawin hamil (Pasal 53-54)
11. Tentang poligami tetap sama dengan U.U. No. 1 Tahun 1974 (Pasal 55-59)
12. Aturan Pencegahan Perkawinan (Pasal 60-69)
13. Aturan Pembatalan Perkawinan (Pasal 70-76)
14. Pelenturan makna "*arrijalu qawwam-na 'ala al-nisa*" (Pasal 77-84)
15. Perlembagaan harta bersama (Pasal 85-97)
16. Pengabsahan pembuahan anak secara teknologi (Pasal 98-106)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Kepastian pemeliharaan anak dalam perceraian (Pasal 98-106)
18. Perwalian diperluas (Pasal 107-112)
19. Pokok-pokok mengenai perceraian:
  - a. Adanya campur tangan pengadilan dalam perceraian (Pasal 115)
  - b. Penambahan alasan cerai (Pasal 116)
  - c. Lembaga tetap dipertahankan
  - d. Meningkatkan proses cerai talak menjadi contentiosa (Pasal 138)
  - e. Kepastian hukum atas rujuk (Pasal 167-169)

## II. Materi pokok yang terkandung dalam Buku II tentang hukum Kewarisan

1. Secara umum mirip dengan faraidh.
2. Tetap menempatkan status anak angkat diluar ahli waris dengan modifikasi melalui wasiat wajibah (Pasal 171 huruf h dan pasal 209 KHI)
3. Porsi anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi (Pasal 176)
4. Penertiban warisan yang diperoleh anak yang belum dewasa (Pasal 184)
5. Melembagakan plaatsvervulling secara modifikasi (Pasal 185)
6. Ayah angkat berhak 1/3 dari harta warisan sebagai “wasiat wajibah” (Pasal 209)
7. Penertiban dan penyeragaman hibah (Pasal 210 -214)

## III. Materi pokok yang terkandung dalam Buku III tentang Hukum Perwakafan.

1. Pokok-pokok materi umum.

Hukum perwakafan diatur dalam Buku III pasal 215-229 KHI

Ada beberapa pokok pikiran yang dapat dikatakan mengandung



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan dan pembaharuan hukum dibidang perwakafan, antara lain:

- a. Menyejajarkan dengan peraturan perwakafan dibidang pertanahan, yaitu P.P. No. 28 Tahun 1977 jo. Permendagri No. 6 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
- b. Menertibkan administrasi perwakafan (Pasal 215 – 219).
  - b.1. Pasal 215 ayat (6) dan (7) menjelaskan adanya fungsionaris Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)
  - b.2. Penertiban nazir melalui pendaftaran dan termasuk unsur-unsur wakaf (pasal 219):
  - b.3. Penertiban benda yang diwakafkan.
2. Pertanggungjawaban jelas (pasal 220).
3. Pelenturan benda dan tujuan wakaf (pasal 225).

#### D. Landasan Hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun atas prakarsa penguasa negara, yaitu Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI<sup>136</sup> melalui Surat Keputusan bersama No. 07/KMI/1985 tanggal 25 Maret 1985 yang ditanda tangani di Yogyakarta oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama<sup>137</sup> sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Menurut Yahya Harahap, tema utama penyusunan KHI adalah mempositifkan “hukum Islam di Indonesia”<sup>138</sup> yang dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dalam melaksanakan tugasnya, sehingga

<sup>136</sup> Pada saat itu Mahkamah Agung di ketuai oleh Ali Said dan Menteri Agama adalah Munawir Sjadzali.

<sup>137</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 142.

<sup>138</sup> Yahya Harahap, *Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Dalam Mimbar Hukum, No. 5 Tahun III, 1992, hlm. 25.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum, sebab untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan, baik oleh aparat penegak hukum, maupun oleh masyarakat. Dengan lahirnya KHI, semua hakim dilingkungan Peradilan Agama diarahkan ke dalam persepsi penegakkan hukum yang sama dan tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas.

Menurut Abdul Gani Abdullah, penyusunan hukum perkawinan dan hukum perwakafan dalam KHI didasarkan kepada beberapa perundang-undangan, seperti UU No. 22 Tahun 1946, UU No. 32 Tahun 1954, UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 28 tahun 1977.<sup>139</sup>

Di samping merujuk kepada perundang-undangan yang telah disebutkan, penyusunan KHI juga merujuk kepada pendapat para ulama, baik pendapat para ulama dalam berbagai kitab fikih, maupun pendapat para ulama yang tidak secara langsung dituangkan dalam kitab-kitab fikih yang sesuai dengan 'urf, atau adat istiadat masyarakat Indonesia.<sup>140</sup>

Dengan demikian, KHI menjadi penjelas dan pengurai bagi perundang-undangan yang telah ada dan menjadikan pendapat para ulama yang terdapat dalam berbagai kitab fikih, sebagai hukum positif, atau sebagai hukum Nasional di Indonesia untuk menjadi pedoman para hakim Peradilan Agama

<sup>139</sup> Lihat Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, Press, 1994), cet. I, hlm. 63.

<sup>140</sup> Kompilasi Hukum Islam adalah Fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Prof. T. M. Hasby Ash Siddiqy pernah mencetuskan, bahwa Fikih Indonesia sebelumnya mempunyai tipe Fikih Lokal semacam Fikih Hijazy, Fikih Misry, Fikih Hindy dan Fikih lain-lainnya yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat yang bukan berupa mazhab baru, tapi ia mempersatukan berbagai Fikih dalam menjawab satu persoalan Fikih. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Di dalam system Hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia – Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 134.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menetapkan hukum dari berbagai persoalan yang muncul berkenaan dengan masalah perkawinan, warisan dan wakaf. Dengan adanya KHI ini di Indonesia, tidak ada lagi ditemukan pluralisme keputusan Peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan para hakim di Peradilan Agama adalah sama.<sup>141</sup> setelah adanya KHI, fikih Islam yang selama ini tidak dipandang sebagai hukum positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif, atau sebagai hukum Nasional yang berlaku dan mengikat bagi seluruh umat Islam di Indonesia.<sup>142</sup> Dengan demikian, diharapkan bahwa KHI akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia, karena materi fikih Islam dalam KHI digali dari tradisi bangsa Indonesia, sehingga tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang hendak melaksanakan hukum Islam.

Meskipun KHI telah dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa dan memutus sengketa antara umat Islam di bidang perkawinan (Buku I), kewarisan (Buku II) dan wakaf (Buku III), akan tetapi secara yuridis kekuatan berlakunya masih lemah, karena hanya berdasarkan INPRES belum termasuk kedalam perundang-undangan yang ditetapkan MPRS No. XX/MPRS1966, TAP MPR No. III/MPR/2000. Ketetapan MPR, baik No. XX/MPRS/1960 jo. TAP MPR No. V/MPR / 1973 Jo TAP MPR No. III/MPR/2000, merupakan dasar hukum atas tata aturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum positif secara tertulis. Keberadaannya dapat memaksa dan mengikat pada setiap warga negara.

<sup>141</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *loc.cit*, hlm. 35.

<sup>142</sup> Fikih Islam menjadi Hukum Nasional berdasarkan instruksi Presiden Nomor I Tahun



Sedangkan INPRES adalah instrumen hukum yang absah dilakukan presiden dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah.<sup>143</sup>

Berhubung KHI baru berbentuk INPRES<sup>144</sup> dan materinya perlu disempurnakan, maka sejak era reformasi telah ada upaya untuk meningkatkan KHI menjadi RUU Hukum Materiil Peradilan Agama, agar statusnya lebih kuat dan dapat masuk dalam Lembaran Negara.

### E. Tujuan dan Fungsi Kompilasi Hukum Islam

Bila diikuti latar belakang historis pembentukan komplikasi hukum Islam, telah nampak beberapa sasaran pokok yang ingin dituju dan diwujudkan. Namun untuk jelasnya di bawah ini dikemukakan antara lain:

- a. Melengkapi prasarana Peradilan Agama dengan hukum materil (terapan). Peradilan baru berfungsi “menjalankan” kekuasaan kehakiman seperti yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945 jo. Pasal 10 U.U. No. 14 Tahun 1970 apabila memenuhi 3 sarana utama, yaitu: adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuatan Undang-Undang, adanya organ pelaksana, dan adanya sarana hukum sebagai rujukan.

<sup>143</sup> Jaenal Aripin, *Reformasi Hukum di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Peradilan Agama*, (Desertasi SPS UIN Jakarta, 1428 H/2007 M), hlm. 390-391.

<sup>144</sup> INPRES adalah instrumen hukum yang absah dilakukan Presiden dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa pada pihak yang diperintah, sebagaimana dikatakan oleh H.A.S. Natabaya, bahwa instruksi bukanlah jenis peraturan perundang-undangan, karena hanya mengikat secara intern suatu organisasi, kalau toh mengikat hanya terbatas pada orang atau instansi yang diberi instruksi. Dengan demikian, maka instruksi Menteri dan Instruksi Presiden tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan. Lihat: H.T.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), hlm. 117.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan keluarnya U.U. No.7 Tahun 1989 sebagai tindak lanjut dari pasal 10 U.U. No. 14 Tahun 1970, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama telah mantap dan mandiri, serta hukum acaranya pun telah pasti sebagaimana ditetapkan pasal 54 Bab IV U.U. No. 7 Tahun 1989. Begitu juga organisasi pelaksanaannya telah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarahnya yang panjang. Namun hukum materilnya yang akan dipergunakan dan diterapkan hanya sebagian saja yang sudah dikodifikasikan, yaitu tentang perkawinan dalam U.U. No. 1 Tahun 1974 jo. P.P. No. 9 Tahun 1975 dan tentang perwakafan tanah milik dalam P.P. No. 28 Tahun 1977, itupun masih bersifat umum. Padahal masih banyak lagi hal-hal yang dituntut syariat Islam yang belum diatur secara menyeluruh dalam Undang-undang dan Peraturan pemerintah tersebut. Konsekuensinya para hakim Peradilan Agama lari merujuk kepada doktrin yang tercantum dalam berbagai kitab fikih, sehingga terjadilah suasana praktek Peradilan Agama yang menampilkan dan mempertarungkan kitab fikih dan pendapat Imam Mazhab. Apalagi tentang masalah hukum hibah, sedekah, wasiat, kewarisan dan perwakafan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Agama bukan kendala berdasarkan hukum, tetapi keadilan berdasarkan doktrin fikih. Tidak ada rujukan hukum yang bersifat positif dan unifikatif, sehingga terjadilah putusan-putusan yang berdisparitas tinggi antara satu Pengadilan Agama dengan Pengadilan Agama lainnya, antara satu hakim dengan hakim lainnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Satu-satunya jalan yang harus segera dilakukan untuk melengkapi prasarana badan Peradilan Agama adalah melahirkan hukum positif yang bersifat kodifikatif dan unifikatif. Berdasarkan pengalaman historis dalam pembuatan U.U. No. 7 Tahun 1989 serta *konstelasi* badan pembuat Undang-undang yang ada, kiranya dipilih jalan pintas yang sederhana, efektif dan memenuhi persyaratan legalistik yang formil berupa Kompilasi Hukum Islam.

1. Menyamakan persepsi dan pandangan dalam penerapan Hukum Islam.

Dengan lahirnya kompilasi Hukum Islam, maka penegakan tata nilai hukum Islam dibidang perkawinan, warisan, hibah, shadaqoh dan wasiat, khususnya, telah bersifat positif dan pasti. Sehingga bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan didepan Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan maupun penasehat hukumnya, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim diseluruh nusantara.

Kompilasi Hukum Islam adalah satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas yang harus diterapkan hakim dilingkungan badan Peradilan Agama. Karena itu para hakim tidak dibenarkan membuat persepsi dan pandangan yang berbeda-beda dalam penerapan hukum Islam yang menjadi kewenangan sesuai dengan U.U. No. 7 Tahun 1989. Artinya Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## 2. Mendekatkan umat dengan hukum Islam.

Selama ini ada usaha dari orang-orang atau kelompok tertentu yang ingin menjauhkan umat Islam dari hukum Islam secara sistematis. Hal ini misalnya, muncul ungkapan yang seolah-olah mengidentikkan orang yang suka berbicara tentang hukum Islam dengan orang-orang yang berupaya mengembalikan berlakunya Piagam Jakarta, atau setidaknya dianggap fundamentalis dan fanatik agama Islam. Tidak jarang umat Islam merasa risih dan kikuk menyebut-nyebut apalagi mengkaji hukum Islam. Bahkan ada sementara tokoh-tokoh agama Islam itu sendiri merasa alergi terhadap sebutan hukum Islam. Oleh karena itu dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam akan menghilangkan perasaan-perasaan dan pandangan-pandangan tersebut.

## 3. Mengurangi sumber pertentangan diantara umat.

Masalah khilafiyah di dalam bidang *furu'iyah* memang dibenarkan agama. Bahkan adanya ayat-ayat *mutasyabihat* dalam al-Quran mengindikasikan hal itu. Karena itu masalah khilafiyah dikalangan para ilmunan tidak menjadi persoalan, bahkan dipandang salah satu dinamika hukum Islam. Lain halnya bagi penegak hukum di lingkungan Badan Peradilan Agama. Masalah khilafiyah dikalangan hakim akan membawa ketidakpastian hukum dan putusan yang berbeda-beda. Demikian juga bagi pencari keadilan. Di kalangan masyarakat awam masalah khilafiyah tidak jarang menjadi sumber dan mengundang pertikaian sesama umat Islam, bahkan dapat menjurus kepada pertentangan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan negara. Dengan kehadiran Kompilasi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Islam, khususnya dibidang hukum perkawinan, kewarisan, hibah, shadaqoh, wasiat dan perwakafan telah ada satu rujukan pandangan dalam menyelesaikan kasus-kasus dibidang bersangkutan.

4. Menyingkirkan pandangan bahwa pelaksanaan hukum Islam adalah masalah pribadi (*private affairs*).

Suatu kenyataan yang sukar dipungkiri bahwa dikalangan umat Islam masih banyak yang berpandangan bahwa pelaksanaan nilai-nilai dan norma hukum Islam ditengah-tengah masyarakat adalah dianggap sebagai masalah pribadinya dengan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan masyarakat atau pemerintah tidak perlu campur tangan. Ironisnya, pandangan yang demikian bukan hanya dilingkungan masyarakat kebanyakan, melainkan ada sementara tokoh agama dan ahli hukum yang malahan berpendapat bahwa persoalan tersebut sebagai masalah hak asasi. Seolah-olah mereka tidak dapat membedakan masalah ibadah *mahdah* dengan masalah muamalah dan masalah hak menganut agama dengan melaksanakan hukum agama dalam hubungannya dengan masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat menyentuh dan menggugah serta menyadarkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dalam hubungannya dengan masyarakat harus diatur oleh negara untuk terwujudnya kepastian hukum, dan ketertiban masyarakat serta keamanan negara. Kompilasi Hukum Islam yang disusun dan dirumuskan sebagai hukum Islam - dalam bidang-bidang tertentu – yang berbentuk positif dan *unifikatif* dipaksakan penerapannya kepada semua lapisan masyarakat Islam oleh alat kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin

Meminjam istilah yang dikemukakan M. Yahya Harahap “Kompilasi Hukum Islam yang sudah menjadi kereta api yang akan melintas setiap penyeberang yang tidak mematuhiya”.<sup>145</sup>

##### 5. Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam.

Fikih bukan hukum positif yang telah dirumuskan secara sistematis dan unifikatif. Fikih adalah kandungan ajaran atau ilmu hukum Islam. Itulah sebabnya fikih disebut doktrin hukum Islam. Kitab-kitab fikih bukan kitab hukum, tetapi merupakan kitab-kitab yang berisi pendapat atau hasil ijtihad para mujtahid. Oleh karena itu masyarakat Muslim Indonesia baru sekedar memiliki koleksi kitab-kitab fikih yang berisi abstraksi hukum Islam dan belum memiliki hukum Islam yang positif. Demikian pula Alquran dan Sunnah telah dikenal dan dimiliki umat Islam Indonesia, tetapi bukan berarti telah mempunyai hukum Islam positif, sebagaimana kata Fazlur Rahman<sup>146</sup> al-Quran dan Sunnah Nabi bukanlah kitab undang-undang, melainkan kitab yang berisi ajaran-ajaran dan petunjuk Allah untuk kepentingan umat manusia. Kandungan al-Quran masih merupakan aturan

<sup>145</sup> Yahya Harahap, “Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Dadan Muttaqien, (Ed.), (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 78. Lihat juga Matardi: “Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama” dalam Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 24 Tahun VII, 1996, hlm. 29-30. Bandingkan dengan M. Yahya Harahap, “Tujuan Kompilasi Hukum Islam” dalam IAIN Syarif Hidayatullah “*Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*”, (Jakarta: Hikmat Syahid Indah, 1988), hlm. 91, yang menyebut tujuan KHI di Indonesia adalah:

- a. untuk merumuskan secara sistematis hukum Islam di Indonesia secara konkrit,
- b. guna dijadikan sebagai landasan penerapan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama,
- c. dari sifat kompilasi, berwawasan nasional (bersifat supra subkultural, aliran atau madzhab) yang akan diperlakukan bagi seluruh masyarakat Islam Indonesia, apabila timbul sengketa di depan sidang Peradilan Agama (kalau di luar proses peradilan, tentu bebas menentukan pilihan dari sumber kitab fikih yang ada).
- d. serta sekaligus akan dapat terbina penegakan kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan lalu lintas masyarakat Islam.

<sup>146</sup> John J. Donohur – John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah-Masalah*, (Terj. Machnun Husein), (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 496.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“yang setengah jadi atau *quasi laws*” dan tidak berarti harus ditetapkan secara harfiah begitu juga pada segala zaman dan suasana.

Berdasarkan paparan di atas, kehadiran KHI bertujuan sebagai upaya mempositifkan abstraksi hukum Islam sebagai salah satu sistem tata hukum yang diakui keberadaan dan hak hidupnya di Indonesia.

#### 6. Upaya Pembaharuan Hukum Islam.

Sebagaimana telah diuraikan pada sebelumnya bahwa ada tiga belas kitab fikih yang menjadi rujukan Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang semuanya bermazhab Syafi'i, sementara masyarakat terus berubah dan kasus-kasus yang terjadi pun mengalami perubahan, dimana penyelesaian dengan berdasarkan doktrin tiga belas kitab fikih itu terasa kurang adil oleh masyarakat. Oleh karena itu, dalam proyek penyusunan KHI ditambah beberapa kitab fikih dari berbagai mazhab serta studi banding dengan negara-negara muslim lain, untuk memperkaya doktrin fikih yang disingkat menjadi norma hukum dan dimasukkan ke dalam KHI.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa dalam fikih tradisional tidak ditemukan keharusan pencatatan perkawinan, tidak dibatasi usia kawin, poligami secara bebas dan tidak dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, tidak dikenal ahli waris pengganti, penganiayaan berat dan fitnah yang dihukum lima tahun penjara tidak menjadi penghalang kewarisan, tidak dikenal wasiat wajibah antara anak dan bapak angkat, nazir tidak menjadi syarat sahnya wakaf, dan lain-lain. Padahal tuntutan perasaan keadilan masyarakat membutuhkan kebalikan dari doktrin fikih tradisional tersebut, sesuai dengan kemaslahatan masyarakat kontemporer. Artinya,





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

demikian ketertiban perkawinan umat Islam dibutuhkan pencatatan perkawinan, perlu pembatasan usia kawin untuk keutuhan dan kematangan berkeluarga, perlu persyaratan yang ketat berpoligami untuk menghindari poligami yang tidak bertanggung jawab, cucu yang ayahnya meninggal lebih dahulu dari kakek perlu dilindungi kehidupannya dengan menetapkan ahli waris pengganti, penganiaya berat dan fitnah yang dilakukan kepada pewaris perlu ditetapkan sebagai penghalang kewarisan sehingga ahli waris tidak melakukan hal-hal yang buruk kepada pewaris hanya karena ingin segera memperoleh warisan, kasih sayang antara anak dengan bapak angkat perlu dilestarikan dengan memberikan sebagian harta warisan lewat wasiat wajibah, dan nazir perlu dilibatkan dalam setiap wakaf untuk menjaga keseimbangan benda-benda wakaf.

Tuntutan dan perasaan keadilan masyarakat itulah antara lain yang ditambah dan dimasukkan ke dalam materi KHI sebagai norma hukum Islam. Oleh karena itu, KHI selain bentuknya, materinya juga sebagai upaya pembaharuan hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Busthanul Arifin<sup>147</sup> yang disampaikan dalam pidato laporannya sebagai Ketua Proyek KHI di Departemen Agama, antara lain menyatakan bahwa tiga buku rancangan hasil proyek itu tidak saja merupakan reaktualisasi melainkan mencerminkan reformasi hukum Islam.

Sedangkan Fungsi Kompilasi Hukum Islam itu secara tegas tidak dijumpai dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Juga tidak dijumpai bahwa KHI

<sup>147</sup> Munawir Sjadzali, "Relevansi Hukum Keluarga Islam dengan Kebutuhan Masa Kini", dalam Amrullah Ahmad, dkk., (Editor), *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 224.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

itu merupakan lampiran dari Inpres No. 1 Tahun 1991 sebagaimana lazimnya Inpres serupa, sehingga ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Inpres yang bersangkutan, sehingga tidak ada penunjukan teks resmi dari KHI yang harus disebarluaskan.

Tetapi dalam konsiderans huruf b Inpres No. 1 Tahun 1991, dengan tegas dinyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam dapat digunakan sebagai pedoman oleh instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Didalam konsiderans tersebut tidak ditemukan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan “pedoman”, akan tetapi dari susunan kata atau kalimat “dapat digunakan sebagai pedoman” dapat menumbuhkan kesan bahwa pihak instansi Pemerintah dapat memakainya dan dapat pula tidak memakainya. Hal ini, tentu saja tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan pada latar belakang penetapan KHI ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman bagi instansi Pemerintah, yang menurut hemat penulis secara implisit instansi yang dimaksudkan antara lain adalah lembaga-lembaga atau badan-badan Peradilan Agama yang menurut UU No. 7 Tahun 1989 memiliki kewenangan, antara lain dalam bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Sebagai pedoman, ia tidak hanya harus diperhatikan, tetapi juga menurut hemat penulis mempunyai kekuatan mengikat bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia sejak tingkat pertama, banding sampai kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kompilasi Hukum Islam merupakan pula pedoman yang harus diperhatikan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Oleh karena itu KHI juga mengikat masyarakat yang bersangkutan.

Demikian juga dalam Keputusan Menteri Agama tanggal 22 Juli 1991 Nomor: 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 pada diktum kedua yang berkaitan dengan fungsi KHI ini ditemukan kalimat “sedapat mungkin”, menurut penulis mempunyai kaitan langsung dan cukup erat dengan kata-kata “dapat digunakan” dalam Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 itu, bukan dalam arti KHI hanya dipakai kalau keadaan memungkinkan, akan tetapi merupakan anjuran yang mengikat bagi Instansi Pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang terjadi dikalangan umat Islam.

Dilihat dari sudut hukum materil, Kompilasi Hukum Islam itu dapat pula berfungsi sebagai hukum materil Islam dalam bidang-bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Keputusan Menteri Agama tersebut pada diktum kedua: "...sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping Peraturan Perundang-undangan lainnya" menunjukkan adanya kesederajatan KHI dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan perkawinan dan perwakafan yang sekarang berlaku, yaitu U.U. No. 1 Tahun 1974 jo. P.P. No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan dan P.P. No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketentuan dalam U.U. No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, serta P.P. No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004 harus dipandang sebagai ketentuan yang bersifat umum sedangkan KHI sebagai ketentuan khusus.

Dilihat dari segi unifikasi hukum, Kompilasi Hukum Islam dapat pula berfungsi sebagai suatu kitab hukum yang mengakhiri berbagai ragam sumber hukum Islam yang diterapkan selama ini di lingkungan Peradilan Agama, yang berasal dari tidak kurang 13 buah kitab fikih dari mazhab Syafi'i. Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para hakim Peradilan Agama dapat dengan mudah dan sangat praktis merujuk kepadanya.

Seperti diketahui bahwa kebanyakan masyarakat Islam sangat awam dalam masalah hukum Islam dan membaca “kitab kuning yang berbahasa Arab Gundul” yang didalamnya banyak menjelaskan mengenai Hukum Islam.

Disamping itu, pendekatan yang digunakan melalui “kitab-kitab kuning” itu yang ditulis kebanyakan ribuan tahun yang lalu, mungkin sudah banyak yang tidak atau kurang relevan untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul masa sekarang. Dilihat dari sudut ini, maka Kompilasi Hukum Islam dapat pula dipandang sebagai salah satu alat rekayasa dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dalam era reformasi sekarang.



## F. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem Hukum Nasional Indonesia secara garis besar telah dituangkan dalam pembukaan, batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan merupakan “cita hukum” yang menguasai hukum dasar negara. Selain itu, pokok-pokok pikiran itu juga merupakan norma fundamental negara. Wujud pokok-pokok pikiran dalam pembukaan itu dijelaskan juga, yang isinya tidak lain adalah Pancasila.

Disamping itu, penjelasan umum UUD 1945 juga mengemukakan bahwa UUD ialah hukum dasar yang tertulis, sedangkan disamping UUD berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, berupa aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

Dalam penjelasan itu ditegaskan bahwa negara Republik Indonesia mengakui dua jenis hukum dasar: yang tertulis disebut Undang-Undang Dasar, dan yang tidak tertulis biasanya disebut konvensi ketatanegaraan (*constitutional convention*). Adapun subsistem norma hukum dibawah norma fundamental negara dan norma aturan dasar negara (Batang Tubuh UUD 1945) tidak dijelaskan. Namun pada Aturan Peralihan Pasal II yang berbunyi: “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Dalam bidang perundang-undangan, hal ini jelas menunjukkan bahwa berbagai peraturan Hindia Belanda masih “langsung berlaku” selama peraturan-peraturan itu belum diganti dengan yang baru dan dibentuk menurut UUD 1945. Sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregering* (I.S.) yang menjelaskan bahwa bagi golongan Eropa berlaku hukum perdata dan dagang yang sifatnya tertulis, sedang bagi golongan Bumi Putra berlaku hukum adatnya, tentunya hukum agama Islam bagi orang Islam. Namun perlu dicatat bahwa ada keutamaan hukum tertulis ketimbang hukum tidak tertulis. Hal ini terlihat ketika para penyusun Rancangan UUD 1945 mengubah sebutan konstitusi yang sedang dirancang dari “hukum dasar” menjadi “UUD” atau dengan perkataan lain, dari konstitusi tidak tertulis menjadi konstitusi tertulis. Alasan lain, Penjelasan Umum UUD 1945 ada kalimat yang menyatakan: “..sedang disampingnya UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis.” Dapat disimpulkan bahwa hukum dasar tidak tertulis bersifat “melengkapi” hukum dasar tertulis, yaitu UUD 1945. Dan secara analogi dapat disimpulkan lebih lanjut bahwa; apabila terjadi “persaingan” antara Undang-Undang dan hukum adat atau hukum kebiasaan lainnya, maka yang disebut pertama memperoleh “keutamaan”.<sup>148</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan beberapa jenis Peraturan Perundang-undangan, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 dan penelitian A. Hamid S. Attamimi,<sup>149</sup> jenis

<sup>148</sup> A. Hamid S. Attamimi, *loc.cit*, hlm. 150-151.

<sup>149</sup> *Ibid*, hlm. 152. Bandingkan dengan Kansil, yang mengatakan “jika kita memperhatikan kepada praktek kenegaraan, maka dijumpai berbagai jenis peraturan perundangan, yaitu:

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Undang-Undang Dasar 1945.                                     | 7. Instruksi Presiden.           |
| 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.                     | 8. Peraturan Menteri.            |
| 3. Keputusan MPR.  | 9. Keputusan Menteri.            |
| 4. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. | 10. Instruksi Menteri            |
| 5. Peraturan Pemerintah.   | 11. Keputusan Direktur Jenderal. |
| 6. Keputusan Presiden.   | 12. Instruksi Direktur Jenderal. |
| 13. Keputusan Direktur.  | 18. Peraturan Daerah Tingkat II. |





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-undangan negara Republik Indonesia dewasa ini ialah berturut-turut dan berjenjang dari atas ke bawah, sebagai berikut:

1. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang disetingkatkan dengan Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah.
3. Keputusan Presiden.
4. Keputusan Menteri.
5. Keputusan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen.
6. Keputusan Direktorat Jenderal Departemen.
7. Keputusan Badan Negara.
8. Peraturan Daerah Tingkat I.
9. Keputusan Gubernur / Kepala Daerah Tingkat I.
10. Peraturan Daerah Tingkat II.
11. Keputusan Bupati dan Walikota Kepala daerah Tingkat II.

Selanjutnya dikatakan,<sup>150</sup> bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan ketentuan Hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur dan penyebarluasannya diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991. Dalam kajian Hukum Tata Negara Republik Indonesia, meskipun Kompilasi Hukum Islam dituliskan, dibagi dalam “buku”, “bab”, “bagian”, “pasal”, dan “ayat”, yang menyerupai batang tubuh Peraturan

14 Keputusan Departemen di Daerah.  
 15 Peraturan Daerah Tingkat I.  
 16 Keputusan Gubernur K.D.H.  
 17 Instruksi Gubernur K.D.H.

19. Keputusan Bupati / Walikota K.D.H.  
 20. Instruksi Bupati.  
 21. Pengumuman.  
 22. Surat Edaran.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 152-155.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-undangan ini, ia bukanlah Peraturan Perundang-undangan, bukan hukum “tertulis” meskipun ia dituliskan, bukan Undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden, dan seterusnya. Kompilasi Hukum Islam adalah “hukum tidak tertulis” yang hidup secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar rakyat Indonesia yang beragama Islam.

Inpres yang menjadi dasar hukum pemberlakuannya, ternyata setelah diteliti bukanlah merupakan sumber hukum formil dalam hukum Tata Negara Republik Indonesia dan tidak ditemukan tempatnya di dalam Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penerapan dan pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam adalah lebih bersifat motivasi keagamaan ketimbang yuridis formil.

Selanjutnya dikemukakan perbedaan fungsi Peraturan Perundang-undangan, semisal Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan lain-lain dengan fungsi Instruksi Presiden. Sebuah Peraturan Perundang-undangan berfungsi menetapkan norma/kaidah hukum atau mencabut/menghapuskannya. Fungsi tersebut berlaku bagi semua norma dengan berbagai *adresat*, baik yang bersifat umum dan hal yang diaturnya abstrak (umum-abstrak) ataupun umum konkrit, individual abstrak dan individual konkrit. Sementara itu sebuah instruksi mengandung norma hukum selalu bersifat individual konkrit. Dengan demikian, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 berisi norma dengan *adresat* individual (ditujukan kepada Menteri Agama) dan dengan perbuatan yang bersifat konkrit. Di samping itu, instruksi hanya dapat berlangsung jika antara yang memberi instruksi dan menerima instruksi terdapat hubungan organisasi.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Haiman Riau

Kemudian Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dikritik dan dipertanyakan: norma manakah yang dimaksud oleh Keputusan Menteri Agama tersebut, padahal ia didahului oleh Instruksi Presiden? Akibatnya kedudukan Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak jelas, apakah dia berlaku secara umum-abstrak, atau umum-konkrit, juga apakah individual abstrak atau individual konkrit?

Demikian juga halnya bila dianalisis isinya, Keputusan Menteri Agama tersebut sama dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang mengandung norma hukum individual-konkrit, yaitu berlaku khusus di jajaran Departemen Agama untuk menyebarluaskan dan menerapkan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, seharusnya bukan Keputusan Menteri Agama tetapi Instruksi Menteri Agama. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Prof. DR. H. Moh. Koesnoe, S.H.<sup>151</sup> dengan membuat perbandingan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Kompilasi Hukum Adat.

Dalam lingkungan kajian hukum adat dikenal kompilasi *Pandecten van Het Adatrecht* yang dikerjakan oleh van Vollenhoven dengan komisi yang dipimpinnya sendiri. Isinya merupakan gambaran hukum adat yang sangat *summier* (ringkas), kalau ingin mengetahui detailnya yang bersangkutan harus mencari di dalam buku atau bahan pengetahuan lain yang membahas khusus tentang hal tersebut. Kompilasi tersebut, sangat besar arti dan pengaruhnya untuk pemikiran ataupun menentukan kebijakan pemerintah. Namun demikian,

<sup>151</sup> Moh. Koesnoe, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Jakarta: Majalah Hukum Tahun XI No. 122 Nopember 1995, hlm. 144-157.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengambil keputusan resmi, apa yang dimuat dalam kompilasi tersebut, “secara yuridis tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum”.

Kompilasi lain dalam lingkungan kajian hukum adat ialah *Adatwet boekje voor heel Indonesia* yang disusun juga oleh van Vollenhoven. Kompilasi ini berisi kumpulan bagian-bagian atau dari peraturan perundangan tertulis. Jadi bagian dari pasal-pasal tertentu Peraturan Pemerintah kabinet waktu itu, khususnya berlakunya hukum adat bagi golongan pribumi. Dijelaskan *staatsblad* mana asalnya pasal-pasal yang dikutip tersebut. Namun kompilasi tersebut tidak dapat merupakan buku kodifikasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Tetapi kekuatan mengikat dari isi kompilasi tersebut sama dengan undang-undang. Bukan karena kompilasinya, tetapi karena isi yang dikompilir tersebut, merupakan Peraturan Perundang-undangan resmi, maka kekuatan berlakunya dipandang sama dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Melihat proses yang ditempuh sampai adanya KHI tersebut, dapat dikatakan bahwa kompilasi ini adalah usaha dari pemerintah. Akan tetapi hasil dari usaha resmi itu bukan suatu produk resmi dari badan pemerintah yang berhak membuat peraturan. Hasil tersebut hanya merupakan hasil kajian yang digerakkan oleh badan-badan resmi pemerintah. Oleh karena itu, kompilasi tersebut adalah suatu kumpulan dari seminar para pakar terhadap karya tim yang dibentuk oleh pemerintah. Sesungguhnya sifat-sifat yang harus dimiliki suatu kompilasi tidak ditemukan pada KHI tersebut. Ia pada intinya “bukan kompilasi”, tetapi adalah suatu pendapat yaitu pendapat para pakar yang ikut dalam seminar itu. Ia tidak dapat mengikat masyarakat, bahkan tidak dapat



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat para pengikut seminar tersebut. Kemudian hasil seminar ini didukung oleh Inpres No. 1 Tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskannya kepada instansi pemerintah dan masyarakat serta ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 yang isinya sama dengan Instruksi Presiden tersebut diatas.

Menurut Koesnoe,<sup>152</sup> penyebaran tersebut tidak jelas pengertiannya, apakah pemasaran dalam arti komersial terutama yang ditujukan kepada masyarakat. Karena hasil kompilasi perorangan penyebarannya dikaitkan dengan perhitungan komersial. Selain itu, disoroti juga model penyajian KHI dan bahasa yang digunakan, karena mirip dengan model draft atau rancangan suatu Undang-undang terlebih lagi dengan model kodifikasi hukum. Menyoroti masalah yuridis formil KHI dikatakan harus sepenuhnya mengikuti tatanan formal tata hukum negara R.I. yaitu Pancasila, UUD 1945 dan seterusnya. Instruksi Presiden harus didasar kepada Peraturan Pemerintah, disamping cara kerjanya terbatas dalam lingkungan intern dalam hubungan atasan terhadap bawahannya. Oleh karena itu Instruksi Presiden secara yuridis formil tidak termasuk dalam tata Perundang-undangan negara R.I.

Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 isinya sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, kecuali pada butir kedua: sedapat mungkin menerapkan KHI tersebut disamping Peraturan Perundang-undangan lainnya dipandang melebihi Instruksi Presiden, karena itu Keputusan Menteri Agama tersebut tidak mempunyai dasar dan sandaran dari Instruksi Presiden. Selain itu keputusan Menteri Agama itu juga terkesan ditempatkan sederajat

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 158



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya, padahal ia tidak punya tempat dalam Peraturan Perundang-undangan. Jadi butir kedua Keputusan Menteri tersebut secara yuridis formil tidak mempunyai tempat didalam sistem hukum nasional Indonesia.

Bila dilihat dari segi “yuridis substansial” atau “yuridis materil” yang dalam hukum positif diakui hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, maka kedudukan KHI baru ditingkat adanya kesamaan pendapat para ahli (ijmak para peserta seminar) yang dalam teori ilmu hukum disebut *communis opinio doctorum* (pandangan bersama para ahlinya), yang kualitasnya “belum dapat dikatakan sebagai suatu hukum tidak tertulis” menurut tata hukum nasional. Baru dapat dikatakan KHI sebagai “hukum tidak tertulis” harus melampaui beberapa tingkatan lagi, yaitu: dari *communis opinio doctorum* menjadi *communis opinio* (pandangan bersama masyarakat Islam di Indonesia), baru dari *communis opinio* menjadi “kesadaran normatif masyarakat Islam” yang dalam teori ilmu hukum disebut *communis opinio necessitatis*. Bila sampai ditingkat ini, maka isi KHI sah menjadi “hukum tidak tertulis” dan KHI menjadi “buku hukum – bukan kodifikasi– yang berpengaruh” (*book of authority*).

Kesimpulan pandangan Koesnoe terhadap KHI dilihat dari segi yuridis formil dan yuridis materil dalam hukum tatanegara Republik Indonesia, tidaklah termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan hukum positif nasional, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. KHI baru dipandang sekedar kesepakatan pendapat para ahli hukum dan ulama yang hadir dalam seminar / lokakarya pada tanggal 2-6 Februari 1988.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berbeda dengan dua orang pakar diatas, dalam melakukan analisis instrumen Inpres dalam Tata Hukum di Indonesia berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 Jo. TAP MPR No. V/MPR/1973 dan dihubungkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan praktek kenegaraan, yang memasukkan Inpres dalam jenis peraturan perundangan,<sup>153</sup> Muhammad Ridhwan Indra menyatakan bahwa Perundang-undangan di negara Indonesia yang harus di patuhi oleh seluruh rakyat Indonesia bukan hanya terdiri dari undang-undang saja, tetapi juga Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden dan lain-lain yang pembentukannya tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>154</sup>

Dengan melihat kepada praktek kenegaraan yang telah dijalankan dan didukung oleh kedudukan, kekuasaan dan kewenangan Presiden dalam Undang- Undang Dasar 1945, maka instrumen Instruksi Presiden (Inpres) sebagai landasan hukum masyarakat, KHI masih berada dalam lingkungan tata tertib dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu, KHI dipandang mempunyai landasan yuridis formil dalam tata hukum Indonesia. Oleh karena itu, Ismail Sunny<sup>155</sup> mengemukakan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 didasarkan kepada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara. Apalagi di bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi umat Islam telah ditetapkan oleh undang-undang bahwa yang berlaku adalah hukum Islam. Maka

<sup>153</sup> A. Hamid S. Attamimi, *op. cit*, hlm. 152-155.

<sup>154</sup> Muhammad Ridhwan Indra, *Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 Sangat Besar*, (Jakarta: Masagung, 1990), Edisi 2, cet. I, hlm. 7.

<sup>155</sup> Ismail Sunny, "Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun II-1991, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1991), hlm. 1-4.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam dapat ditetapkan oleh Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden dan kedudukan hukumnya adalah sama.

Hal senada dengan itu, Abdurrahman<sup>156</sup> menilai bahwa redaksi poin kedua konsiderans Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam “.....dapat dipergunakan sebagai pedoman.....” dipandang kurang mampu mengemban aspirasinya, karena redaksi ini tidak memaksa, dan sifatnya bukan mesti. Oleh karena itu, dia berpendapat bahwa redaksi ini harus “dipahami” sebagai tuntutan atau petunjuk yang harus dipakai, baik oleh Pengadilan Agama, maupun oleh warga masyarakat dalam menyelesaikan sengketa mereka.

Kata kunci dari Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden tersebut adalah pada konsideran kedua, “.....sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping Peraturan Perundang-undangan lainnya, menunjukkan adanya kesederajatan KHI dengan Peraturan Pemerintah lainnya. Dengan demikian terlihat adanya keharusan melaksanakan KHI sebagaimana keharusan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam bukan hanya sebagai suatu aturan hukum yang harus dipedomani oleh para hakim Pengadilan Agama, tapi lebih dari itu, sesuatu yang harus dikembangkan dan dilengkapi dengan yurisprudensi yang dibuatnya sendiri. Dengan demikian, KHI yang didasarkan kepada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 memenuhi syarat yuridis formil menurut hukum tata negara Republik Indonesia sebagai hukum positif tertulis. Oleh karena itu

<sup>156</sup> Abdurrahman, *loc.cit*, hlm. 55-58.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikat instansi pemerintah (Peradilan Agama) dan umat Islam, dan mereka diharuskan menerapkan isi KHI itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Dalam mengkritisi pendapat Attamimi dan disertasinya, Abdul Gani Abdullah,<sup>157</sup> mengemukakan bahwa sebenarnya yang menjadi peluang dan memungkinkan salah satu instrumen di bawah peraturan pemerintah dapat mengangkat *the ideal law* yang hidup dalam masyarakat kepada sistem formil adalah masing-masing instrumen seperti yang dikemukakan Attamimi di atas dapat berlaku efektif sekalipun tidak menuntut instrumen organik di bawahnya.

Fenomena Perundang-undangan Indonesia memberi sinyal penganut tata urutan demikian secara tidak ketat sehingga memandang keberadaan hukum itu bukan hanya yang tercantum dalam keseluruhan instrumen norma tadi, tetapi juga menempatkan pengaruh teori *Rechts Vinding* yang turut menunjuk mana yang menjadi saat berjumpa dengan yurisprudensi atau pendapat hukum.

Terpilihnya Inpres sebagai instrumen dalam menetapkan KHI membawa hal yang dilematis dalam pandangan tata hukum nasional; satu sisi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri untuk berlaku efektif di samping instrumen hukum lainnya dan karenanya memiliki daya atur dalam hukum positif nasional; dan dari segi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen dalam tata urutan peraturan perundangan. Sekalipun demikian, KHI yang ditetapkan berdasarkan Inpres termasuk lingkup makna organik Pasal 4 ayat (1) UUD

1945

<sup>157</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 58-62.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari beberapa pendapat para pakar hukum yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan KHI yang ditetapkan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juni 1991 dilihat dari teori hukum Perundang-undangan nasional, menjadi tiga pandangan:

1. Kompilasi Hukum Islam secara yuridis formil tidak mempunyai landasan hukum karena tidak termasuk dalam rangkaian tata aturan Perundang-undangan nasional. Ia hanya karya perorangan, bukan merupakan peraturan resmi yang keluar dari instansi pemerintah yang berwenang membentuk suatu aturan tertulis. Dan bila dilihat dari segi yuridis materil (*substansie*), Kompilasi Hukum Islam belum dapat dikatakan sebagai suatu hukum tidak tertulis menurut tata hukum nasional. Pokoknya Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis menurut hukum tata negara Republik Indonesia.

Kritik penulis terhadap pandangan ini seolah-olah mengabaikan substansi dari isi Kompilasi Hukum Islam itu sendiri. Sebab hukum Islam di Indonesia tidak diakui secara hukum berlaku bagi umat Islam dengan lahirnya UU No. 1 Tahun 1974. Ketika itu, Prof. Mahadi telah memberikan komentar bahwa dengan lahirnya UU No.1 Tahun 1974 telah sampailah ajal teori *receptie*. Artinya hukum Islam yang dimuat dalam KHI itu adalah hukum Islam yang selama ini diamalkan dan berlaku bagi umat Islam, cuma berserakan di dalam kitab-kitab fikih dan yurisprudensi peradilannya. Meskipun diakui bahwa ada beberapa masalah yang memang tidak terbiasa diamalkan di tengah-tengah masyarakat, seperti



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penggantian tempat (*plaatsvervulling*), wasiat wajibah antara anak dan bapak angkat, hibah dibatasi sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang dimiliki, dan lain-lain, tetapi masih ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu, kalau KHI tidak diakui sebagai hukum tidak tertulis menurut sistem hukum nasional, karena hanya merupakan kesepakatan segelintir orang yang ikut dalam seminar tersebut, barangkali yang dilihat terbatas pada proses lahirnya KHI tanpa melihat substansi yang terkandung di dalamnya. Atau pandangan ini masih menganut teori *receptie*, yang mengatakan bahwa hukum Islam dianggap hukum apabila telah diterima menjadi hukum adat. Tentunya teori ini tidak dapat diterima, terutama di masa sekarang. Penulis jelas tidak sependapat dengan pandangan seperti ini.

2. KHI dipandang sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis.

Kritik penulis terhadap pandangan ini terletak pada pengabaian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusunan KHI, terutama Buku I dan III, yang terdiri dari UU. Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU. Nomor 32 Tahun 1954, UU. Nomor 1 Tahun 1974 jo. P.P. Nomor 9 Tahun 1975 dan P.P. Nomor 28 Tahun 1977. Sumber-sumber tersebut yang justru mengakrabkan KHI menjadi hukum tertulis. Buku II juga cenderung mendukung pendapat ini karena dalam kenyataannya ia juga disusun dengan mengambil kaidah hukum dari yurisprudensi Peradilan Agama.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. KHI dipandang sebagai hukum tertulis, karena sumber yang ditunjukkan pada angka 2 diatas menunjukkan KHI berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Inpres No. 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu produk *political power* yang mengalirkan KHI dalam jajaran *law*. Pada akhirnya masyarakat pemakai KHI yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis. Kehadirannya secara formil melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti yang dimaksud oleh *the living law* daripada sekedar mengklaim adanya *the ideal law* tanpa akhir.

Kritik penulis pada pandangan ini terletak dalam tata cara mengalirkan KHI dalam jajaran *law* dengan Inpres sebagai produk *political power* yang nyatanya dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan hukum nasional tidak termasuk. Jadi secara teori hukum, Inpres tidak dapat diterima sebagai sumber hukum, meskipun dalam praktek nampaknya dipatuhi masyarakat.

Penulis berpendapat bahwa KHI bukanlah hukum positif, dalam arti hukum tertulis, dimana semua instansi pemerintah dan masyarakat terikat dengan aturannya dan wajib melaksanakannya, menurut sistem hukum nasional Indonesia, akan tetapi KHI bernilai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia, dan instansi pemerintah yang bersangkutan paut dengannya. Mereka terikat dan harus melaksanakannya mengingat latar belakang dan tujuan melahirkan KHI itu. Oleh sebab itu, penulis





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyarankan kepada yang berwenang menetapkan hukum, agar KHI ditingkatkan status hukumnya menjadi Undang-Undang, minimal termasuk di dalam urutan Perundang-undangan nasional, tanpa takut dituduh menghidupkan “Piagam Jakarta”. Penulis tidak sependapat dengan Attamimi yang memandang penyebaran KHI dilakukan dengan Inpres bukan dengan Kepres atau undang-undang, adalah sesuatu yang menguntungkan. Karena kesalahpahaman beberapa pihak yang menyangka bahwa KHI seolah-olah usaha kembali kepada “Piagam Jakarta” dapat disanggah.<sup>158</sup> Apakah dengan memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk agama Islam bertentangan dengan sistem hukum nasional? Menurut Ismail Saleh –mantan Menteri Kehakiman– politik hukum dalam merencanakan pembangunan hukum nasional harus merupakan tri tunggal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Akan tetapi demi keadilan, hukum nasional yang akan diwujudkan berdasarkan wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara, harus juga memperhatikan perbedaan latar belakang sosial budaya dan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, disamping kedua wawasan tersebut, pembangunan hukum nasional harus mempergunakan wawasan “Bhinneka Tunggal Ika”.<sup>159</sup>

Disinilah menurut hemat penulis letaknya KHI, sehingga ia tidak bertentangan dengan Perundang-undangan sistem hukum nasional, sekiranya statusnya diangkat menjadi Undang-Undang. Lain halnya bila

<sup>158</sup> A. Hamid S. Attamimi, *loc.cit*, hlm. 155.

<sup>159</sup> Muhammad Daud Ali, *loc.cit*, hlm. 102-105.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KHI yang penyebarannya ditetapkan berdasarkan Inpres tersebut, dilakukan dengan pendekatan dan pandangan ahli-ahli agama. Pada pokoknya mereka berpendapat bahwa KHI termasuk hukum positif yang wajib dilaksanakan.

Amir Syarifuddin<sup>160</sup> misalnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya secara substansial KHI tersebut adalah hukum positif, karena sepanjang sejarahnya dia berasal dari kitab-kitab fikih yang muatannya tidak banyak mengalami perubahan, kemudian dikodifikasi dan diunifikasi dalam KHI. Substansinya adalah hukum Islam yang dapat diakui keberadaannya, hanya saja diformulasikan sesuai dengan bentuk yang umum dalam peraturan perundangan Indonesia.

KHI adalah fikih Indonesia karena kelahiran KHI merupakan hasil pemikiran dan kesepakatan ulama Indonesia, yang puncaknya terwujud dalam aklamasi ulama pada sebuah lokakarya nasional. Karena itu patut dinilai sebagai “ijmak ulama Indonesia”, meskipun kitab fikih memberikan variasi pendapat, hal ini tidak mengurangi kedudukan KHI tersebut sebagai suatu hukum positif yang mesti dilaksanakan. Karena disamping sifatnya, fikih itu memberi kesempatan bagi setiap orang untuk memilih mengamalkan satu pendapat, dan pendapat tersebut ternyata telah dipilih, kemudian diunifikasi oleh ulama Indonesia, dengan maksud agar tidak menimbulkan keraguan dalam menerima dan mengamalkannya. Dengan demikian, lebih mengarah kepada tercapainya kepastian hukum.

<sup>160</sup> Amir Syarifuddin, *loc.cit*, hlm. 138-140.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© akseptasi milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pandangan yang sama dikemukakan Ahmad Rafiq,<sup>161</sup> yang mengatakan bahwa bila dilihat dari sudut pandang metodologis perumusan KHI dapat dikatakan sebagai ijmak ulama Indonesia, atau paling tidak sebagai kesepakatan mayoritas umat Islam Indonesia. Karena itu KHI bersifat mengikat bagi umat Islam Indonesia dalam hal-hal yang diatur dalam KHI tersebut.

Secara moral ada kewajiban bagi kaum muslim untuk menerima dan melaksanakannya. KHI yang penyebarannya didasarkan kepada Inpres tersebut, bila dilihat dari sudut Perundang-undangan dapat dipahami sebagai produk pemerintah. Dalam Islam, mengamalkan hal seperti ini merupakan kewajiban, karena mematuhi pemimpin (*uli al-amr*) hukumnya wajib selama tidak menyimpang dari aturan Islam.

Berdasarkan pendekatan keagamaan, KHI wajib dilaksanakan umat Islam di Indonesia, karena berbagai alasan, antara lain:

1. Nilai dan norma yang terkandung dalam KHI itu sesuai dengan ide syariat.
2. KHI itu penyusunan dan penyebarannya diatur oleh pemerintah (*uli al-amr*) yang sah.
3. KHI itu dirumuskan dan disepakati para ulama Indonesia.
4. Tujuan melahirkan KHI itu adalah dalam rangka mewujudkan *maṣlahah* dan menghindarkan umat Islam dari *mafsadat*.

Tegasnya, dalam pandangan ahli agama, KHI itu digali dari ajaran dasar Islam, yaitu al-Quran dan al-Hadis, kemudian didukung dan dikukuhkan pemerintah (*uli al-amr*) yang sah.

<sup>161</sup> Ahmad Rafiq, *loc.cit*, hlm. 30.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan perumusan masalah yang ditetapkan dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Hukum Keluarga Islam di Indonesia pada dasarnya telah berkembang sesuai dengan masanya, Di lihat dari sudut inisiator, KHI lahir berdasarkan gagasan Pemerintah RI, dalam hal ini Menteri Agama dan Ketua Mahkamah Agung RI, dan hasilnya ditetapkan berdasarkan Inpres, seolah-olah hukum negara Pancasila yang diterapkan kepada umat Islam Indonesia. Namun bila dilihat dari sudut metode dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan materi KHI, sesungguhnya KHI adalah merupakan fikih (hukum Islam) yang dimanifestasikan di dalam negara Pancasila sesuai dengan kebijakan politik hukum Islam yang diterapkan. Hal ini terlihat dengan reinterperetasi hukum keluarga itu kedalam hukum nasional di Indonesia seperti didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada masalah-masalah hukum keluarga seperti: (1) pencatatan perkawinan; (2) batas usia kawin dan persetujuan kedua calon mempelai; (3) izin poligami; (4) perceraian harus di depan sidang pengadilan; (5) fitnah sebagai penghalang mewarisi; (6) ahli waris pengganti; (7) wasiat wajibah;
2. Reinterpretasi Hukum Islam sangat dibutuhkan untuk menemukan dan menetapkan hukum-hukum yang sesuai dengan kondisi zaman, masa, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu. Karena tanpa ijtihad maka hukum itu akan jumud, padahal kondisi masyarakat selalu berubah pada masanya. Dari sinilah para ulama mendorong para pakar hukum Islam untuk bersungguh-sungguh berijtihad dalam menetapkan hukum Islam itu sendiri.

3. Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta Mahkamah Agung ternyata telah menerapkan atau mengaplikasikan pasal-pasal KHI dalam pertimbangan hukum putusan-putusannya. Terdapat banyak kasus dalam keluarga Islam seperti kasus pencatatan perkawinan, pembaharuan hukum kewarisan, ahli waris pengganti, dan wasiat wajibah yang semuanya lahir dari reinterpretasi dari kitab-kitab fikih tradisional disamping menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya.

**B. Saran-saran**

Bertitik tolak dari temuan penelitian ini, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka memenuhi kebutuhan umat Islam Indonesia akan hukum Islam (fikih) yang responsif terhadap berbagai persoalan modern, hendaklah para dan pemikir hukum Islam senantiasa bersikap dinamis dan merumuskan hukum melalui berbagai tingkatan ijtihad yang dilakukan secara terus menerus dengan penuh rasa tanggung jawab. Kajian terhadap berbagai kasus yang sifatnya kompleks hendaklah ditangani secara terbuka dengan memperhatikan pendapat berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu yang terkait.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Mengingat sebagian muatan KHI telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya bidang hukum perkawinan dengan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No.22 tahun 1946 jo. UU No.32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, serta seluruh peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, diharapkan dapat direvisi dan disempurnakan dengan memasukkan masalah- masalah perkawinan yang belum diatur dalam berbagai peraturan tersebut,
3. Para Hakim Badan Peradilan Agama dan Hakim Agung Mahkamah Agung R.I. diharapkan berani berijtihad untuk menggali dan menemukan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia, serta menafsirkan pasal- pasal yang memerlukan penafsiran untuk melengkapi pasal-pasal KHI dalam merespon berbagai kasus yang terjadi, dan pada gilirannya nanti putusan-putusan tersebut dijadikan bahan masukan dan perbandingan dalam rangka menyempurnakan materi KHI oleh para ulama dan pemikir-pemikir Hukum Islam di Indonesia.
4. Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi seperti Fakultas Syari'ah di IAIN (UIN) dan Fakultas Hukum di universitas-universitas umum, diharapkan semakin meningkatkan dan menggalakkan kajian hukum Islam (fikih) dan metodologinya (usul fikih) dengan tujuan “menumbuhkan keterampilan ijtihad pada para peserta didiknya.” Dalam kaitan ini, kedua lembaga pendidikan tinggi itu dapat bergandengan tangan dalam mewujudkan rumusan hukum Islam yang bersifat lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

1. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Abd al-Rahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al- Irsyad, t.th
- Abd Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- , *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- , *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- , *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana 2005.
- , *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- , dkk, *Pengadilan Agama (Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI)*, Jakarta: Kencana: 2019.
- Abdullah Kelib, "Analisis Tentang Kompilasi Hukum Islam", (Makalah). Disampaikan dalam rangka Penataran Staf Pengajar Hukum Islam PTN/PTS Tingkat Nasional, Angkatan I, Tahun 1995, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 1995.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman Wahi, et.al, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1999.
- Abd al-Hasan al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Abd A'la Maududi, "A Short History of the Revivalist Movenment in Islam", terjemahan Hamid L. A. Basalamah, *Gerakan Kebangkitan Islam*, Bandung: Risalah, 1984.
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Terjemahan Agah Garnadi Bandung: Pustaka, 1984.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Masalah Mursalah dan Relefansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



-----, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Ahmad Safwat, "The Theory of Mohammedan Law", *Journal of Comparative Legislation and International Law*, vol. 2 .1920.

Akahir al-Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Terj. M. Adib Bisri), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Amarullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Amran Suadi, Mardi candra, *Politik Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.

-----, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenanda Group, 2018.

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2019.

Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994.

Ayang Utriana, *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*, Jakarta: Kencana, 2016.

Al-Imam 'Ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasan', *Kitab Bad'i al-cani Fi Tartib asy-Syara 'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Quran*, (Terj. Yazuar Radianti), Bandung: Pustaka, 1994

Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

-----, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, cet. ke-2, 1993.

-----, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Amur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, 2019.

Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Anderson, *Islamic Law in The Modern World*, (Terjemahan Machmun Husein), Surabaya: Amar Press, 1990.

Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA & CUSO, 1994

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama: Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asni. Jurnal Al-'Adl. *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Vol. 6 No. 1 Januari 2013.

Azyumardi Azra, "Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia Neo-Sufisme Abad Ke 11 – 12 H.", dalam *Tasawuf*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, t.th.

Badran, *Ahkam al-Wasaya wa al-Auqaf*, (Iskandariyah: Muassasah Syabab al-jami'ah, 1982.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.

Bustami Muhammad Saad, *Mufhum Tajdid ad-Din ad-Da'wah*, Kuwait: t.tp., t.p., t.th.

Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996

Al-Gazali, *Al-Mustasfa*, Mesir: Al-Matba'ah al-'amiriyah, 1324 H

Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia*.

Daniel S. Lev., *Islamic Courts in Indonesia: A Study of the Political Bases of Legal Intitutions*, Barkelay dan Los Angeles: University of California Press, 1972.

Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 2005.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial (Dirasah Islamiyah III)*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1994

Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, bandung, Rosda Karya, 2002.

Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditbinbapera Ditjen Binbaga Departemen Agama R.I., 1991-1992.

Depdikbud, *Kamus Besar Nahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cetakan ketiga, 1999.

Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LKIS, 2001.

Fatmurrachman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.

-----, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1977.

Form Studi Hukum Islam Fakultas Syariat IAIN Sunan Kalijaga, *Ke Arah Fikih Indonesia Mengenang Jasa Prof. Dr. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy*,





Yogyakarta: Forum studi Hukum Islam Fakultas Syariat IAIN Sunan Kalijaga, 1994.

Faisar Ananda, dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2016

H.T.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

Al-Hadad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Terj. M. Adib Bisri), Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Hamid Ahmad, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: P3M, 1987.

Harold H. Titus, dkk., *Persoalan-Persoalan Filsafat*, Alih Bahasa: H. M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI – Press, 1986.

-----, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Hasan Basry, *Perlunya Kompilasi Hukum Islam*, *Mimbar Ulama*, No. 104, Tahun X April 1986.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, Kairo: Maktabah al- Jumhuriyyah al-‘Arobiyyah, 1970.

Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Ilmiyyah, t.th.

Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid*, Singapura: Sulaiman Ma’iyy, 1960.

Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar‘iyyah fi Iṣlah al-Ra‘i wa al-Ra‘iyyah*, Mesir : Dar al-Kitab al-Garbi, 1951

Ibrahim Husen, “Memecahkan Permasalahan Hukum Baru” dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Ed.), *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.

-----, *Fiqh Perbandingan, Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Imran A.M., “Hukum Kewarisan dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam” dalam Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 24 Tahun VII – 1996, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1996.

Iqbal Abdurrauf Saimima, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Terj. Ghufuran A. Mas‘adi, buku kesatu dan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Ishaq Ibrahim Al-Syatibî, *Al- Muwâfaqât fî Usûl al-Ahkâm*, Beirut: Dâral-Fikr al-Mu’âsir, 2001

Ismail Suny, “Kompilasi Hukum Islam Ditinjau dari Sudut Pertumbuhan Teori



Hukum di Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 Tahun II–1991, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 1991.

Izomuddin, *Pemikiran dan filsafat Hukum Islam*, Kencana, 2018.

J.S. Badudu, *Pelik – Pelik Bahasa Indonesia*, Bandung: Pustaka Prima, 1985.  
Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, Jakarta: Nusa Indah, 1979.

Jaad al-Haq ‘Ali Jaad al-Haq, *Buhus Wa Fatawa Islamiyyah fi Qodaya Mu’asrah*, Kairo: Jami‘at alAzhar, t.th.

Jaenal Arifin, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

-----, *Reformasi Hukum di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Peradilan Agama*, Desertasi SPS UIN Jakarta, 1428 H/2007 M.

Jimmy Assiddieqy, *Hukum Islam di Indonesia: Dilema Legislasi Hukum Agama di Negara Pancasila*, Majalah Pesantren No. 2 Vol: XIV, 1999.

JND Anderson, *Law Reform in The Moslem World*, London: University of London, 1976.

John J. Donohur – John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan, Ensiklopedi Masalah- Masalah*, (Terj. Machnun Husein), Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.

Joseph Schacht, “Problem of Modern Islamic Legislation”, dalam *Studia Islamica*, vol. 12, 1996.

K. Wantjik Saleh, SH., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

Kafrawi Ridwan, dkk., (Ed.), “Talak”, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Houve, 1999.

Kamaruzzaman Bustamam – Ahmad, “Hukum Islam Dalam Konteks Masyarakat Modern” dalam Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 48 Tahun XI – 2000, Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera, 2000

Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Khudri Bek, *Tareh Tasyri al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya: Bandung, 2000.

Loi Ma’lf, *Al-Munjid al-Abjadi*, Beirut, Libanon: Daral-Masyriq, 1986.

M. Fauzan, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, edisi pertama, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





-----, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2005.

M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Mahadi, *Beberapa Catatan Tentang Peradilan Agama*, Medan: Fakultas Hukum USU, 1969, h. 5-62.

Mahmud Syaltut, *al-Fatawa: Dirasah Musykillat al-Muslim al-Mu'asir fi hayatihi al- Yaumiyyah al- 'Ammah*, ttp: Dar al-Qalam, tth.

Malik bin Amr, *al-Muwatta'*, edisi Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, t.tp., t.p., t.th.

Masrain Basran, *Kompilasi Hukum Islam Mimbar Ulama*, No. 105, Tahun X, Mei 1986.

Masfuk Zuhdi, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*, Surabaya: PTA Surabaya, 1995.

-----, "Reinterpretasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam", *Makalah*, Surabaya: P.T.A. Jawa Timur, 1995.

Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Kencana, 2016.

-----, *Hukum Pidana Islam*, Prenada Media Group: Kencana, 2018.

-----, *Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indoesia*, Kencana: 2013.

Matardi E, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan di Pengadilan Agama" dalam Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 24 Tahun VII, 1996.

Mazhar al-Haq Khan, *Wanita Islam Korban Patologi Sosial*, (Terj. Luqman Hakim), Bandung: Pustaka, 1994.

Moh. Koesnoe, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam Ikatan Hakim Indonesia, *Varia Peradilan*, Jakarta: Majalah Hukum Tahun XI No. 122 Nopember 1995.

Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa's of the Council of Indonesia Ulama, A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, Los Angeles: University of California, 1990.

Muhammad Daud Ali, "Pengembangan Hukum Materiel Peradilan Agama", dalam Cik Hasan Bisri (penyunting), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

-----, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad 1994.

-----, "Peradilan Agama dan masalahnya" dalam Tjun Surjaman (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek*, Bandung: Rasda Karya, 1991

-----, *Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-----, *Kedudukan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Indonesia*, Jakarta : Yayasan Risalah, 1984.

Muhamad Abu Zahrah, *Ibn Hazm (Hayatuhu wa 'Ajruhu, Asrauhu wa fiqhuhu)*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954.

-----, *Usul Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.

Muhammad Ali Al-Sâ'is, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1996.

-----, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990

Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, (Terjemahan), Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, edisi al- Muzni, t.tp., t.p., t.th.

Muhammad Sahnun bin Saad al Tankhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Tadir, 1323 H.

Muhammad Salam Madkur, *Manahij al-Ijtihad fii al-Islam*, Kuwait: Jami'ah Kuwait, 1974.

Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Damaskus: Alif Baal-Adab, 1968.

Muwaffaq ad-Din Abi' Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mugni wa asy-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984

N.J. Coulson, *A History of Islamic Law*, London: Edinburg University Press, 1964.

Niyazi Berkes, *The Development of Secularism in Turkey*, Montreal: Mc. Gill University Press, 1964

Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1988.

Pagar, "Fitnah sebagai penghalang mewarisi dalam pembaharuan Hukum Islam Indonesia" dalam al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 44 Tahun X, 1999.

Pantia Penyusunan Biografi Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML., *Prof. K. H. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990.

Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, Kairo: Al-Markaz al-'Arabi li al-Bahsi wa al-Nasyr, 1981.

Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1999.

-----, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2010, Juz 9.

Al-Quran dan terjemahanya, Jakarta: Kementerian Agama, 2015

Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana: 2019.

Ridwan Muhammad Indra, *Kekuasaan Presiden dalam UUD 1945 Sangat Besar*, Jakarta: Masagung, 1990.



S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris*, Jakarta: Hasta, 1998.

Al-Imam Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar Sadir, 1323 H. jilid III, h. 184.

Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

-----, "Analisis Fiqh", dalam *Mimbar Hukum, Aktualisasi Hukum Islam*, No. 48 Tahun XI – 2000

Saidus Syahar, *Undang-undangan Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari Segi Hukum Islam)*, Bandung: Penerbitan Alumni, 1981

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Soejono Dirdjo Siswono, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1983.

Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI. Press, 1975.

Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Kontemporer Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan, 1993.

Sularno, "Siyasah Syar'iyah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Telaah Terhadap Hukum Kewarisan)", dalam *Jurnal Hukum Islam Al-Mawardi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UII, 1997.

Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan*, Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2019.

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Al-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, Mesir: Dar al-Hadis, t. Th

Asy-Syaukanie, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", dalam *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, vol. 1, no. 1, Juli – Desember, 1998.

Tahr Mahmod, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi: Times Press, 1987,

Teuku Abdul Manan, dkk, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Kencana: 2018.

Tasya Kubro Zadah, *Miftah al-Saadah wa Misbah al-Siyadah*, (Haidar Abad: Dar al-Ma'arif al-Nizamiyyah, t.th

Taufiq, "Perlaksanaan Undang-Undang Keluarga Islam: Pengalaman Indonesia ", *Kumpulan Paper Seminar Serantau Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita*, tanggal 9-10 Maret 1998 oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), h. 7-13.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1986.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar Sulaiman al-Asyqor, *Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Terj. Dedi Junaedi dan Ahmad Nurahma), *Fikih Islam, Sejarah Pembentukan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1954.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

William Morris, editor, *The American Heritage Dictionary of the English Language*, Boston, New York, Atlanta: American Heritage Pub. Co. Inc., 1973

Wiriono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Voreknik van Hoevl, t.th

Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum" dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 5 Tahun III, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera, 1992.

-----, *Tinjauan Singkat Hukum Kekeluargaan Berdasarkan KHI*, Jakarta: Panitia Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama, 1991.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu Semarang – Indonesia, 1977.

Yoesoef Sou'yb, "Hakikat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia" dalam *Istislah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Medan: Fakultas Syari'ah IAIN-SU, edisi No. 3 tahun II, 1993.

Yusuf Qardhawi, *Min Ajli Sahwatin Rasyidah Tujaddidud-din*, Terjemahan Nabhani Idris, *Fiqh Tajdid dan Sahwah Islamiah*, Jakarta: Islamuna Pers, 1997.

-----, *Fiqh al-Zakat*, Beirut: Dar al-Irsyad, t.th.

Zaim Ahmad Noeh, *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Jakarta: P.T. Intermasa, 1986.

UIN SUSKA RIAU



## BIODATA

Nama : MOHD. RAFI RIYAWI, M.Pd.I  
Tempat/Tgl Lahir : Bagansiapi-api, 16 Mei 1979  
Alamat : Pontren Hubbulwathan Desa Simpang Padang Duri  
Pekerjaan : Dosen STAI Hubbulwathan Duri  
Ayah : Drs. H. Mohd. Khothbah Arraffie (Hamka Riau)  
Ibu : Hj. Maimunah  
Isteri : Mardiah, S.Pd.I

### Riwayat Pendidikan:

1. Madrasah Ibtidaiyah Hubbulwathan Duri 1991
2. Madrasah Tsabawiyah Hubbulwathan Duri 1994
3. Madrasah Aliyah Hubbulwathan Duri 1997
4. IAIN SUSQA Pekanbaru (Tadris Bahasa Inggris) 2002
5. UIN SUSKA RIAU (Manajemen Pendidikan Islam) 2010

### Riwayat Pekerjaan:

1. Guru dan Kepala MTs Hubbulwathan Duri 2006-2013
2. Dosen dan Ketua STAI Hubbulwathan Duri 2016-sekarang

### Riwayat Organisasi:

1. Sekretaris Umum Yayasan Pondok Pesantren Hubbulwathan Riau
2. Wakil Ketua MUI Kec. Bathin Solapan
3. Sekretaris LAMR Kec. Mandau
4. Sekretaris KBIH al-Adzkar Duri
5. Anggota Ikatan Keluarga Rokan Hilir (IKROHIL) Kec. Mandau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Publikasi Ilmiah:

1. An Analysis on Students' Errors in Using Direct and Indirect Speech in Sentences at Sixth Semester Of STAI Hubbulwathan Duri (*Published on Jurnal al-Ishlah*, 2017)
2. The Effect of Applying Collaborative Strategy Reading (Csr) Toward Students' Reading Comprehension at The Eighth Grade of MTs Hubbulwathan Duri (*Published on Jurnal al-Ishlah*, 2018)
3. Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah (*Published on Jurnal Legitima*, 2021)
4. Buku *You Can Master It* terbitan Writing Revolution (WR), Yogyakarta, 2016

Anggota Keluarga:

1. Mohd. Zaim Ar-Rafie
2. Mohd. Zahid Ar Rafie
3. Moza Zahrana Ar Rafie